



PROFIL

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

TAHUN 2022



Pemerintah Kota Bima
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

DUKCAPIL
GO
DIGITAL

**ZONA
INTEGRITAS**
NORUPSI

264,2 JUTA
JIWA

Indonesia memasuki
ageing population

Penduduk berusia 65 tahun ke atas



PROFIL

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

TAHUN 2022



GET IT ON
Google play
AYO SEGERA AKTIVASI!

IKD

IDENTITAS
KEPENDUDUKAN
DIGITAL



dis
**duk
capil**
KOTA BIMA

DUKCAPIL Kota Bima

dukcapilkotabima

DukcapilKota Bima

@BimaDukcapil

+6282340649368

<https://dukcapil.bimakota.go.id/>

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA BIMA TAHUN 2022



**Disusun Oleh:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima
2023**

Kata Pengantar

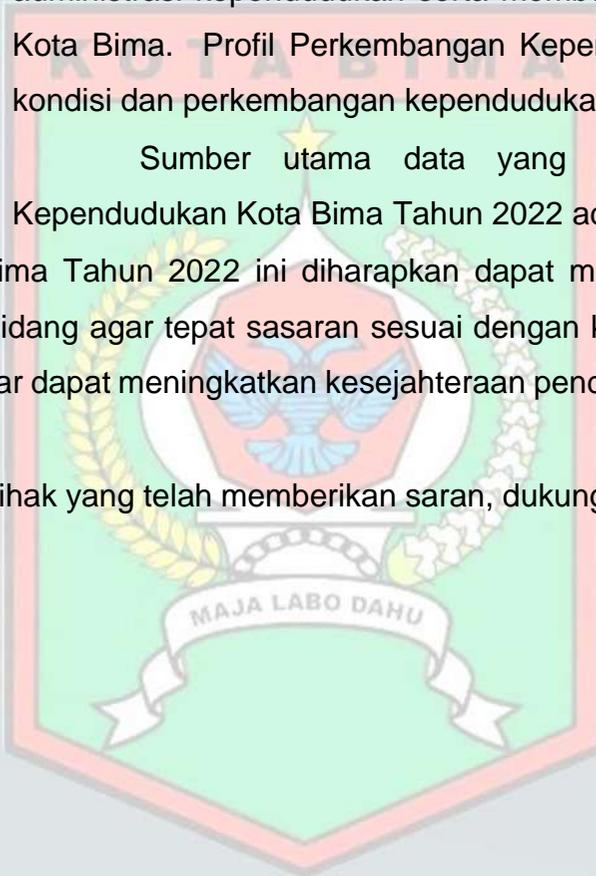


Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022 guna peningkatan pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan di Kota Bima. Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2022 merupakan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Kota Bima pada tahun 2022.

Sumber utama data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2022 adalah Data Konsolidasi Bersih status 31 Desember 2022.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran sesuai dengan kondisi penduduk, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, sehingga benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Kota Bima pada khususnya dan penduduk Indonesia secara keseluruhan pada umumnya.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022 ini.



Kota Bima, Februari 2023
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Hj.MARIAMAH, SH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670311 199303 2 013

Daftar Isi

Halaman Depan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian Umum	3



BAB II GAMBARAN UMUM KOTA BIMA	5
A. Kondisi Geografis Kota Bima.....	5
B. Kondisi Demografis Kota Bima.....	10
C. Gambaran Ekonomi Kota Bima.....	11
D. Gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.....	14
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan.....	14
2. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	15
3. Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.....	16
BAB III SUMBER DATA	23
BAB IV KOMPONEN KEPENDUDUKAN	25
A. Kuantitas Penduduk.....	25
1. Komposisi dan Persebaran Penduduk.....	25
2. Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan.....	30
3. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan.....	32
B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.....	35
1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	35
2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Sosial.....	48



3. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Keluarga	65
4. Jumlah Penduduk Menurut Karakteristik Sosial.....	88
5. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian.....	91
BAB V KUALITAS DAN MOBILITAS PENDUDUK	96
A. Tingkat Kesehatan Penduduk	97
1. Aspek Kelahiran.....	98
2. Aspek Kematian.....	102
3. Sosial.....	107
B. Aspek Pendidikan.....	111
C. Aspek Ekonomi.....	114
BAB VI KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....	129
A. Kepemilikan Kartu Keluarga.....	130
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	133
C. Penerbitan Akta	140
D. Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak	152
E. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).....	153



BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	156
A. Kesimpulan.....	156
1. Aspek Kuantitas	156
2. Aspek Kualitas.....	157
3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan.....	158
4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan.....	159
B. Implikasi Kebijakan	160



Daftar Tabel

Tabel II.1 Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan	8
Tabel II.2 Keadaan Geografi Kota Bima	10
Tabel II.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Kota Bima (Persen)	12
Tabel II.4 PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bima (Milyar Rupiah)	13
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Jenis Kelamin	26
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Barat.....	27
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Timur.....	27
Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Asakota.....	28
Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Raba	28
Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Mpunda.....	29
Tabel IV.7 Rasio Kepadatan Penduduk Per Kecamatan.....	30
Tabel IV.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan	34



Tabel IV.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	36
Tabel IV.10 Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2022	39
Tabel IV.11 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bima Tahun 2022	40
Tabel IV.12 Persentase Kumulatif Penduduk Kota Bima menurut Kelompok Umur	43
Tabel IV.13 Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>) Menurut Kecamatan	45
Tabel IV.14 Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>) menurut Kelompok Umur.....	47
Tabel IV.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	49
Tabel IV.16 Jumlah Penduduk yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD.....	51
Tabel IV.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin	52
Tabel IV.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Kecamatan	53
Tabel IV.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan.....	54
Tabel IV.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	55
Tabel IV.21 Angka Perkawinan Kasar per Kecamatan	57



Tabel IV.22 Angka Perkawinan Umum Per Kecamatan.....	58
Tabel IV.23 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	60
Tabel IV.24 Jumlah Perempuan (Usia 15-49 Tahun) menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2022	62
Tabel IV.25 Angka Perceraian Kasar per Kecamatan.....	63
Tabel IV.26 Angka Perceraian Umum per Kecamatan	64
Tabel IV.27 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan.....	67
Tabel IV.28 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dalam Keluarga	68
Tabel IV.29 Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan	70
Tabel IV.30 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Barat.....	71
Tabel IV.31 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Timur.....	72
Tabel IV.32 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Asakota.....	73
Tabel IV.33 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Raba.....	73
Tabel IV.34 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Mpunda.....	74

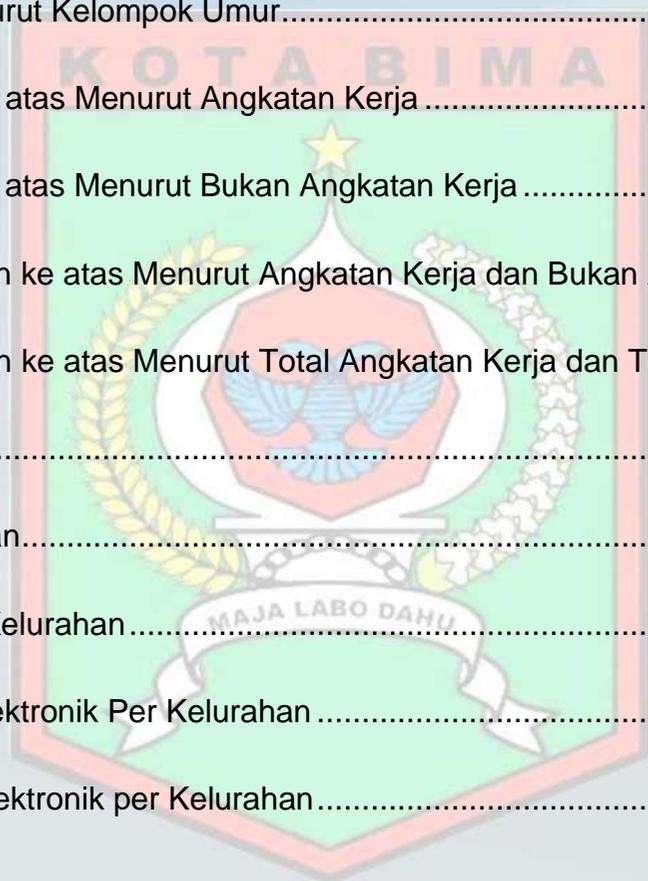


Tabel IV.35 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	76
Tabel IV.36 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan.....	77
Tabel IV.37 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan	80
Tabel IV.38 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan	81
Tabel IV.39 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan	87
Tabel IV.40 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	89
Tabel IV.41 Jumlah Penduduk Wajib Belajar yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD.....	91
Tabel IV.42 Jumlah Kelahiran Hidup per Kecamatan	92
Tabel IV.43 Angka Kelahiran Kasar per Kecamatan.....	93
Tabel IV.44 Jumlah Perempuan Remaja (Usia 15-19 Tahun) yang Sudah Kawin dan Melahirkan Tahun 2022	95
Tabel V.1 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Bima Tahun 2022	98
Tabel V.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di rinci menurut Kesertaan KB per Kecamatan	100
Tabel V.3 Jumlah Peserta KB di rinci berdasarkan Alat/Metode KB yang digunakan per Kecamatan	100



Tabel V.4 Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita.....	103
Tabel V.5 Jumlah Kematian Ibu (yang dilaporkan) dirinci per kecamatan	104
Tabel V.6 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi (yang dilaporkan) dirinci per Kecamatan.....	104
Tabel V.7 Jumlah Bayi di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022	105
Tabel V.8 Jumlah Anak Balita, dan Balita di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022	105
Tabel V.9 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita (yang dilaporkan) di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022	106
Tabel V.10 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dirinci per Kecamatan Tahun 2022.....	107
Tabel V.11 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng berdasarkan Data Terpadu FM-OTM Kota Bima Tahun 2022	108
Tabel V.12 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Menerima Paket Sandang	108
Tabel V.13 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.....	109
Tabel V.14 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	109

Tabel V.15 Jumlah Penyandang Disabilitas.....	111
Tabel V.16 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Bima, 2021 dan 2022.....	112
Tabel V.17 Angka Partisipasi Jenjang TK, KB/PAUD, SD, dan SMP di Kota Bima Tahun Pelajaran 2021/2022	113
Tabel V.18 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur.....	115
Tabel V.19 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja	121
Tabel V.20 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Bukan Angkatan Kerja	122
Tabel V.21 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	122
Tabel V.22 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Total Angkatan Kerja dan Total Bukan Angkatan Kerja	123
Tabel V.23 Jumlah Penduduk Usia Kerja	123
Tabel V.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	124
Tabel VI.1 Cakupan Kepemilin Kartu Keluarga Per Kelurahan.....	131
Tabel VI.2 Jumlah dan Capaian Perekaman KTP Elektronik Per Kelurahan	134
Tabel VI.3 Jumlah dan Capaian Pencetakan KTP Elektronik per Kelurahan.....	137



Tabel VI.4 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir per Kelurahan.....	141
Tabel VI.5 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun per Kelurahan	143
Tabel VI.6 Jumlah Penerbitan Akta Kematian per Kecamatan	146
Tabel VI.7 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perkawinan per Kelurahan.....	147
Tabel VI.8 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perceraian per Kelurahan	150
Tabel VI.9 Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan & Pengangkatan Anak	152
Tabel VI.10 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak per Kelurahan.....	154



Daftar Gambar

Gambar II.1 Peta Wilayah Kota Bima.....	7
Gambar IV.1 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan.....	26
Gambar IV.2 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan.....	32
Gambar IV.3 Piramida Penduduk Kota Bima.....	38
Gambar IV.4 Grafik Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2022.....	41
Gambar IV.5 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk.....	42
Gambar IV.6 Grafik Rasio Jenis Kelamin.....	46
Gambar IV.7 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	56
Gambar IV.8 Grafik Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan.....	71
Gambar IV.9 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan.....	78
Gambar IV.10 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	88



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perjalanan bangsa dalam mencapai tujuannya, yakni menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan pembangunan akan berhasil apabila aspek-aspeknya diperhatikan dan diperhitungkan. Aspek kependudukan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan, sehingga informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan, kebijakan serta evaluasi pembangunan berwawasan kependudukan yang berkesinambungan. Pembangunan yang berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada di suatu wilayah. Oleh sebab itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi tentang kondisi dan karakteristik penduduk Kota Bima, untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Bima.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2022 yakni untuk menyajikan data kependudukan serta memberikan gambaran kondisi, perkembangan, dan proses kependudukan Kota Bima Tahun 2022. Secara umum, Profil Perkembangan

Kependudukan Kota Bima Tahun 2022 dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah, perencanaan tolak ukur kinerja pembangunan daerah dan penentuan target kinerja pembangunan, sedangkan secara khusus pemanfaatan informasi perkembangan kependudukan tahun 2022 dimanfaatkan sebagai rujukan data untuk:

1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kota;
2. Perencanaan kebijakan kependudukan daerah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
3. Penentuan target kinerja dan sasaran program pembangunan daerah terkait pengarusutamaan program-program pembangunan dalam rangka usaha penanggulangan tingkat kemiskinan daerah;
4. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan jaminan sosial masyarakat;
5. Pengembangan kelembagaan dalam partisipasi pembangunan masyarakat;
6. Penelitian lembaga dan Mahasiswa dalam mencapai tujuannya.

C. Ruang Lingkup

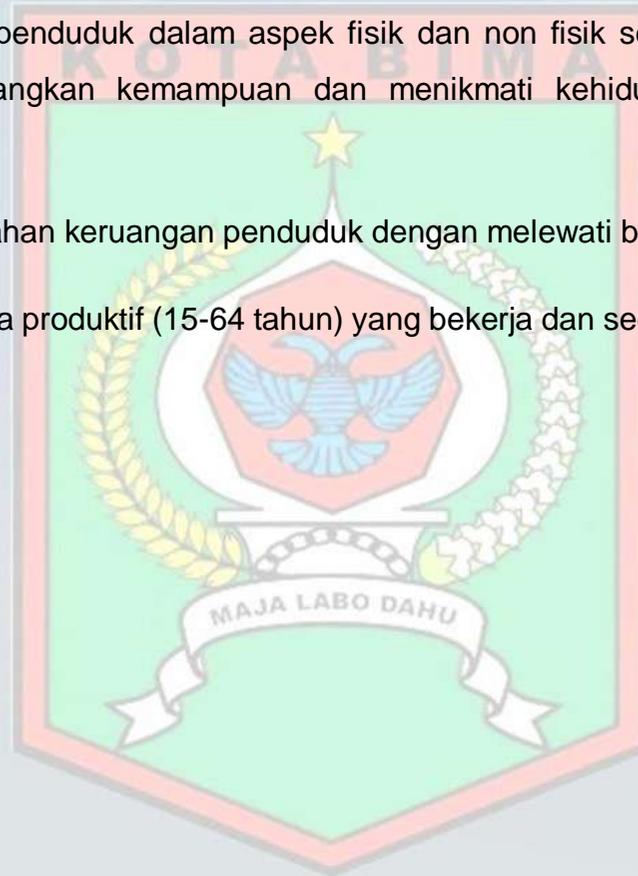
Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima 2022 memuat deskripsi data dan analisis implikasi atas data :

1. Kuantitas penduduk meliputi jumlah dan komposisi beserta persebaran penduduk, dan penduduk menurut demografi;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial;
3. Mobilitas (Migrasi) penduduk baik migrasi keluar maupun migrasi masuk;
4. Kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP-el, KIA, dan Akta-Akta.

D. Pengertian Umum

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Bima.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk Kota Bima.
3. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkesinambungan.
4. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan, dan prospek kependudukan.
6. **Pendaftaran penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
7. **Pencatatan sipil** adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
8. **Peristiwa kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

9. **Peristiwa penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, pindah, datang, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
10. **Kuantitas penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah datang tempat tinggal.
11. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang layak, berbudaya, dan berkepribadian.
12. **Mobilitas penduduk** adalah perpindahan keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.



BAB II

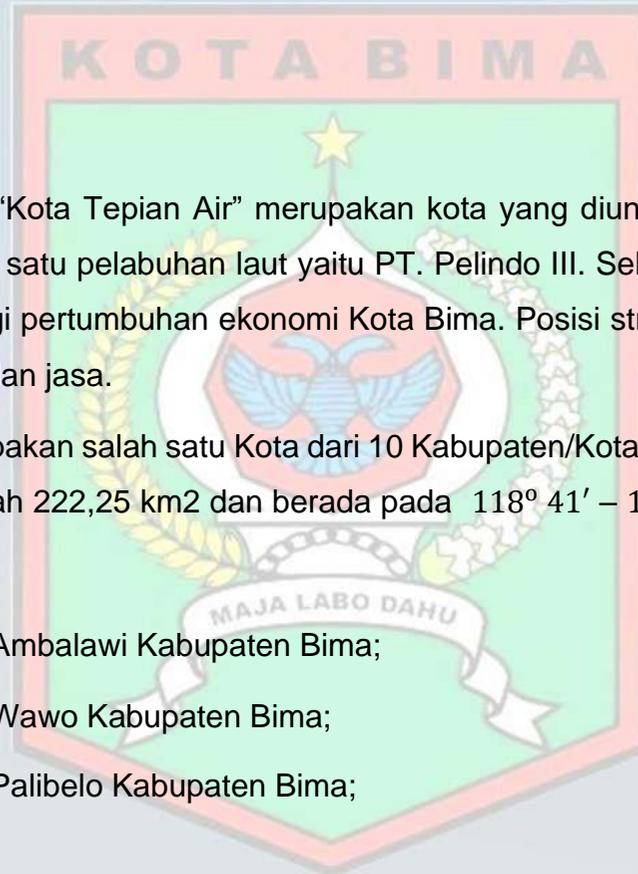
GAMBARAN UMUM KOTA BIMA

A. Kondisi Geografis Kota Bima

Kota Bima yang dikenal sebagai “Kota Tepian Air” merupakan kota yang diuntungkan secara geografis, selain berada di ujung timur Pulau Sumbawa, Kota Bima juga memiliki satu pelabuhan laut yaitu PT. Pelindo III. Selain itu, pelabuhan Sape dan Bandar Udara Muhammad Salahudin juga merupakan penunjang bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bima. Posisi strategis Kota Bima dapat menunjang perwujudan kota ini sebagai kota pusat perdagangan barang dan jasa.

Secara geografis Kota Bima merupakan salah satu Kota dari 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Bagian Timur Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 222,25 km² dan berada pada 118° 41' – 118°, 48' Bujur Timur dan 8°, 30' - 8°, 20' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

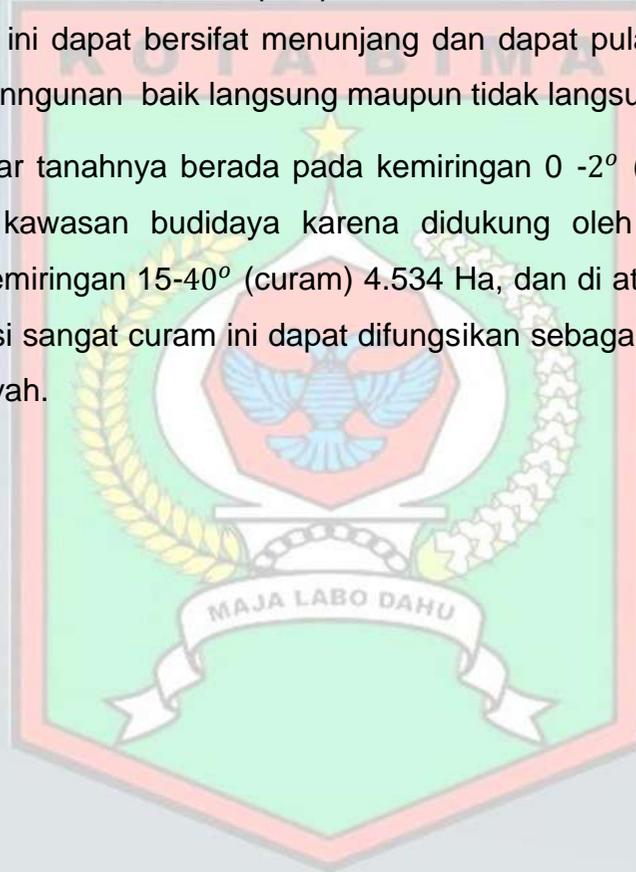
- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Sebelah Utara | : | Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima; |
| Sebelah Timur | : | Kecamatan Wawo Kabupaten Bima; |
| Sebelah Selatan | : | Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima; |
| Sebelah Barat | : | Teluk Bima. |

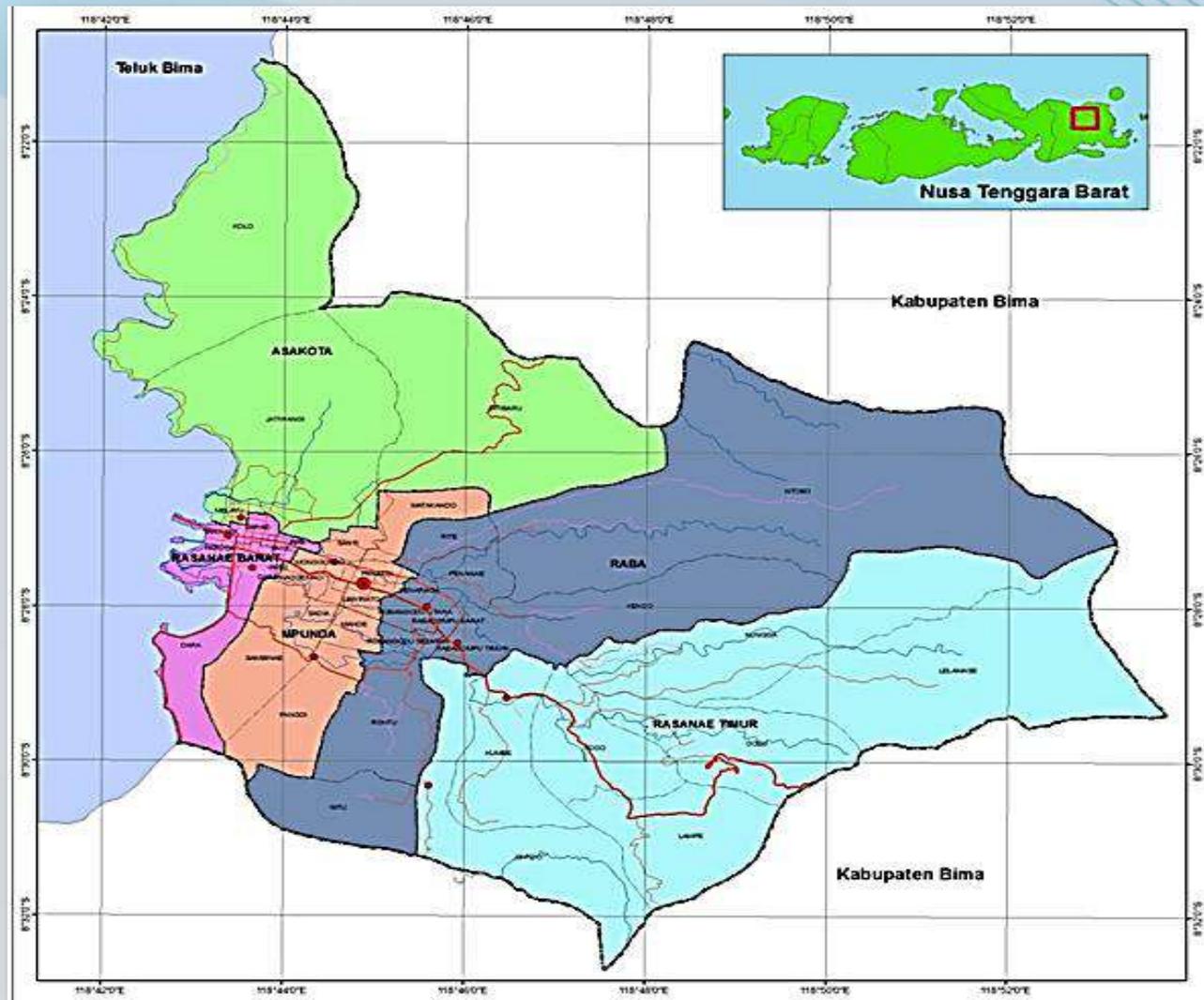


Berdasarkan data statistik dari lembaga Meteorologi dan Geofisika wilayah Bima, temperatur maksimum sepanjang tahun 2020 sekitar 37°C dan temperatur minimum sekitar 36°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Juli. Sebagai daerah tropis, Kota Bima mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu sekitar 85,08 persen, dengan rata-rata tekanan udara mencapai 1.011,92 mb.

Faktor geografi yang dimaksud antara lain mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula menghambat. Tersedianya sumber daya alam (SDA) merupakan faktor yang menunjang pembangunan baik langsung maupun tidak langsung.

Wilayah Kota Bima sebagian besar tanahnya berada pada kemiringan 0 -2° (datar) seluas 9.242 Ha. Hal ini menjadi potensi dalam melaksanakan pembangunan fisik dan kawasan budidaya karena didukung oleh kondisi topografi yang memadai, kemiringan 2-15° (bergelombang) dengan luas 4.994 Ha, kemiringan 15-40° (curam) 4.534 Ha, dan di atas 40° (sangat curam) 2.957 yaitu kurang lebih 13.61% dari luas wilayah dan lahan dengan kondisi sangat curam ini dapat difungsikan sebagai kawasan lindung, sedangkan kemiringan tanah antara 2-15° kurang lebih 22.99% dari luas wilayah.





Gambar II.1 : Peta Wilayah Kota Bima

Tabel II.1 Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan

Kecamatan	Datar (0 – 2°)	Bergelombang (2 – 15°)	Curam (15 – 40°)	Sangat Curam (>40°)
Rasanae Barat	395	294	180	145
Rasanae Timur	688	287	257	296
Asakota	794	1.533	1.500	2.455
Raba	806	1.170	1.500	2.772
Mpunda	1.300	1.991	1.725	1.639
Jumlah	3.983	5.275	5.162	7.307

Sumber : BPS Kota Bima, 2022

Sumber daya Alam baik yang terkandung di daratan, sungai, maupun dilaut merupakan potensi ekonomi yang besar. Pengelolaan dan peningkatan sumber daya secara efisien dan efektif akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kependudukan.

Kota Bima memiliki banyak potensi sebagaimana kota dan kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat seperti potensi pariwisata, perikanan, kelautan, kehutanan, pertanian, dan industri. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan adalah sektor perikanan. Sebagai contoh, Kelurahan Dodu, Ntobo, Nungga, dan Mande dapat dikembangkan menjadi kawasan sentral industri ikan air tawar. Beberapa kelurahan tersebut memiliki potensi dan sumber mata air yang melimpah untuk menjadi sentral industri ikan air tawar. Jenis ikan air tawar yang dapat dibudidayakan antara lain manila, karper, mujair, lele, dll.

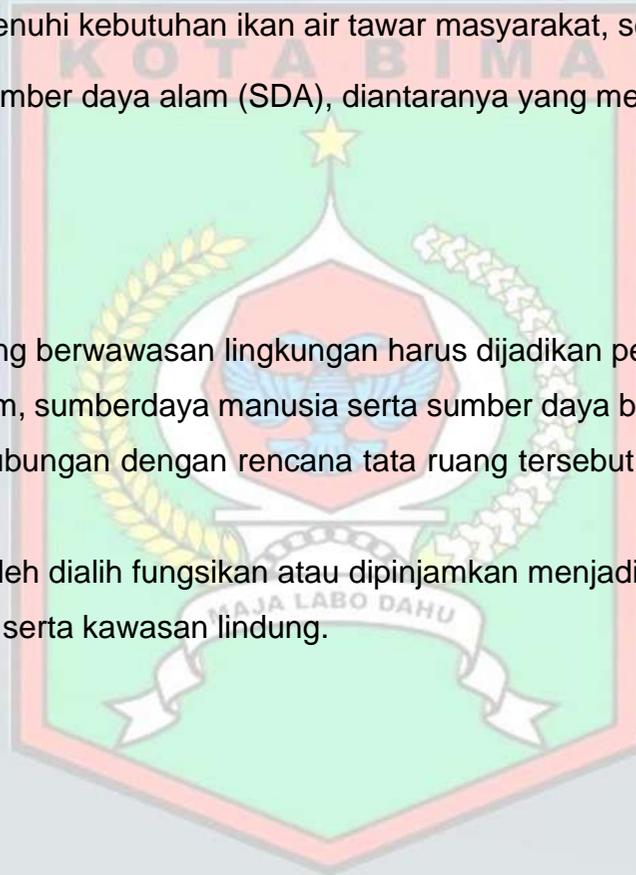
Potensi air yang melimpah pada kawasan tersebut harus dapat diberdayagunakan. Pemerintah Kota Bima melalui kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUBE), melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan, memberikan bantuan bibit ikan, dan memberikan dana stimulan modal usaha. Selain itu, masyarakat di kawasan potensial tersebut diberikan pandangan dan pemahaman agar dapat memanfaatkan potensi air yang ada untuk pembudidayaan ikan air tawar. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup, menyuplai dan memenuhi kebutuhan ikan air tawar masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bima.

Di Kota Bima terdapat berbagai sumber daya alam (SDA), diantaranya yang menjadi andalan adalah sebagai berikut :

- Pertanian
- Perdagangan.
- Wisata Pantai dan Wisata Alam.

Rencana tata ruang Kota Bima yang berwawasan lingkungan harus dijadikan pedoman terpadu Pembangunan agar tatanan lingkungan lingkup dan pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumber daya buatan dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna, berhasil guna secara berkelanjutan. Berhubungan dengan rencana tata ruang tersebut khususnya yang berkaitan dengan pembangunan perlu diperhatikan hal-hal antara lain :

- Lahan sawah beririgasi teknis tidak boleh dialih fungsikan atau dipinjamkan menjadi kawasan apapun;
- Kawasan budidaya dan Non budidaya serta kawasan lindung.



Tabel II.2 Keadaan Geografi Kota Bima

No	Variabel	Jumlah
1	Sumber Daya Alam andalan	- Pertanian - Perdagangan - Pertambangan / Galian - Wisata Pantai / Wisata Alam
2	Keadaan Alam	
	- Musim Kemarau (bulan)	8 Bulan
	- Musim Hujan (bulan)	4 Bulan
	- Curah Hujan Tahunan Rata-rata (mm)	84,04 mm

Sumber : Stasiun Meteorologi M.Salahuddin Bima, 2020

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengaruh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi perkembangan kependudukan.

B. Kondisi Demografis Kota Bima

Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2022 adalah 157.851 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 78.247 jiwa dan perempuan 79.604 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kota Bima sebesar 98,30, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan, meskipun secara nasional penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Kondisi Kota Bima pada tahun 2022 mengalami “Bonus Demografi” dimana usia produktif jumlahnya melebihi dari usia tidak produktif dengan rentang usia produktif yaitu 15 – 64 tahun. Penduduk Kota Bima pada tahun 2022 pada rentang usia produktif sejumlah 107.889.

Pada kondisi “Bonus Demografi” yang sudah terjadi sejak tahun 2022 harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan ekonomi. Melimpahnya tenaga kerja merupakan peluang emas untuk menggenjot roda perekonomian sehingga sektor-sektor ekonomi riil terdorong memiliki peningkatan daya saing.

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Raba yaitu sebanyak 39.786 jiwa dan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur yaitu sebanyak 19.184 jiwa. Angka kepadatan penduduk Kota Bima cukup tinggi yaitu mencapai 710 jiwa/km², sehingga apabila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Bima akan menjadi semakin padat.

C. Gambaran Ekonomi Kota Bima

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Berikut tabel Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bima Tahun 2018-2022. Pemahaman sektor andalan adalah sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. Berdasarkan data perkembangan PDRB per sektor, dapat dihitung besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Bima yang mengandalkan sektor 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 4) Transportasi dan Pergudangan; dan 5) Konstruksi.



Tabel II.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Kota Bima (Persen)

Kategori	Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,43	13,74	14,03	13,38	13,58
B	Pertambangan dan Penggalian	0,35	0,38	0,39	0,40	0,40
C	Industri Pengolahan	2,94	3	3,08	2,98	3,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,20	0,20	0,18	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	8,33	9,11	8,61	9,42	9,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,40	24,60	24,64	25,13	24,46
H	Transportasi dan Pergudangan	9,11	8,51	8,46	10,22	10,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,52	3,01	3,05	3,09	3,11
J	Informasi dan Komunikasi	1,75	1,78	1,75	1,48	1,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,72	2,50	2,49	2,35	2,47
L	Real Estate	5,39	5,39	5,52	5,25	5,37
M, N	Jasa Perusahaan	0,37	0,35	0,36	0,35	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,36	11,86	11,93	11,05	11,70
P	Jasa Pendidikan	7,93	8,44	8,48	7,87	7,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,39	3,48	3,37	3,16	3,14
R, S, T, U	Jasa lainnya	3,76	3,61	3,63	3,66	3,59
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bima Tahun 2023

Tabel II.4 PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bima (Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	416,55	410,79	410,77	412,92	400.11
B	Pertambangan dan Penggalian	11,43	12,14	11,99	12,91	12.40
C	Industri Pengolahan	105,84	103,81	103,20	103,92	100.13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,06	8,27	7,67	7,09	6.60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,97	0,96	0,96	0,98	0.95
F	Konstruksi	262,18	284,10	266,80	305,62	291.52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	739,34	711,18	695,71	740,10	691.30
H	Transportasi dan Pergudangan	289,34	263,95	260,35	326,41	308.29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91,09	75,01	73,98	78,07	74.63
J	Informasi dan Komunikasi	69,85	67,97	64,64	56,96	54.28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	78,87	73,37	73,36	71,96	70.69
L	Real Estate	164,10	157,37	155,58	153,60	145.33
M, N	Jasa Perusahaan	11,14	10,37	10,35	10,56	10.13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	282,05	283,97	279,44	280,51	276.99
P	Jasa Pendidikan	246,04	248,06	244,61	241,35	224.40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	116,40	113,17	107,06	106,18	100.96
R, S, T, U	Jasa lainnya	124,17	114,64	112,75	119,91	112.74
Produk Domestik Regional Bruto		3.018.40	2.939,13	2.879,22	3.029,04	2.881,46

Sumber : BPS Kota Bima Tahun 2023

D. Gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima merupakan lembaga pemerintah daerah yang memberikan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil berlokasi pada Jalan Sokarno Hatta No.2 Raba-Bima. Pelayanan yang diberikan yaitu terkait dengan dokumen pendaftaran penduduk (Kartu Keluarga, KTP-el, Pindah Datang, KIA) dan dokumen pencatatan sipil seperti Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan/Pengesahan/Pengangkatan Anak.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bima merupakan salah satu wujud dari pelayanan publik yang secara operasional pelaksananya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berikut ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

2. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tertuang dalam Peraturan WaliKota Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- c. Pengelolaan administrasi kependudukan;
- d. Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- g. Penyelenggaraan sosialisasi;
- h. Pembinaan jabatan fungsional.



3. Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang mempunyai *tagline* "Melayani dengan Penuh Keikhlasan" berusaha untuk selalu membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bima. Berikut adalah inovasi-inovasi dalam yang telah dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dalam rangka membahagiakan masyarakat:

A. Warda Warta (Wara Bidan Wara Akta) Ada Bidan Ada Akta

Untuk membantu mencapai target cakupan kepemilikan akta kelahiran, maka Dinas Dukcapil Kota Bima berinovasi membuat sebuah sistem layanan yang bernama WARDA WARTA (*wara bidan wara akta*) "ada bidan ada akta", hasil kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bidan seluruh Polindes se-Kota Bima. Inovasi ini dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran, baik akta kelahiran usia 0-17 tahun, maupun akta kelahiran di atas 17 tahun, sehingga proses penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan langsung oleh Bidan. Dokumen yang akan diterima pun tidak hanya akta kelahiran, tetapi disertai Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi pemohon akta kelahiran bayi yang baru lahir. Dengan demikian, Layanan Inovasi Warda Warta adalah sebuah layanan penerbitan akta kelahiran yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan masyarakat.

Inovasi "WARDA WARTA" Dinas Dukcapil Kota Bima mendapatkan Juara Harapan 1 kategori umum. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil pada pagelaran "Malam Apresiasi Inovasi Daerah Kota Bima" yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Bima.



Penyerahan Akta Kelahiran, Inovasi Warda Warta, Ke Bidan Polindes Kelurahan Lelamase

B. Kartu Identitas Anak (KIA) Masuk Sekolah

Merupakan program pemberian identitas bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Di Kota Bima, pemegang kartu ini mendapatkan diskon belanja di beberapa mitra KIA. Dengan KIA, anak-anak sudah bisa mengakses pelayanan publik, misal: membuka tabungan, *check-in* pesawat, akses bantuan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya.

Dalam mewujudkan Pelayanan dengan Ikhlas dan Membahagiakan Masyarakat, Disdukcapil Kota Bima menandatangani PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan beberapa pihak swasta seperti **Outdoormu Adventure Store, Kolam Renang Bima Tirta, Bimbingan Belajar Prime Generation Cabang Kota Bima, Global Mart Kota Bima** yang mana warga Kota Bima yang menggunakan pelayanan dan fasilitas pihak swasta tersebut akan mendapatkan potongan harga. Ke depannya Disdukcapil Kota Bima bertekad untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi lain demi membahagiakan warga Kota Bima.



C. Lao Wa'a Tauma (LAWATA)

Inovasi "LAWATA" merupakan inovasi kerjasama dengan PT. POS Indonesia. Dengan hadirnya inovasi ini, PT. POS sebagai mitra dinas dukcapil akan mengantarkan dokumen kependudukan masyarakat ke seluruh wilayah kota Bima. Inovasi ini diambil dari nama Pantai di Kota Bima yaitu Pantai LAWATA.

LAWATA merupakan singkatan dari LAO WA'A TA UMA (Bahasa Bima) yang artinya Pergi Antar Sampai Rumah.



D. Lalapan Ikan (Layanan Langsung Pengaktivasian Identitas Kependudukan Digital)

Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, KTP Elektronik ikut serta bertransformasi ke dalam bentuk digital. Permendagri No. 72 Tahun 2022 tersebut menjelaskan identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Dengan *Identitas Kependudukan Digital (IKD)*, masyarakat tidak perlu lagi menyimpan KTP dalam bentuk fisik, cukup menunjukkan *QR Code* yang ada dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan administrasi. Guna akselerasi penerapan penggunaan IKD bagi seluruh kalangan, Dinas Dukcapil Kota Bima menghadirkan Inovasi yang dikemas dalam “**LALAPAN IKAN**” yang merupakan singkatan dari **PELAYANAN LANGSUNG PENGAKTIVASIAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL**. Pelaksanaan Inovasi LALAPAN IKAN ini dengan cara membuka pelayanan mobile pada tiap-tiap OPD, kampus, dan tempat-tempat umum lainnya.



E. Seseherahan Dinas Dukcapil Bagi Pasangan Baru Nikah (Handuk Basah)

HANDUK BASAH yang merupakan akronim dari “**H**adiah **A**dminduk **B**agi **P**asangan **B**aru **S**ah **M**enikah” adalah inovasi pelayanan jemput bola dikhususkan kepada warga yang baru melaksanakan pernikahan secara resmi dengan tujuan terciptanya tertib administrasi kependudukan dengan cepat.

Adapun paket layanan adminduk pada inovasi ini, kepada pasangan yang baru menikah tersebut akan mendapatkan 5 (Lima) produk dukcapil yaitu KK baru bagi pengantin, KTP baru bagi pengantin dengan status menikah, KK baru bagi kedua orangtua pengantin.

Dalam pelaksanaan Inovasi ini Dinas Dukcapil Kota Bima berkoordinasi dengan seluruh Kantor Urusan Agama di 5 (Lima) Kecamatan se Kota Bima untuk mendapatkan informasi warga yang akan melaksanakan pernikahan.



F. Pelayanan Penduduk Rentan (LADURENTA)

Inovasi Pelayanan Penduduk Rentan (LADURENTA) merupakan pelayanan yang dilaksanakan dan diberikan khusus kepada seluruh penduduk rentan, baik itu warga lanjut usia (Lansia), penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pelayanan tersebut meliputi pelayanan perekaman biometrik KTP-EL, penyerahan KK, penyerahan biodata, dan penyerahan KTP-EL yang langsung dilaksanakan di masing-masing kediaman penduduk rentan. Dalam pelaksanaan pelayanan ini, sebelumnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAFDUK) mendapat pemberitahuan atau permintaan dari berbagai komponen seperti sanak famili, LSM, Babinkamtibmas dan Babinsa di setiap kelurahan yang kemudian akan ditugaskan pejabat fungsional bersama tim untuk terjun ke lapangan untuk memberikan pelayanan. Dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima mendatangi rumah-rumah penduduk menggunakan Mobil Pelayanan yang sudah dilengkapi berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam proses perekaman maupun pencetakan dokumen kependudukan.



G. Spasiduk Rakit (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit)

Sejak Tahun 2022, Dinas Dukcapil Kota Bima membangun kemitraan dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bima. Inovasi kerja sama tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

Kerjasama yang dihadirkan tersebut yaitu penerbitan adminduk bagi bayi yang baru dilahirkan di Rumah Sakit Muhammadiyah. Produk dukcapil yang akan didapatkan yaitu Kartu Keluarga baru, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

Bagi Ibu yang melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bima, untuk mendapatkan dokumen adminduk yang baru tidak perlu repot melakukan pengurusan sendiri ke Kantor Dinas Dukcapil. Karena dengan adanya Inovasi **Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit “SPASIDUK RAKIT”**, kepemilikan dokumen adminduk baru tersebut akan langsung diterima atau diserahkan oleh pihak Rumah Sakit.



BAB III SUMBER DATA

Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Dalam salah satu klausulnya disebutkan bahwa data dan informasi kependudukan yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bersumber dari data registrasi, non registrasi, dan lintas sektoral.

Data registrasi penduduk merupakan data yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Registrasi kependudukan tersebut diadministrasi ketika penduduk melakukan pencatatan status kependudukannya di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

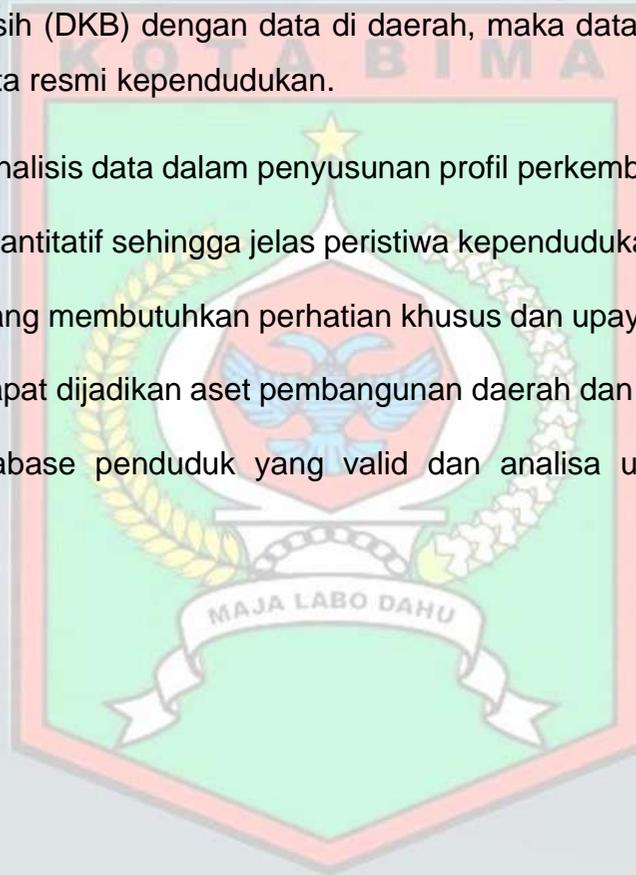
Data non registrasi adalah data bukan hasil registrasi yang menunjang data kependudukan. Sedangkan data lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang menanganibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial. Data lintas sektor ini dipergunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan data kependudukan untuk pengambilan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini meliputi data yang berkaitan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk serta variabel mobilitas penduduk.

Variabel kuantitas penduduk merupakan jumlah penduduk dari selisih perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati dan pindah, datang. Sedangkan variabel kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Variabel Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang mempunyai tanggung-jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data Konsolidasi Bersih diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dua kali dalam setahun. Dan untuk penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022 didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2022 dari Kementerian Dalam Negeri. Bila ada perbedaan data antara Data Konsolidasi Bersih (DKB) dengan data di daerah, maka data DKB yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dijadikan data resmi kependudukan.

Kerangka berfikir serta dasar metode analisis data dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2022 adalah:

1. Menyajikan perkembangan profil secara kuantitatif sehingga jelas peristiwa kependudukan yang terjadi di wilayah;
2. Mengidentifikasi segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan untuk menanganinya;
3. Mengidentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional;
4. Mendorong percepatan terwujudnya database penduduk yang valid dan analisa untuk pembangunan daerah yang berwawasan aspek kependudukan.



BAB IV

KOMPONEN KEPENDUDUKAN

A. Kuantitas Penduduk

1. Komposisi dan Persebaran Penduduk

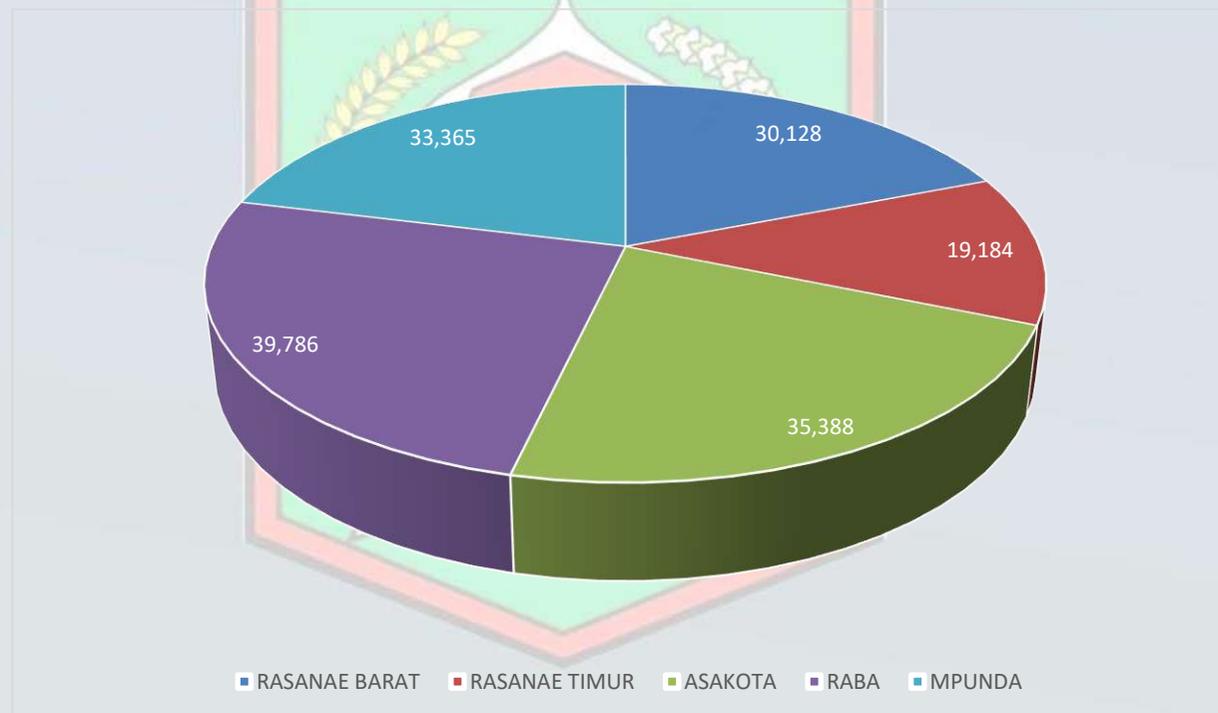
Persoalan kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan persebaran penduduk, karena jumlahnya yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota. Kota Bima dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan permasalahan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi jika tidak serius ditangani akan menjadi masalah yang krusial, apalagi jika jumlah ini dikaitkan dengan luas wilayah, maka permasalahan kepadatan penduduk di Kota Bima sangat riskan. Karena semakin padatnya suatu wilayah, maka akan berakibat tidak terpenuhinya fasilitas umum, padatnya daerah pemukiman dan timbulnya masalah sosial lainnya. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Bima didalam menyelesaikan permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sosial budaya dan ekonomi.

Pada dekade tujuh puluhan hampir setiap daerah menghadapi masalah yang sama yaitu besarnya jumlah penduduk akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta masalah tidak meratanya penduduk disetiap daerah. Terutama antara lain daerah pedesaan dan perkotaan. Masalah jumlah penduduk perlu diperhatikan karena penduduk sebagai sumber daya ekonomi, selain sebagai modal dasar pembangunan, juga merupakan objek bagi pembangunan.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
1	52.72.01	Rasanae Barat	14.865	19,00	15.263	19,17	30.128	19,09
2	52.72.02	Rasanae Timur	9.485	12,12	9.699	12,18	19.184	12,15
3	52.72.03	Asakota	17.753	22,69	17.635	22,15	35.388	22,42
4	52.72.04	Raba	19.644	25,11	20.142	25,30	39.786	25,20
5	52.72.05	Mpunda	16.500	21,09	16.865	21,19	33.365	21,14
Jumlah			78.247	100,00	79.604	100,00	157.851	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.



Gambar IV.1 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Barat

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.01		Rasanae Barat	14.865	100,00	15.263	100,00	30.128	100,00
1	1001	Paruga	2.572	17,30	2.662	17,44	5.234	17,37
2	1002	Nae	2.051	13,80	2.178	14,27	4.229	14,04
3	1003	Sarae	2.536	17,06	2.526	16,55	5.062	16,80
4	1004	Tanjung	3.089	20,78	3.159	20,70	6.248	20,74
5	1013	Pane	1.265	8,51	1.382	9,05	2.647	8,79
6	1014	Dara	3.352	22,55	3.356	21,99	6.708	22,27

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Timur

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.02		Rasanae Timur	9.485	100,00	9.699	100,00	19.184	100,00
1	1004	Kumbe	1.891	19,94	1.927	19,87	3.818	19,90
2	1008	Lampe	773	8,15	821	8,46	1.594	8,31
3	1009	Dodu	1.587	16,73	1.617	16,67	3.204	16,70
4	1011	Nungga	1.227	12,94	1.225	12,63	2.452	12,78
5	1018	Kodo	1.066	11,24	1.126	11,61	2.192	11,43
6	1019	Oi Fo'o	1.064	11,22	1.058	10,91	2.122	11,06
7	1020	Lelamase	980	10,33	1.018	10,50	1.998	10,41
8	1021	Oimbo	897	9,46	907	9,35	1.804	9,40

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Asakota

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
	52.72.03	Asakota	17.753	100,00	17.635	100,00	35.388	100,00
1	1001	Melayu	2.845	16,03	2.886	16,37	5.731	16,19
2	1002	Jatiwangi	3.752	21,13	3.746	21,24	7.498	21,19
3	1003	Jatibaru	3.029	17,06	2.933	16,63	5.962	16,85
4	1004	Kolo	2.954	16,64	2.910	16,50	5.864	16,57
5	1005	Jatibaru Timur	2.002	11,28	2.040	11,57	4.042	11,42
6	1006	Ule	3.171	17,86	3.120	17,69	6.291	17,78

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Raba

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
	52.72.04	Raba	19.644	100,00	20.142	100,00	39.786	100,00
1	1001	Penaraga	2.522	12,84	2.625	13,03	5.147	12,94
2	1002	Rontu	1.642	8,36	1.664	8,26	3.306	8,31
3	1003	Penanae	2.093	10,65	2.095	10,40	4.188	10,53
4	1004	Kendo	755	3,84	774	3,84	1.529	3,84
5	1005	Ntobo	1.916	9,75	1.945	9,66	3.861	9,70
6	1006	Nitu	759	3,86	778	3,86	1.537	3,86
7	1007	Rabangodu Selatan	1.980	10,08	2.026	10,06	4.006	10,07
8	1008	Rabandompu Timur	1.851	9,42	1.926	9,56	3.777	9,49
9	1009	Rite	1.227	6,25	1.176	5,84	2.403	6,04
10	1010	Rabandompu Barat	2.509	12,77	2.676	13,29	5.185	13,03
11	1011	Rabangodu Utara	2.390	12,17	2.457	12,20	4.847	12,18

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Mpunda

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
	52.72.05	Mpunda	16.500	100,00	16.865	100,00	33.365	100,00
1	1001	Monggonao	2.012	12,19	2.024	12,00	4.036	12,10
2	1002	Sadia	1.821	11,04	1.859	11,02	3.680	11,03
3	1003	Santi	1.347	8,16	1.397	8,28	2.744	8,22
4	1004	Sambinae	1.752	10,62	1.753	10,39	3.505	10,51
5	1005	Penatoi	2.336	14,16	2.484	14,73	4.820	14,45
6	1006	Lewirato	1.018	6,17	998	5,92	2.016	6,04
7	1007	Mande	1.380	8,36	1.484	8,80	2.864	8,58
8	1008	Panggi	1.358	8,23	1.356	8,04	2.714	8,13
9	1009	Manggemaci	2.006	12,16	2.066	12,25	4.072	12,20
10	1010	Matakando	1.470	8,91	1.444	8,56	2.914	8,73

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Perkembangan kependudukan merupakan faktor penting untuk menjadi perhatian karena penduduk merupakan subjek dalam pembangunan suatu wilayah. Secara umum penduduk Kota Bima yang terbagi pada 5 Kecamatan dan 41 Kelurahan lebih banyak didominasi pada jenis kelamin perempuan, meskipun secara nasional penduduk Indonesia didominasi jenis kelamin laki-laki.

Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Raba yaitu sejumlah 39.786 jiwa yang terdiri dari 19.644 laki-laki dan 20.142 perempuan atau 25,20% dari total penduduk, disusul Kecamatan Asakota dengan 22,42%. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur yaitu sejumlah 19.184 jiwa dimana 9.485 laki-laki dan 9.699 perempuan atau 12,15% dari total penduduk.

Sedangkan proporsi penduduk perempuan disetiap kecamatan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk laki-laki, kecuali di kecamatan Asakota yang terdiri dari 17.753 laki-laki dan 17.635 perempuan. Sedangkan untuk tingkat kelurahan, jumlah penduduk tertinggi di Kelurahan Jatiwangi dengan jumlah penduduk 7.498 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di kelurahan Kendo dengan jumlah 1.529 jiwa.

2. Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Rasio kepadatan penduduk (*density ratio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk perkilometer persegi pada periode tahun tertentu.

Tabel IV.7 Rasio Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
	Kode	Nama	n	%		
1	52.72.01	Rasanae Barat	30.128	19,09	10,14	2.971
2	52.72.02	Rasanae Timur	19.184	12,15	64,07	299
3	52.72.03	Asakota	35.388	22,42	69,03	513
4	52.72.04	Raba	39.786	25,20	63,73	624
5	52.72.05	Mpunda	33.365	21,14	15,28	2.184
Jumlah			157.851	100,00	222,25	710

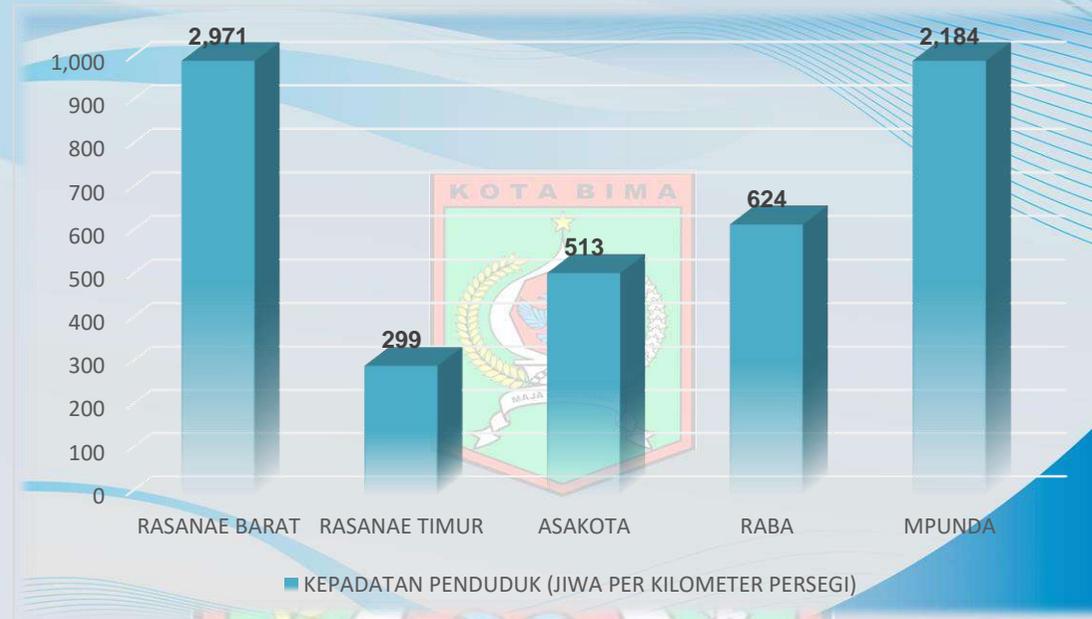
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Angka kepadatan penduduk Kota Bima adalah 710 artinya setiap km² dihuni oleh 710 jiwa. Ditinjau dari persebaran penduduk di setiap kecamatan, kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan yang paling padat di wilayah Kota Bima dengan kepadatan mencapai 2.971 jiwa/km² sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Rasanae Timur yaitu 299 jiwa/km².

Informasi kepadatan penduduk tiap daerah perlu diketahui untuk mengetahui gejala kelebihan penduduk (*overpopulation*), untuk mengetahui pusat-pusat aglomerasi penduduk, serta untuk mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun budaya. Tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah tidak merata karena ada lahan atau wilayah yang kurang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, daerah yang memiliki akses mudah ke pusat industri dan memiliki tanah yang subur cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk. Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960, ada 4 (empat) klasifikasi kepadatan penduduk yaitu *tidak padat* dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa per kilometer persegi, *kurang padat* dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa per kilometer persegi, *cukup padat* dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa per kilometer persegi dan *sangat padat* dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/kilometer persegi.

Menurut ketentuan tersebut, tingkat kepadatan penduduk Kota Bima tergolong sangat padat. Rata-rata setiap km² Kota Bima didiami sebanyak 710 jiwa. Tingkat kepadatan tertinggi terletak di Kecamatan Rasanae Barat dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar IV.2 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan

3. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif artinya terdapat penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sedangkan apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif maka terdapat pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran) maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan.

Penggolongan angka pertumbuhan penduduk merupakan suatu cara untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Ini berfungsi untuk membantu pemerintah membuat kebijakan yang tepat guna mengelola jumlah penduduknya. Penggolongan ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu *pertumbuhan penduduk positif*, *negatif*, dan *nol*.

Pertumbuhan penduduk positif terjadi ketika jumlah penduduk di suatu wilayah bertambah ($r > 0$). Hal ini terjadi karena jumlah kelahiran di wilayah tersebut melebihi jumlah kematian. Ini adalah tanda bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kehidupan yang baik dan masyarakatnya dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Namun, pertumbuhan penduduk positif juga dapat menyebabkan masalah, seperti kelangkaan sumber daya alam, kepadatan penduduk, dan masalah lingkungan.

Pertumbuhan penduduk negatif terjadi ketika jumlah penduduk di suatu wilayah berkurang ($r < 0$). Hal ini terjadi karena jumlah kematian di wilayah tersebut melebihi jumlah kelahiran. Ini dapat menjadi tanda bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, dan masalah sosial lainnya. Pertumbuhan penduduk negatif juga dapat menyebabkan masalah, seperti kekurangan tenaga kerja, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran.

Pertumbuhan penduduk nol terjadi ketika jumlah penduduk di suatu wilayah tidak bertambah atau berkurang ($r = 0$). Ini menunjukkan bahwa jumlah kelahiran dan kematian di wilayah tersebut sama. Hal ini dapat menjadi tanda bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kesehatan dan pendidikan yang baik, sehingga tidak ada masalah sosial yang berarti. Namun, pertumbuhan penduduk nol juga dapat menyebabkan masalah, seperti kekurangan tenaga kerja yang berpengalaman, masalah pendanaan, dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Kesimpulannya, penggolongan angka pertumbuhan penduduk ini sangat penting untuk menentukan tingkat kebutuhan suatu wilayah dan membuat kebijakan yang tepat guna mengelola jumlah penduduk. Dengan mengetahui jenis pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat guna mengelola jumlah penduduknya.

Tabel IV.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk 2022		Jumlah Penduduk 2021		Laju Pertumbuhan Penduduk
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	52.72.01	Rasanae Barat	30.128	19,09	30.196	19,42	-0,23
2	52.72.02	Rasanae Timur	19.184	12,15	18.830	12,11	1,88
3	52.72.03	Asakota	35.388	22,42	34.477	22,17	2,64
4	52.72.04	Raba	39.786	25,20	39.310	25,28	1,21
5	52.72.05	Mpunda	33.365	21,14	32.706	21,03	2,01
Jumlah			157.851	100,00	155.519	100,00	1,50

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Dapat dilihat angka pertumbuhan penduduk Kota Bima dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2022 Semester II (DKB 202202) hasil pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah diintegrasikan dengan data hasil perekaman KTP Elektronik didapatkan nilai sebesar 1,50 persen. Angka ini termasuk sangat tinggi (di atas Laju Pertumbuhan Nasional yakni 1,17 %).

Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya. Jika dilihat menurut kecamatan, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Asakota yaitu 2,64 persen. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kecamatan Asakota dikarenakan banyaknya dibangun perumahan di tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Asakota sehingga arus migrasi masuk lebih besar. Ditambah lagi dengan adanya sarana transportasi yang cukup mendukung, sehingga memudahkan arus keluar masuk barang dan juga mobilitas penduduk.

Untuk Kota Bima, jumlah penduduk pada tahun 2022 sejumlah 157.851 jiwa artinya mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sejumlah 2.332 jiwa. Kenaikan 2.332 penduduk menunjukkan trend positif secara keseluruhan pada Kota Bima. Secara laju pertumbuhan pada kecamatan terdapat trend laju pertumbuhan yang negatif pada kecamatan Rasanae Barat. Laju pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi, serta faktor-faktor non demografis antara lain kesehatan, tingkat pendidikan.

B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Informasi jumlah dan proporsi umur penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau piramida penduduk, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan informasi tersebut. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan.

Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.

Tabel IV.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-4	5.398	6,90	4.875	6,12	10.273	6,51
2	5-9	7.731	9,88	7.264	9,13	14.995	9,50
3	10-14	7.588	9,70	7.061	8,87	14.649	9,28
4	15-19	6.241	7,98	5.996	7,53	12.237	7,75
5	20-24	6.150	7,86	6.617	8,31	12.767	8,09
6	25-29	6.214	7,94	6.237	7,84	12.451	7,89
7	30-34	6.055	7,74	6.284	7,89	12.339	7,82
8	35-39	6.381	8,15	6.398	8,04	12.779	8,10
9	40-44	5.974	7,63	6.420	8,06	12.394	7,85
10	45-49	5.191	6,63	5.611	7,05	10.802	6,84
11	50-54	4.509	5,76	4.630	5,82	9.139	5,79
12	55-59	3.502	4,48	3.922	4,93	7.424	4,70
13	60-64	2.699	3,45	2.858	3,59	5.557	3,52
14	65-69	1.910	2,44	2.166	2,72	4.076	2,58
15	70-74	1.315	1,68	1.453	1,83	2.768	1,75
16	>=75	1.389	1,78	1.812	2,28	3.201	2,03
Jumlah		78.247	100,00	79.604	100,00	157.851	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

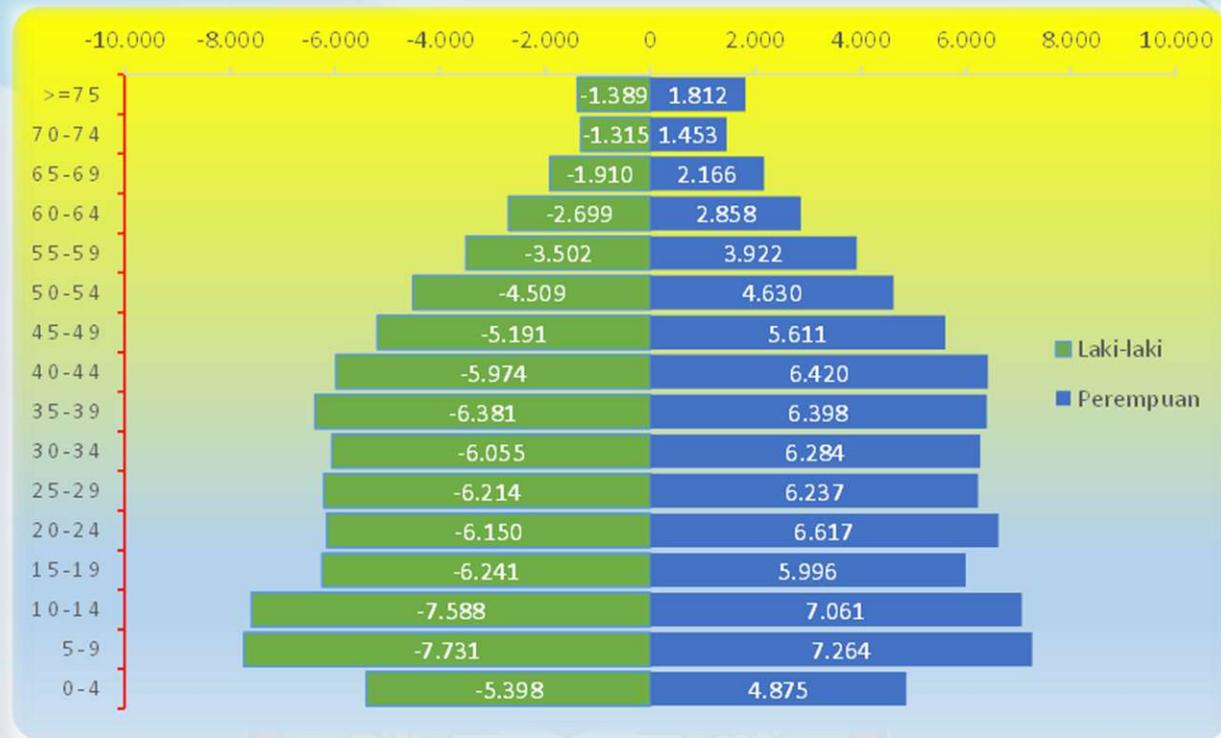
Komposisi penduduk yang sering digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan yaitu komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Dari tabel IV.9 ini terlihat bahwa 6,51 persen penduduk Kota Bima merupakan balita. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota Bima dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan pemenuhan gizi balita serta investasi pendidikan usia dini. Adapun 25,29 persen penduduk Kota Bima adalah penduduk usia wajib mengenyam pendidikan dasar (0-14 tahun). Dimana pemerintah daerah perlu memperhatikan pendidikan bagi penduduk usia ini, terutama ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta ketersediaan lingkungan yang positif.

Komposisi penduduk usia kerja (produktif) terbesar berada pada penduduk berumur 20-24 sebesar 8,09 persen dan 35-39 tahun 8,10 persen. Tidak hanya ketersediaan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang positif di rumah maupun di masyarakat, tetapi pada kelompok umur ini pemerintah juga dituntut untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja.

Untuk komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun. Seperti telah dijelaskan di awal, penduduk usia inilah yang akan menjadi bonus demografi penduduk Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan. Jumlah penduduk Kota Bima, untuk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki 78.247 jiwa atau 49,57% dan jumlah penduduk perempuan 79.604 jiwa atau 50,43%. Komposisi umur dan jenis kelamin penduduk dapat digambarkan secara grafik dengan piramida penduduk.

Piramida penduduk Kota Bima tahun 2022, komposisi penduduk tertinggi berada pada rentang umur 5-9 tahun dimana komposisi penduduk laki-laki sebesar 9,88% dan penduduk perempuan 9,13% dengan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada rentang umur tersebut sebanyak 14.995 jiwa. Adapun komposisi penduduk terkecil berada pada rentang umur 70-74 tahun yakni 1,75 % dari total penduduk Kota Bima dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 1.68% dari total penduduk Kota Bima berjenis kelamin laki-laki dan persentase penduduk perempuan 1,83% dari total penduduk Kota Bima berjenis kelamin perempuan.



Gambar IV.3 Piramida Penduduk Kota Bima

a. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Tabel IV.10 berikut ini menunjukkan lebih dari setengah (68,35%) penduduk Kota Bima merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Kondisi ini sangat menguntungkan Pemerintah Kota Bima karena merupakan penduduk usia kerja dan 25,29 persen penduduk Kota Bima merupakan penduduk berusia kurang dari 15 tahun (penduduk usia muda) dan 6,36 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel IV.10 Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-14	20.717	26,48	19.200	24,12	39.917	25,29
2	15-64	52.916	67,63	54.973	69,06	107.889	68,35
3	>64	4.614	5,90	5.431	6,82	10.045	6,36
Jumlah		78.247	100,00	79.604	100,00	157.851	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Tabel IV.11 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bima Tahun 2022

No	Rasio Ketergantungan	%
1	Muda	37,00
2	Tua	9,31
3	Total	46,31

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Rasio ini menunjukkan beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Dari tabel IV.10 dapat dihitung Rasio Ketergantungan Total sebesar 46,31 %, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

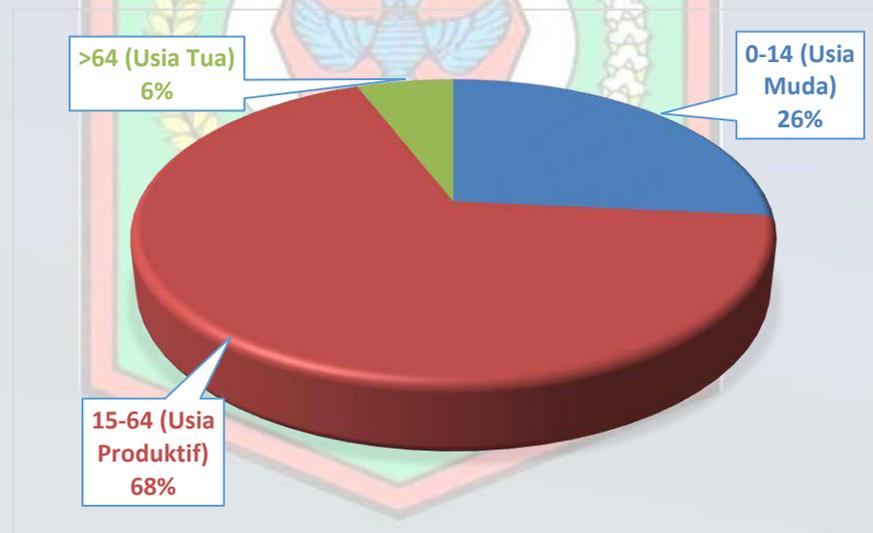
Rasio Ketergantungan Total sebesar 46,31 % ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (37,00 %) dan rasio penduduk tua (9,31 %). Rasio ini memberikan gambaran tentang jumlah orang yang mengandalkan orang lain untuk kebutuhan mereka, terutama dalam hal keuangan dan pengasuhan. Dampak dari tingginya rasio ketergantungan adalah beban ekonomi yang semakin berat bagi penduduk usia produktif. Banyaknya penduduk yang tidak produktif memerlukan dukungan finansial dan pelayanan khusus, seperti pelayanan kesehatan dan perawatan lansia. Hal ini dapat mengganggu pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhan negara atau daerah. Dengan kata lain, rasio ketergantungan mengindikasikan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Rasio ketergantungan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Jika rasio ketergantungan tinggi, maka beban ekonomi akan semakin berat dan dapat menghambat pembangunan ekonomi. Sebaliknya, jika rasio ketergantungan rendah, maka potensi pembangunan ekonomi akan lebih besar karena jumlah penduduk usia produktif lebih dominan.

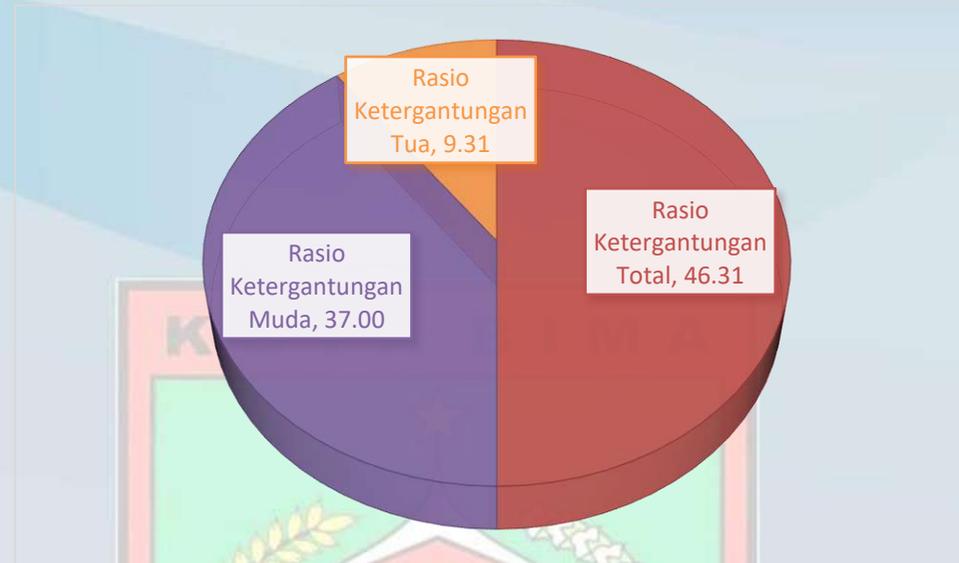
Secara umum rasio ketergantungan Kota Bima tergolong masih rendah, kondisi ini sebenarnya menguntungkan bagi Kota Bima terutama untuk membuat kebijakan dalam memperbesar tabungan rumah tangga, investasi sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasio ketergantungan, antara lain:

- Mendorong kebijakan keluarga berencana yang bijaksana untuk mengurangi jumlah kelahiran yang tidak terkendali;
- Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang baik untuk meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup lansia;
- Menggalakkan program pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang produktif;
- Menerapkan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk usia produktif.



Gambar IV.4 Grafik Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2022



Gambar IV.5 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk

b. Umur Median (*Median Age*)

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun.
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun.
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Tabel IV.12 Persentase Kumulatif Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
0-4	10.273	10.273	6,51
5-9	14.995	25.268	16,01
10-14	14.649	39.917	25,29
15-19	12.237	52.154	33,04
20-24	12.767	64.921	41,13
25-29	12.451	77.372	49,02
30-34	12.339	89.711	56,83
35-39	12.779	102.490	64,93
40-44	12.394	114.884	72,78
45-49	10.802	125.686	79,62
50-54	9.139	134.825	85,41
55-59	7.424	142.249	90,12
60-64	5.557	147.806	93,64
65-69	4.076	151.882	96,22
70-74	2.768	154.650	97,97
>=75	3.201	157.851	100,00
Total	157.851		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah

Berdasarkan Tabel IV.11 dapat dihitung umur median (*median age*) di Kota Bima dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$\text{Umur Median } M_d = I_{Md} + \left[\frac{\frac{N}{2} - f_x}{f_{Md}} \times i \right]$$

Keterangan:

- I_{Md} : Batas bawah kelompok umur yang mengandung N/2
 N : Jumlah penduduk total
 f_x : Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung N/2
 f_{Md} : Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai N/2
 i : Kelas interval umur

Dari rumus di atas didapatkan umur median penduduk Kota Bima tahun 2022 adalah 30,63 tahun dibulatkan 31 tahun. Dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Bima termasuk dalam kategori penduduk tua, yang berarti setengah penduduk Kota Bima pada tahun 2022 berusia di bawah 30 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 30 tahun.

Dengan kata lain, penduduk Kota Bima dikategorikan sebagai penduduk tua yakni penduduk dalam kondisi transisi dari penduduk struktur intermediate (*intermediate population*) ke penduduk struktur tua (*old population*).

c. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Dari tabel IV.12. berikut ini terlihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Kota Bima adalah 98,30 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 orang penduduk laki-laki.

Tabel IV.13 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kecamatan

Kecamatan		Jenis Kelamin		Sex Ratio
Kode	Nama	Laki-laki	Perempuan	
52.72.01	Rasanae Barat	14.865	15.263	97,39
52.72.02	Rasanae Timur	9.485	9.699	97,79
52.72.03	Asakota	17.753	17.635	100,67
52.72.04	Raba	19.644	20.142	97,53
52.72.05	Mpunda	16.500	16.865	97,84
Jumlah		78.247	79.604	98,30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, pada gambar di bawah, terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tertinggi paling tinggi berada di Kecamatan Asakota dengan nilai 100,67 yang artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Jadi dapat dipahami bahwa di Kecamatan Asakota jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Mpunda (97,84), Rasanae Timur (97,79), Raba (97,53), dan Rasanae Barat dengan nilai rasio jenis kelamin terkecil (97,39).



Gambar IV.6 Grafik Rasio Jenis Kelamin

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, pada gambar diatas, terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tertinggi paling tinggi berada di Kecamatan Asakota dengan nilai 100,67 yang artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Jadi dapat dipahami bahwa di Kecamatan Asakota jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Mpunda (97,84), Rasanae Timur (97,79), Raba (97,53), dan Rasanae Barat dengan nilai rasio jenis kelamin terkecil (97,39).

Secara nasional menurut Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni) oleh Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan. Adapun *Sex Ratio* penduduk Kota Bima menurut kelompok umur dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.14 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Sex Ratio
		L	P	L+P	
1	0-4	5.398	4.875	10.273	110,73
2	5-9	7.731	7.264	14.995	106,43
3	10-14	7.588	7.061	14.649	107,46
4	15-19	6.241	5.996	12.237	104,09
5	20-24	6.150	6.617	12.767	92,94
6	25-29	6.214	6.237	12.451	99,63
7	30-34	6.055	6.284	12.339	96,36
8	35-39	6.381	6.398	12.779	99,73
9	40-44	5.974	6.420	12.394	93,05
10	45-49	5.191	5.611	10.802	92,51
11	50-54	4.509	4.630	9.139	97,39
12	55-59	3.502	3.922	7.424	89,29
13	60-64	2.699	2.858	5.557	94,44
14	65-69	1.910	2.166	4.076	88,18
15	70-74	1.315	1.453	2.768	90,50
16	>=75	1.389	1.812	3.201	76,66
Jumlah		78.247	79.604	157.851	98,30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Gambaran rasio jenis kelamin secara nasional dimana lebih banyak penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan berbanding terbalik dengan gambaran rasio jenis kelamin Kota Bima. Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh :

- Rasio jenis kelamin waktu lahir (sex ratio at birth).
- Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar berada pada kelompok umur 00-19 tahun, sedangkan kelompok usia 50 tahun keatas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki lebih banyak yang bermigrasi dibandingkan dengan penduduk perempuannya.

Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 60 tahun ke atas dapat dilihat penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Ini menunjukkan teori yang mengatakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.

2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Sosial

a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Persentase penduduk Kota Bima menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada Tabel 10 di bawah ini terlihat bahwa kualitas penduduk Kota Bima menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan tahun 2022 relatif tinggi. Hampir dari sepertiga penduduk Kota Bima (33,77%) tamat SLTA/Sederajat. Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi penduduk yang tamat SLTA untuk penduduk laki-laki lebih tinggi (34,54%) dibandingkan penduduk perempuan (33,00%).

Tabel IV.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan Terakhir	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tdk/Blm Sekolah	21.315	27,24	20.368	25,59	41.683	26,41
2	Belum Tamat SD/Sederajat	9.321	11,91	9.675	12,15	18.996	12,03
3	Tamat SD/ Sederajat	7.382	9,43	8.460	10,63	15.842	10,04
4	SLTP/Sederajat	7.578	9,68	8.861	11,13	16.439	10,41
5	SLTA/Sederajat	23.701	30,29	22.391	28,13	46.092	29,20
6	D-I/II	384	0,49	773	0,97	1.157	0,73
7	Akademi/D-III/Sarjana Muda	826	1,06	1.574	1,98	2.400	1,52
8	D-IV/S-I	7.269	9,29	7.253	9,11	14.522	9,20
9	S-II	455	0,58	249	0,31	704	0,45
10	S-III	16	0,02	0	0,00	16	0,01
Jumlah		78.247	100,00	79.604	100,00	157.851	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Untuk level pendidikan tamat SLTP/ sederajat, lebih banyak perempuan sebesar 11,13 % yang menamatkan pendidikannya dari pada penduduk laki-laki yang hanya 9,68 %. Sementara level pendidikan tinggi, mulai dari jenjang Diploma I sampai dengan jenjang Diploma III, lebih banyak penduduk perempuan yang menamatkan pendidikannya dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Berbeda halnya dengan jenjang Strata I, jumlah penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan strata I adalah 9,11 persen, sementara untuk laki-laki lebih banyak dengan nilai 9,29 persen. Selisih angka yang tidak begitu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan *gender* dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Kota Bima. Ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan.

Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan. Yang tidak kalah penting adalah dalam upaya peningkatan peranan perempuan sebagai guru bagi anak-anaknya, baik di rumah tangga maupun di lingkungan sosial.

Dari Tabel IV.16 di bawah ini dapat dilihat jumlah penduduk Kota Bima usia 7- 15 tahun yang tidak/belum sekolah cukup banyak yakni 18.915 orang. Lebih banyak penduduk laki-laki yang tidak bersekolah dibandingkan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk yang tidak tamat SD cukup tinggi sebesar 6.792 orang (4,30 persen) dari total jumlah penduduk Kota Bima.

Angka 6.792 jiwa ini merupakan angka kumulatif dari pencatatan yang dilakukan petugas pelayanan terhadap penduduk yang mengurus Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Pada usia pendidikan dasar 14 dan 15 cukup banyak penduduk Kota Bima yang tidak menamatkan pendidikan dasar setingkat SD. Tentu saja ini menuntut perhatian dari Pemerintah Kota untuk merangkul anak usia ini untuk tetap dan mau melanjutkan pendidikan, apakah melalui paket belajar atau melalui program lain yang mendukung upaya peningkatan pendidikan dasar.

Tabel IV.16 Jumlah Penduduk yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD

Usia	Tidak/Belum Sekolah				Tidak Tamat SD			
	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%
7	1.431	1.398	2.829	14,96	30	44	74	1,09
8	1.484	1.324	2.808	14,85	89	77	166	2,44
9	1.331	1.310	2.641	13,96	182	152	334	4,92
10	1.243	1.183	2.426	12,83	315	331	646	9,51
11	1.136	1.100	2.236	11,82	465	370	835	12,29
12	1.045	854	1.899	10,04	503	469	972	14,31
13	762	766	1.528	8,08	572	573	1.145	16,86
14	716	629	1.345	7,11	671	628	1.299	19,13
15	644	559	1.203	6,36	692	629	1.321	19,45
Jumlah	9.792	9.123	18.915	100,00	3.519	3.273	6.792	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

b. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu kota pada waktu tertentu yang disajikan per kecamatan dalam bentuk tabel maupun gambar. Dari tabel dan gambar tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Tabel IV.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin

No	Agama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Islam	77.144	98,59	78.538	98,66	155.682	98,63
2	Kristen	617	0,79	608	0,76	1.225	0,78
3	Katholik	381	0,49	373	0,47	754	0,48
4	Hindu	91	0,12	72	0,09	163	0,10
5	Budha	14	0,02	13	0,02	27	0,02
6	Khonghucu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Kepercayaan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah		78.247	100,00	79.604	100,00	157.851	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Informasi ini diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Bima memeluk agama Islam (98,63 persen), disusul kemudian pemeluk agama Kristen 0,78 persen, Katholik 0,48 persen, Hindu 0,10 persen dan penganut Budha hanya 0,02 persen.

Indikator ini digunakan untuk menentukan kebijakan yang tepat terkait kehidupan beragama dan sarana peribadatan yang dibutuhkan di masing-masing kecamatan. Sekaligus juga dapat melihat sejauh mana penerapan toleransi masing-masing individu di lingkungan masyarakat dalam menghargai keberagaman terutama dalam perbedaan agama yang dianut.

Tabel IV.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Kecamatan

Kecamatan	Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Budha		Khonghucu		Kepercayaan	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rasanae Barat	28.934	18,59	696	56,82	447	59,28	28	17,18	23	85,19	0	0,00	0	0,00
Rasanae Timur	19.170	12,31	11	0,90	3	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Asakota	34.991	22,48	229	18,69	114	15,12	51	31,29	3	11,11	0	0,00	0	0,00
Raba	39.452	25,34	163	13,31	105	13,93	66	40,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mpunda	33.135	21,28	126	10,29	85	11,27	18	11,04	1	3,70	0	0,00	0	0,00
Jumlah	155.682	100,00	1.225	100,00	754	100,00	163	100,00	27	100,00	0	0,00	0	0,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

c. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

1) Angka Perkawinan Kasar

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya seorang perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi di masa datang. Status perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori, antara lain yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati.

Tabel IV.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan

Kecamatan	Belum Kawin				Kawin			
	L	%	P	%	L	%	P	%
Rasanae Barat	7.786	19,96	6.952	19,88	6.498	17,70	6.628	17,66
Rasanae Timur	4.297	11,02	3.956	11,31	4.860	13,24	4.947	13,18
Asakota	8.960	22,97	7.840	22,42	8.297	22,60	8.457	22,53
Raba	9.610	24,64	8.606	24,61	9.386	25,56	9.639	25,68
Mpunda	8.352	21,41	7.615	21,78	7.675	20,90	7.858	20,94
Jumlah	39.005	100,00	34.969	100,00	36.716	100,00	37.529	100,00

Lanjutan Tabel IV.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan

Kecamatan	Cerai Hidup				Cerai Mati			
	L	%	P	%	L	%	P	%
Rasanae Barat	309	24,07	583	24,59	272	21,90	1.100	23,23
Rasanae Timur	140	10,90	240	10,12	188	15,14	556	11,74
Asakota	263	20,48	493	20,79	233	18,76	845	17,85
Raba	308	23,99	580	24,46	340	27,38	1.317	27,81
Mpunda	264	20,56	475	20,03	209	16,83	917	19,37
Jumlah	1.284	100,00	2.371	100,00	1.242	100,00	4.735	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di semua kecamatan persentase penduduk perempuan dengan status kawin lebih tinggi dari pada penduduk laki-laki dengan status kawin. Hal ini berbanding terbalik dengan penduduk status belum kawin, dimana laki-laki yang belum kawin lebih banyak dari pada perempuan yang belum kawin.

Jika dibandingkan dengan keseluruhan penduduk dengan status cerai hidup, hanya separuh penduduk laki-laki yang berstatus cerai hidup apabila dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini menandakan beberapa saat setelah perceraian kebanyakan laki-laki kembali melakukan perkawinan kembali.

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk dalam jangka waktu dan wilayah tertentu juga berguna bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam usaha meningkatkan kualitas keluarga.

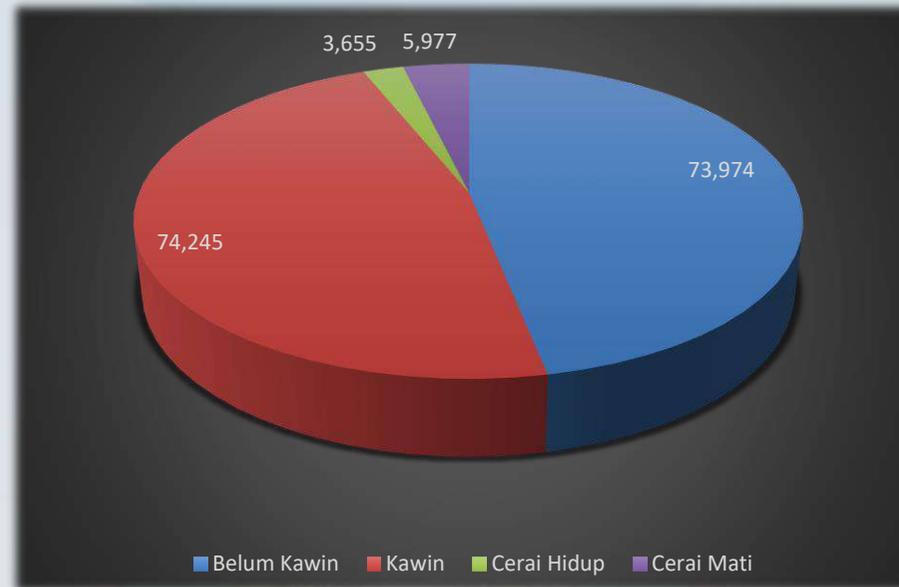
Tabel IV.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum Kawin	39.005	49,85	34.969	43,93	73.974	46,86
2	Kawin	36.716	46,92	37.529	47,14	74.245	47,03
3	Cerai Hidup	1.284	1,64	2.371	2,98	3.655	2,32
4	Cerai Mati	1.242	1,59	4.735	5,95	5.977	3,79
Jumlah		78.247	100,00	79.604	100,00	157.851	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Di Kota Bima, status kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 47,03 % atau 74.245 jiwa dimana komposisi perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yang kedua yaitu kategori belum kawin sebesar 46,86 % atau 73.974

orang dimana proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Untuk status cerai mati persentasenya sebesar 3,79 %. Adapun status perkawinan yang terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 2,32 % atau sebanyak 3.655 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.



Gambar IV.7 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan kasar merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel IV.21 Angka Perkawinan Kasar per Kecamatan

No	Kecamatan		Status Kawin	Jumlah Penduduk			Angka Perkawinan Kasar
	Kode	Nama		Awal Tahun	Akhir Tahun	Pertengahan Tahun	
1	52.72.01	Rasanae Barat	13.126	30.196	30.128	30.162	435,18
2	52.72.02	Rasanae Timur	9.807	18.830	19.184	19.007	515,97
3	52.72.03	Asakota	16.754	34.477	35.388	34.933	479,61
4	52.72.04	Raba	19.025	39.310	39.786	39.548	481,06
5	52.72.05	Mpunda	15.533	32.706	33.365	33.036	470,19
Jumlah			74.245	155.519	157.851	156.685	473,85

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Pernikahan adalah kemitraan atau hubungan yang mengikat yang disahkan oleh hukum antara dua orang dewasa tanpa adanya paksaan. Di Indonesia pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang yang baru, batas minimal kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga batas umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan dipersamakan 19 tahun. Batas usia tersebut, dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, mengurangi resiko perceraian dan mengurangi laju kelahiran serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Angka perkawinan kasar Kota Bima adalah 473,85 artinya dari 1.000 penduduk Kota Bima terdapat 474 orang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk status kawin tanpa memperdulikan urutan perkawinan dan umur pelaku perkawinan tersebut, baik yang usianya sudah pantas maupun yang belum. Jika dilihat dari setiap kecamatan di Kota Bima, Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu 515,97 dibandingkan dengan kecamatan lain. Adapun angka perkawinan kasar terendah berada di Kecamatan Rasanae Barat yaitu dengan 435,18.

2) Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun. Angka perkawinan umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karna dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Sementara penduduk berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Dengan kata lain, angka perkawinan umum merupakan proporsi penduduk berstatus kawin terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun pada periode tertentu. Seperti angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun pembagiannya adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dimana usia tersebut lebih berisiko untuk kawin.

Tabel IV.22 Angka Perkawinan Umum Per Kecamatan

No	Kecamatan		Status Kawin	Jumlah Penduduk Umur >= 15	Angka Perkawinan Umum
	Kode	Nama			
1	52.72.01	Rasanae Barat	13.126	22.599	580,82
2	52.72.02	Rasanae Timur	9.807	14.361	682,89
3	52.72.03	Asakota	16.754	25.868	647,67
4	52.72.04	Raba	19.025	30.114	631,77
5	52.72.05	Mpunda	15.533	24.992	621,52
Jumlah			74.245	117.934	629,55

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Untuk Kota Bima, angka perkawinan umum sebesar 629,55 yang artinya dari 1.000 penduduk terdapat 630 penduduk usia di atas 15 tahun berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan. Adapun angka perkawinan umum tertinggi berada di kecamatan Rasanae Timur dengan 682,89 dan yang terendah berada di kecamatan Rasanae Barat dengan 580,82.

3) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Indikator angka perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja. angka perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka perkawinan spesifik merupakan angka perkawinan berdasarkan umur dan jenis kelamin berfungsi untuk menginformasikan perbandingan perkawinan antar kelompok umur dan antar jenis kelamin. Berdasarkan Tabel IV.23 berikut ini memperlihatkan jumlah penduduk laki-laki usia 15-19 tahun adalah 6.241 jiwa dan jumlah penduduk berstatus kawin untuk kelompok umur yang sama adalah sebesar 53 jiwa, maka angka perkawinan spesifik yang didapat adalah 8,49 yang artinya bahwa dari 1.000 penduduk laki-laki usia 15-19 tahun terdapat 8 orang berstatus kawin.

Adapun angka perkawinan spesifik dari 152 jiwa berjenis kelamin perempuan dari 5.996 jiwa penduduk perempuan usia 15-19 tahun adalah 25,35 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dari 1.000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun terdapat 25 orang berstatus kawin. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cepat menikah dibandingkan laki-laki. Meskipun kecil, angka ini harus menjadi perhatian semua pihak karna seharusnya kelompok usia ini masih berada di bangku sekolah.

Salah satu tujuan diubahnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, adalah untuk menunda usia kawin bagi anak perempuan. Diketuinya angka perkawinan menurut umur dan jenis kelamin dapat memberikan gambaran kepada pemerintah untuk pengembangan program-program yang ditujukan kepada remaja terutama tentang penundaan perkawinan.

Tabel IV.23 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Penduduk Berstatus Kawin			Age Specific Marriage Rate		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	15-19	6.241	5.996	12.237	53	152	205	8,49	25,35	16,75
2	20-24	6.150	6.617	12.767	730	1.532	2.262	118,70	231,52	177,18
3	25-29	6.214	6.237	12.451	2.635	3.754	6.389	424,04	601,89	513,13
4	30-34	6.055	6.284	12.339	4.354	5.157	9.511	719,08	820,66	770,81
5	35-39	6.381	6.398	12.779	5.368	5.496	10.864	841,25	859,02	850,14
6	40-44	5.974	6.420	12.394	5.315	5.443	10.758	889,69	847,82	868,00
7	45-49	5.191	5.611	10.802	4.692	4.709	9.401	903,87	839,24	870,30
8	50-54	4.509	4.630	9.139	4.135	3.742	7.877	917,05	808,21	861,91
9	55-59	3.502	3.922	7.424	3.218	3.032	6.250	918,90	773,07	841,86
10	60-64	2.699	2.858	5.557	2.443	1.957	4.400	905,15	684,74	791,79
11	65-69	1.910	2.166	4.076	1.668	1.282	2.950	873,30	591,87	723,75
12	70-74	1.315	1.453	2.768	1.098	693	1.791	834,98	476,94	647,04
13	>=75	1.389	1.812	3.201	1.007	580	1.587	724,98	320,09	495,78
Jumlah		57.530	60.404	117.934	36.716	37.529	74.245	638,21	621,30	629,55

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

4) Rata-rata Usia Kawin Pertama/*Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)*

Definisi *Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)* adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan serta program lainnya untuk pendewasaan usia perkawinan.

Untuk memperoleh rata-rata usia kawin pertama yang lebih cermat dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata usia kawin dari data tentang proporsi penduduk yang masih lajang menurut umur. Estimasi rata-rata usia kawin dengan cara ini disebut *Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)*. Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan keturunan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia subur dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Status Lajang yakni keadaan dimana seorang laki-laki ataupun perempuan berstatus belum pernah kawin atau belum berumah tangga. Terdapat 14.734 jiwa perempuan yang belum pernah menikah atau berstatus lajang di Kota Bima. Persentase lajang tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun dengan angka 96,75 %, hal itu dipicu karena pada kelompok umur tersebut belum matang untuk melakukan pernikahan dan menjadi kepala keluarga. Pada kelompok umur 45-49 menjadi persentase lajang terendah dengan angka 278 jiwa atau 4,95 %.

Tabel IV.24 Jumlah Perempuan (Usia 15-49 Tahun) menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Status Perkawinan Perempuan Usia 15-45 Tahun				Jumlah Penduduk Perempuan (15-49 Tahun)	Proporsi Perempuan Belum Kawin (%)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (15-49 tahun)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (M UKP) (25-49 Tahun)
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati				
1	15-19	5.801	191	3	1	5.996	96,75	37 tahun	38 tahun
2	20-24	4.908	1.644	60	5	6.617	74,17		
3	25-29	2.178	3.867	173	19	6.237	34,92		
4	30-34	776	5.182	295	31	6.284	12,35		
5	35-39	425	5.486	389	98	6.398	6,64		
6	40-44	368	5.427	467	158	6.420	5,73		
7	45-49	278	4.697	344	292	5.611	4,95		
Jumlah		14.734	26.494	1.731	604	43.563	33,82	37 tahun	38 tahun

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Dari table di atas dapat dihitung angka perkawinan umur pertama/SMAM (*Singulate Mean Age at Marriage*) perempuan di Kota Bima pada tahun 2022 yakni 37, ini berarti bahwa perkawinan pertama rata-rata perempuan di Kota Bima dilakukan pada usia 37 tahun. Angka ini cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk perempuan di Kota Bima telah menunda umur kawin pertama mereka.

5) Angka Perceraian Kasar (*Divorce*)

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin. Bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel IV.25 Angka Perceraian Kasar per Kecamatan

No	Kecamatan		Status Cerai Hidup	Jumlah Penduduk			Angka Perceraian Kasar
	Kode	Nama		Awal Tahun	Akhir Tahun	Tengah Tahun	
1	52.72.01	Rasanae Barat	892	30.196	30.128	30.162	29,57
2	52.72.02	Rasanae Timur	380	18.830	19.184	19.007	19,99
3	52.72.03	Asakota	756	34.477	35.388	34.933	21,64
4	52.72.04	Raba	888	39.310	39.786	39.548	22,45
5	52.72.05	Mpunda	739	32.706	33.365	33.036	22,37
Jumlah			3.655	155.519	157.851	156.685	23,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Secara keseluruhan ada sebanyak 23,33 yang artinya terdapat perceraian sebanyak 23 per seribu penduduk pada tahun 2022 di Kota Bima. Angka perceraian kasar tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan angka 29,57 yang berarti terdapat 29-30 perceraian per seribu penduduk pada tahun 2022.

6) Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu. Angka Perceraian Umum ini merupakan salah satu indikator angka perceraian yang lebih cermat karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang terkena resiko perceraian yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut.

Tabel IV.26 Angka Perceraian Umum per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Angka Perceraian Umum
	Kode	Nama	Status Cerai Hidup	Umur >= 15	
1	52.72.01	Rasanae Barat	892	22.599	39,47
2	52.72.02	Rasanae Timur	380	14.361	26,46
3	52.72.03	Asakota	756	25.868	29,23
4	52.72.04	Raba	888	30.114	29,49
5	52.72.05	Mpunda	739	24.992	29,57
Jumlah			3.655	117.934	30,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah

Informasi data tersebut dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai hidup. Penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan, karena pada umumnya usia tersebut belum termasuk usia perkawinan dan mereka tidak beresiko bercerai.

Angka perceraian umum di Kota Bima sebesar 30,99 artinya dari seribu penduduk terdapat 31 penduduk berstatus cerai hidup pada tahun 2022. Kecamatan Rasanae Barat memiliki angka perceraian tertinggi 39,47 yang berarti terdapat 39 perceraian per seribu penduduk pada tahun 2022. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan yang angka perceraianya terendah yaitu 26,46 yang berarti terdapat 26 status cerai hidup dalam seribu penduduk pada tahun 2022.

Berdasarkan data yang ada salah satu faktor penyebab perceraian yang dicatatkan di Pengadilan Agama Kota Bima adalah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta dikarenakan meninggalkan salah satu pihak. Meskipun kecil, angka perceraian ini menunjukkan kualitas perkawinan individu di Kota Bima, sehingga perlu keikutsertaan semua pihak dalam mewujudkan perkawinan yang berkualitas. Sehingga ketika ada permasalahan dalam rumah tangga pasangan suami istri tidak cepat dalam mengambil keputusan untuk bercerai.

3. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penanganan kemiskinan, dan kesehatan. Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya.

Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu :

- Keluarga Inti (*Nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin;
- Keluarga Luas (*Extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

- Jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga;
- Status hubungan dalam keluarga;
- Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;
- Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin;
- Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin;
- Karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan;
- Karakteristik kepala keluarga menurut status bekerja.

a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga.

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan, dan lain sebagainya.

Tabel IV.27 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Jumlah Keluarga		Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	52.72.01	Rasanae Barat	30.128	19,09	9.790	19,39	3
2	52.72.02	Rasanae Timur	19.184	12,15	6.449	12,77	3
3	52.72.03	Asakota	35.388	22,42	10.922	21,63	3
4	52.72.04	Raba	39.786	25,20	12.990	25,73	3
5	52.72.05	Mpunda	33.365	21,14	10.334	20,47	3
Jumlah			157.851	100,00	50.485	100,00	3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk dari adanya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengikat diri satu sama lain yang dinamakan perkawinan. Keluarga dipimpin oleh kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya tujuan keluarga yakni kesejahteraan keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari sudut pandang banyaknya anggota keluarga.

Dari tabel IV.27 terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Bima sebanyak 3 orang per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kota Bima merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap kecamatan juga terdiri dari 3 orang per keluarga. Jumlah kepala keluarga di Kota Bima sebanyak 50.485 kepala keluarga yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan Raba memiliki jumlah kepala keluarga paling banyak yaitu 12.990 (25,73 %) kemudian disusul oleh kecamatan Asakota sebanyak 10.922 kepala keluarga (21,63 %) dan Kecamatan Mpunda sebanyak 10.334 kepala keluarga (20,47 %), lalu Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 9.790 kepala keluarga (19,39 %). Sedangkan jumlah kepala keluarga terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 6.449 kepala keluarga (12,77 %).

b. Status Hubungan dalam Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*), dan pola pengasuhan anak. Anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua, dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga atau family lainnya.

Tabel IV.28 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dalam Keluarga

No	SHDK	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Kepala Keluarga	40.185	51,357	10.300	12,939	50.485	31,983
2	Suami	3	0,004	0	0,000	3	0,002
3	Istri	0	0,000	34.795	43,710	34.795	22,043
4	Anak	36.871	47,121	33.014	41,473	69.885	44,273
5	Menantu	0	0,000	1	0,001	1	0,001
6	Cucu	497	0,635	444	0,558	941	0,596
7	Orang Tua	19	0,024	138	0,173	157	0,099
8	Mertua	11	0,014	89	0,112	100	0,063
9	Family Lain	646	0,826	792	0,995	1.438	0,911
10	Pembantu	0	0,000	3	0,004	3	0,002
11	Lainnya	15	0,019	28	0,035	43	0,027
Jumlah		78.247	100,000	79.604	100,000	157.851	100,000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Tabel IV.28 di atas menunjukkan hubungan antar anggota keluarga dengan kepala keluarga baik mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah. Dapat dilihat bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri, yakni 40.185 kepala keluarga, 34.795 diantaranya memiliki istri. Perempuan yang menjadi kepala keluarga angkanya cukup tinggi yakni 10.300 jiwa, salah satu penyebabnya adalah perceraian dan kematian kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus sendiri baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup, cerai mati, maupun nikah dibawah tangan. Faktor mutasi pun ikut mempengaruhi angka tersebut, karena fakta di lapangan bahwa banyak kepala keluarga laki-laki yang harus merantau atau tidak tinggal bersama dalam waktu yang lama yang mengharuskan mereka terdata dalam kartu keluarga berbeda. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki. Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, dan famili lain menunjukkan proporsi yang rendah. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (extended family) di Kota Bima jumlahnya tidak besar.

Status hubungan dalam keluarga dipergunakan untuk mengetahui posisi anggota keluarga dengan kepala keluarga. Dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dalam keluarga, status terbesar adalah anak yaitu sebanyak 69.885 jiwa atau sebesar 44,273 %, dengan jumlah anak laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 36.871 jiwa dibandingkan dengan jumlah anak perempuan yaitu sebesar 33.014 jiwa.

c. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Kecamatan

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan berstatus menikah maupun tidak yang mempunyai peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui karena berkaitan

dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

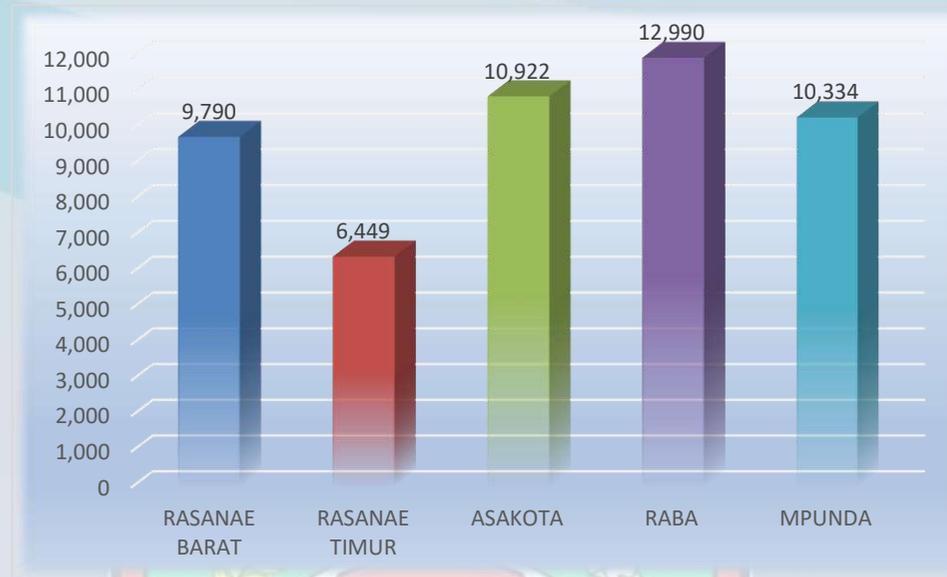
Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Dari Tabel IV.29 berikut ini dapat dilihat jumlah dan proporsi kepala keluarga Kota Bima tahun 2022 menurut kecamatan dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kota Bima adalah laki-laki yaitu 40.185 orang (80,36%).

Tabel IV.29 Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan

No	Kecamatan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
1	52.72.01	Rasanae Barat	7.364	18,33	2.426	23,55	9.790	19,39
2	52.72.02	Rasanae Timur	5.274	13,12	1.175	11,41	6.449	12,77
3	52.72.03	Asakota	8.955	22,28	1.967	19,10	10.922	21,63
4	52.72.04	Raba	10.270	25,56	2.720	26,41	12.990	25,73
5	52.72.05	Mpunda	8.322	20,71	2.012	19,53	10.334	20,47
Jumlah			40.185	79,60	10.300	20,40	50.485	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.



Gambar IV.8 Grafik Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan

Tabel IV.29 juga menunjukkan banyaknya kepala keluarga yang ada di lima wilayah kecamatan di Kota Bima. Ada sebanyak 50.485 kepala keluarga yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Bima. Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga tertinggi berada di Kecamatan Raba yaitu 12.990 kepala keluarga, sedangkan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terendah berada di Kecamatan Rasanae Timur dengan 6.449 kepala keluarga.

Sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 10.300 orang (20,40 %) atau dengan perbandingannya sekitar 4 : 1, yang artinya dari 4 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan. Tabel IV.29 juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai, atau sebab-sebab yang lain.

Tabel IV.30 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Barat

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.01		Rasanae Barat	7.364	75,22	2.426	24,78	9.790	100,00
1	1001	Paruga	1.302	17,68	448	18,47	1.750	17,88
2	1002	Nae	1.001	13,59	352	14,51	1.353	13,82
3	1003	Sarae	1.214	16,49	392	16,16	1.606	16,40
4	1004	Tanjung	1.525	20,71	496	20,45	2.021	20,64
5	1013	Pane	640	8,69	273	11,25	913	9,33
6	1014	Dara	1.682	22,84	465	19,17	2.147	21,93

Tabel IV.31 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Timur

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.02		Rasanae Timur	5.274	81,78	1.175	18,22	6.449	100,00
1	1004	Kumbe	1.037	19,66	286	24,34	1.323	20,51
2	1008	Lampe	428	8,12	84	7,15	512	7,94
3	1009	Dodu	889	16,86	209	17,79	1.098	17,03
4	1011	Nungga	669	12,68	119	10,13	788	12,22
5	1018	Kodo	584	11,07	149	12,68	733	11,37
6	1019	Oi Fo'o	590	11,19	93	7,91	683	10,59
7	1020	Lelamase	582	11,04	115	9,79	697	10,81
8	1021	Oimbo	495	9,39	120	10,21	615	9,54

Tabel IV.32 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Asakota

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.03		Asakota	8.955	81,99	1.967	18,01	10.922	100,00
1	1001	Melayu	1.326	14,81	436	22,17	1.762	16,13
2	1002	Jatiwangi	1.893	21,14	394	20,03	2.287	20,94
3	1003	Jatibaru	1.575	17,59	365	18,56	1.940	17,76
4	1004	Kolo	1.496	16,71	307	15,61	1.803	16,51
5	1005	Jatibaru Timur	1.137	12,70	227	11,54	1.364	12,49
6	1006	Ule	1.528	17,06	238	12,10	1.766	16,17

Tabel IV.33 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Raba

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.04		Raba	10.270	79,06	2.720	20,94	12.990	100,00
1	1001	Penaraga	1.233	12,01	380	13,97	1.613	12,42
2	1002	Rontu	864	8,41	225	8,27	1.089	8,38
3	1003	Penanae	1.049	10,21	273	10,04	1.322	10,18
4	1004	Kendo	437	4,26	83	3,05	520	4,00
5	1005	Ntobo	1.078	10,50	212	7,79	1.290	9,93
6	1006	Nitu	435	4,24	65	2,39	500	3,85
7	1007	Rabangodu Selatan	1.005	9,79	260	9,56	1.265	9,74
8	1008	Rabadompu Timur	1.003	9,77	283	10,40	1.286	9,90
9	1009	Rite	615	5,99	136	5,00	751	5,78
10	1010	Rabadompu Barat	1.354	13,18	435	15,99	1.789	13,77
11	1011	Rabangodu Utara	1.197	11,66	368	13,53	1.565	12,05

Tabel IV.34 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Mpunda

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
	52.72.05	Mpunda	8.322	80,53	2.012	19,47	10.334	100,00
1	1001	Monggonao	1.018	12,23	272	13,52	1.290	12,48
2	1002	Sadia	900	10,81	190	9,44	1.090	10,55
3	1003	Santi	663	7,97	156	7,75	819	7,93
4	1004	Sambinae	936	11,25	167	8,30	1.103	10,67
5	1005	Penatoi	1.145	13,76	323	16,05	1.468	14,21
6	1006	Lewirato	505	6,07	122	6,06	627	6,07
7	1007	Mande	689	8,28	206	10,24	895	8,66
8	1008	Panggi	696	8,36	152	7,55	848	8,21
9	1009	Manggemaci	1.017	12,22	289	14,36	1.306	12,64
10	1010	Matakando	753	9,05	135	6,71	888	8,59

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Banyaknya jumlah kepala keluarga di setiap kelurahan ditunjukkan pada informasi data jumlah kepala keluarga per kelurahan pada tabel IV.30-34. Ada 41 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan dalam wilayah Kota Bima. Jumlah kepala keluarga di Kota Bima ada sebanyak 50.485 KK dengan jumlah kepala keluarga laki-laki ada 40.185 KK dan kepala keluarga perempuan ada 10.300 KK. Adapun jumlah kepala keluarga terbesar berada di Kelurahan Jatiwangi yang terletak di Kecamatan Asakota sebanyak 2.287 KK atau ada 4,53 % dari jumlah KK seluruh Kota Bima, sedangkan jumlah kepala keluarga terkecil berada di Kelurahan Nitu yang terletak di Kecamatan Raba dengan angka 500 KK atau 0,99 % dari jumlah KK seluruh Kota Bima.

d. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Informasi data jumlah kepala keluarga berdasarkan kelompok umur dapat digunakan untuk mengetahui gambaran keadaan sosial dan ekonomi keluarga yang dikepalai oleh laki-laki ataupun perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga tertinggi berada pada umur 40-44 tahun yaitu sebanyak 6.739 KK atau ada 13,349 %, yang mana jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tertinggi berada pada umur 40-44 tahun dan 55-59 tahun dengan angka yang sama sebesar 1.047 jiwa (10,165 %). Hal ini menunjukkan bahwa mereka menjadi kepala keluarga karena telah ditinggal suaminya sebab kematian atau hal lainnya. Kepala keluarga terendah berada pada umur 10-14 dengan angka 2 atau ada 0,004 % serta sebanyak 2.591 KK atau 5,132 % kepala keluarga yang berumur ≥ 75 , hal itu dapat menunjukkan bahwa angka harapan hidup kepala keluarga di Kota Bima tergolong tinggi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan hidup perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki, dimana pada kelompok umur 55-59 tahun jumlah kepala keluarga perempuan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kepala keluarga laki-laki justru mengalami penurunan. Untuk itu perlu dipersiapkan perempuan-perempuan tangguh dengan memiliki keterampilan-ketrampilan yang dapat menunjang kehidupannya dari sisi sosial, ekonomi, dan psikologi, apabila kelak sudah tidak memiliki suami lagi, baik yang disebabkan karena cerai hidup maupun cerai mati.

Dari table IV.35 berikut ini juga dapat dilihat kepala keluarga pada kelompok umur 10-14 tahun dan 15-19 tahun (usia mengenyam pendidikan) tentu perlu menjadi perhatian seluruh pihak, karena seharusnya pada usia ini berada pada bangku sekolah.

Tabel IV.35 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-4	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2	5-9	0	0,000	0	0,000	0	0,000
3	10-14	1	0,002	1	0,010	2	0,004
4	15-19	71	0,177	21	0,204	92	0,182
5	20-24	870	2,165	207	2,010	1.077	2,133
6	25-29	2.927	7,284	401	3,893	3.328	6,592
7	30-34	4.696	11,686	621	6,029	5.317	10,532
8	35-39	5.760	14,334	847	8,223	6.607	13,087
9	40-44	5.692	14,164	1.047	10,165	6.739	13,349
10	45-49	5.029	12,515	983	9,544	6.012	11,908
11	50-54	4.429	11,022	1.017	9,874	5.446	10,787
12	55-59	3.472	8,640	1.047	10,165	4.519	8,951
13	60-64	2.682	6,674	1.028	9,981	3.710	7,349
14	65-69	1.900	4,728	999	9,699	2.899	5,742
15	70-74	1.302	3,240	844	8,194	2.146	4,251
16	>=75	1.354	3,369	1.237	12,010	2.591	5,132
Jumlah		40.185	100,000	10.300	100,000	50.485	100,000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

e. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin

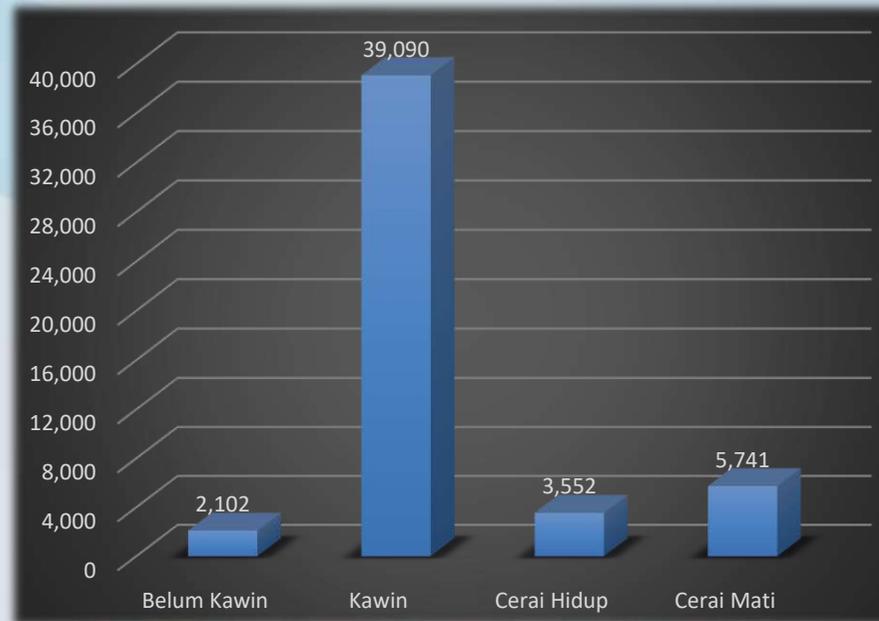
Kepala keluarga merupakan seseorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Informasi kepala keluarga berdasarkan status perkawinan, dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan dalam bidang sosial yang hubungannya dengan status perkawinan dan jenis kelamin penduduk.

Pada umumnya kepala keluarga di Kota Bima sebanyak 39.090 (77,43 %) berstatus kawin. Di samping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 2.102 jiwa setara 4,16 persen.

Tabel IV.36 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum Kawin	1.094	2,72	1.008	9,79	2.102	4,16
2	Kawin	36.628	91,15	2.462	23,90	39.090	77,43
3	Cerai Hidup	1.248	3,11	2.304	22,37	3.552	7,04
4	Cerai Mati	1.215	3,02	4.526	43,94	5.741	11,37
Jumlah		40.185	100,00	10.300	100,00	50.485	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.



Gambar IV.9 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan

Berdasarkan Tabel IV.36 ada sebanyak 50.485 kepala keluarga di Kota Bima dengan jumlah kepala keluarga laki-laki ada 40.185 KK dan ada 10.300 kepala keluarga perempuan. Hal tersebut menunjukkan kepala keluarga yang dikepalai oleh laki-laki lebih banyak dibandingkan kepala keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

Hal yang menarik adalah kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin, hal ini kemungkinan juga dikarenakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Selain itu juga disebabkan laki-laki yang berpoligami secara sah. Dari tabel di atas dapat dilihat, persentase perempuan yang menjadi kepala keluarga dan berstatus kawin adalah sebanyak 2.462 atau 23,90 persen dari total kepala keluarga berjenis kelamin perempuan dengan status kawin .

Perbedaan mencolok terlihat pada proporsi jenis kelamin perbandingan jumlah kepala keluarga dengan status cerai mati yang didominasi perempuan sebanyak 1.215 KK atau ada 3,02 % dari total kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki dan 4.526 KK perempuan atau 43,94 % dari total kepala keluarga berjenis kelamin perempuan. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa perempuan bisa bertahan menjadi kepala keluarga setelah ditinggal mati suami.

Adapun 2.102 kepala keluarga berstatus belum kawin biasanya merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian. Namun hal ini perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau hidup sendirian.

f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Status Perkawinan

Dari tabel IV.37 berikut ini terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga di Kota Bima berada pada kelompok produktif. Oleh sebab itu kiranya perlu dirancang program yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana.

Sedangkan kepala keluarga yang berstatus belum kawin terbesar berada pada kelompok umur 25-29 tahun, kepala keluarga yang berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun.

Tabel IV.37 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

No	Kelompok Umur	Status Perkawinan								Jumlah	
		Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	0-4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	5-9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	10-14	2	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
4	15-19	32	1,52	58	0,15	1	0,03	1	0,02	92	0,18
5	20-24	234	11,13	782	2,00	57	1,60	4	0,07	1.077	2,13
6	25-29	307	14,61	2.768	7,08	231	6,50	22	0,38	3.328	6,59
7	30-34	272	12,94	4.577	11,71	433	12,19	35	0,61	5.317	10,53
8	35-39	235	11,18	5.661	14,48	585	16,47	126	2,19	6.607	13,09
9	40-44	216	10,28	5.662	14,48	676	19,03	185	3,22	6.739	13,35
10	45-49	195	9,28	4.960	12,69	532	14,98	325	5,66	6.012	11,91
11	50-54	174	8,28	4.378	11,20	426	11,99	468	8,15	5.446	10,79
12	55-59	172	8,18	3.445	8,81	240	6,76	662	11,53	4.519	8,95
13	60-64	89	4,23	2.608	6,67	162	4,56	851	14,82	3.710	7,35
14	65-69	74	3,52	1.821	4,66	98	2,76	906	15,78	2.899	5,74
15	70-74	43	2,05	1.214	3,11	54	1,52	835	14,54	2.146	4,25
16	>=75	57	2,71	1.156	2,96	57	1,60	1.321	23,01	2.591	5,13
Jumlah		2.102	100,00	39.090	100,00	3.552	100,00	5.741	100,00	50.485	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

g. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga serta besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Dari tabel IV.38 berikut dapat dilihat persentase terbesar pekerjaan kepala keluarga yaitu wiraswasta yaitu 11.876 KK dan petani/pekebun sebesar 7.059 KK dan PNS sejumlah 4.339 KK. Untuk kelompok perempuan proporsi terbesar adalah mengurus rumah tangga yakni 7.021 KK. Data tersebut mengindikasikan bahwa peran usaha swasta dan pertanian/perkebunan di Kota Bima sangat berkontribusi pada pembentukan pendapatan perkapita penduduk Kota Bima dengan demikian sektor industri kecil dan perdagangan masih sebagai lahan penyerap tenaga kerja sebagian besar penduduk Kota Bima.

Tabel IV.38 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	2.835	7,055	741	7,194	3.576	7,083
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	0,010	7.017	68,126	7.021	13,907
3	PELAJAR/MAHASISWA	325	0,809	165	1,602	490	0,971
4	PENSIUNAN	1.169	2,909	219	2,126	1.388	2,749
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	3.850	9,581	489	4,748	4.339	8,595
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	279	0,694	0	0,000	279	0,553
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	656	1,632	1	0,010	657	1,301
8	PERDAGANGAN	204	0,508	78	0,757	282	0,559
9	PETANI/PEKEBUN	7.003	17,427	56	0,544	7.059	13,982

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
10	PETERNAK	29	0,072	0	0,000	29	0,057
11	NELAYAN/PERIKANAN	1.027	2,556	2	0,019	1.029	2,038
12	INDUSTRI	6	0,015	1	0,010	7	0,014
13	KONSTRUKSI	13	0,032	1	0,010	14	0,028
14	TRANSPORTASI	303	0,754	1	0,010	304	0,602
15	KARYAWAN SWASTA	3.056	7,605	178	1,728	3.234	6,406
16	KARYAWAN BUMN	395	0,983	14	0,136	409	0,810
17	KARYAWAN BUMD	72	0,179	2	0,019	74	0,147
18	KARYAWAN HONORER	2.070	5,151	270	2,621	2.340	4,635
19	BURUH HARIAN LEPAS	1.187	2,954	6	0,058	1.193	2,363
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.324	3,295	12	0,117	1.336	2,646
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	59	0,147	0	0,000	59	0,117
22	BURUH PETERNAKAN	13	0,032	0	0,000	13	0,026
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	0,002	31	0,301	32	0,063
24	TUKANG CUKUR	8	0,020	0	0,000	8	0,016
25	TUKANG LISTRIK	15	0,037	0	0,000	15	0,030
26	TUKANG BATU	530	1,319	0	0,000	530	1,050
27	TUKANG KAYU	470	1,170	0	0,000	470	0,931
28	TUKANG SOL SEPATU	4	0,010	1	0,010	5	0,010
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	36	0,090	0	0,000	36	0,071
30	TUKANG JAHIT	38	0,095	16	0,155	54	0,107
31	TUKANG GIGI	1	0,002	0	0,000	1	0,002
32	PENATA RIAS	2	0,005	1	0,010	3	0,006
33	PENATA BUSANA	0	0,000	1	0,010	1	0,002
34	PENATA RAMBUT	2	0,005	2	0,019	4	0,008

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
35	MEKANIK	103	0,256	0	0,000	103	0,204
36	SENIMAN	9	0,022	1	0,010	10	0,020
37	TABIB	2	0,005	0	0,000	2	0,004
38	PARAJI	1	0,002	0	0,000	1	0,002
39	PERANCANG BUSANA	0	0,000	1	0,010	1	0,002
40	PENTERJEMAH	1	0,002	0	0,000	1	0,002
41	IMAM MASJID	6	0,015	0	0,000	6	0,012
42	PENDETA	7	0,017	0	0,000	7	0,014
43	PASTOR	1	0,002	0	0,000	1	0,002
44	WARTAWAN	44	0,109	0	0,000	44	0,087
45	USTADZ/MUBALIGH	4	0,010	1	0,010	5	0,010
46	JURU MASAK	0	0,000	0	0,000	0	0,000
47	PROMOTOR ACARA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
48	ANGGOTA DPR RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
49	ANGGOTA DPD RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
50	ANGGOTA BPK	0	0,000	0	0,000	0	0,000
51	PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
52	WAKIL PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
55	DUTA BESAR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
56	GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
57	WAKIL GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
58	BUPATI	0	0,000	1	0,010	1	0,002
59	WAKIL BUPATI	0	0,000	0	0,000	0	0,000

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
60	WALIKOTA	1	0,002	0	0,000	1	0,002
61	WAKIL WALIKOTA	1	0,002	0	0,000	1	0,002
62	ANGGOTA DPRD PROP.	3	0,007	0	0,000	3	0,006
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	20	0,050	1	0,010	21	0,042
64	DOSEN	162	0,403	6	0,058	168	0,333
65	GURU	535	1,331	136	1,320	671	1,329
66	PILOT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
67	PENGACARA	28	0,070	1	0,010	29	0,057
68	NOTARIS	7	0,017	0	0,000	7	0,014
69	ARSITEK	1	0,002	0	0,000	1	0,002
70	AKUNTAN	1	0,002	0	0,000	1	0,002
71	KONSULTAN	11	0,027	0	0,000	11	0,022
72	DOKTER	39	0,097	8	0,078	47	0,093
73	BIDAN	0	0,000	17	0,165	17	0,034
74	PERAWAT	50	0,124	10	0,097	60	0,119
75	APOTEKER	6	0,015	0	0,000	6	0,012
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0,000	0	0,000	0	0,000
77	PENYIAR TELEVISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
78	PENYIAR RADIO	1	0,002	0	0,000	1	0,002
79	PELAUT	74	0,184	0	0,000	74	0,147
80	PENELITI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
81	SOPIR	655	1,630	0	0,000	655	1,297
82	PIALANG	1	0,002	0	0,000	1	0,002
83	PARANORMAL	0	0,000	0	0,000	0	0,000
84	PEDAGANG	234	0,582	119	1,155	353	0,699

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
85	PERANGKAT DESA	5	0,012	0	0,000	5	0,010
86	KEPALA DESA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	0,000	2	0,019	2	0,004
88	WIRASWASTA	11.185	27,834	691	6,709	11.876	23,524
89	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	1	0,002	0	0,000	1	0,002
90	ARTIS	0	0,000	0	0,000	0	0,000
91	ATLIT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
92	CHEFF	0	0,000	0	0,000	0	0,000
93	MANAJER	0	0,000	0	0,000	0	0,000
94	TENAGA TATA USAHA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
95	OPERATOR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
97	TEKNISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
98	ASISTEN AHLI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
99	PEKERJAAN LAINNYA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Jumlah		40.185	100,000	10.300	100,000	50.485	100,000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis pekerjaan digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang bekerja di sektor pekerjaan tertentu yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai. Dapat diindikasikan kepala keluarga yang tidak bekerja, biasanya ini dikarenakan kepala keluarga yang berusia lanjut dan tidak kuat bekerja.

Selain Kepala Keluarga yang tidak bekerja, juga ditemukan kepala keluarga yang pekerjaannya pelajar/mahasiswa. Hal ini dikarenakan perkawinan di usia sekolah, dan tidak melakukan pemutakhiran Kartu Keluarga setelah menikah. Selain itu juga disebabkan oleh kepala keluarga pindah atau meninggal. Hal ini terjadi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan data yang dilaporkan oleh penduduk.

h. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga serta semakin tinggi juga tingkat pendidikan anggota keluarganya terutama anak-anaknya kelak.

Karena Kepala Keluarga adalah contoh dan panutan bagi anak-anaknya. Jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tingkat pendidikan seorang kepala keluarga mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki seorang kepala keluarga bisa menjadi salah satu faktor kepala keluarga untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi keperluan hidup keluarganya. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Berdasarkan data di atas kepala keluarga didominasi oleh tamatan SLTA/Sederajat yakni 22.372 KK atau 44,31 %. Angka tersebut terdiri atas laki-laki dengan angka 18.617 (46,33 %) yang lebih banyak dibanding perempuan dengan angka 3.755 (36,46 %). Tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga yang rendah mengindikasikan pendapatan yang juga rendah, sehingga mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

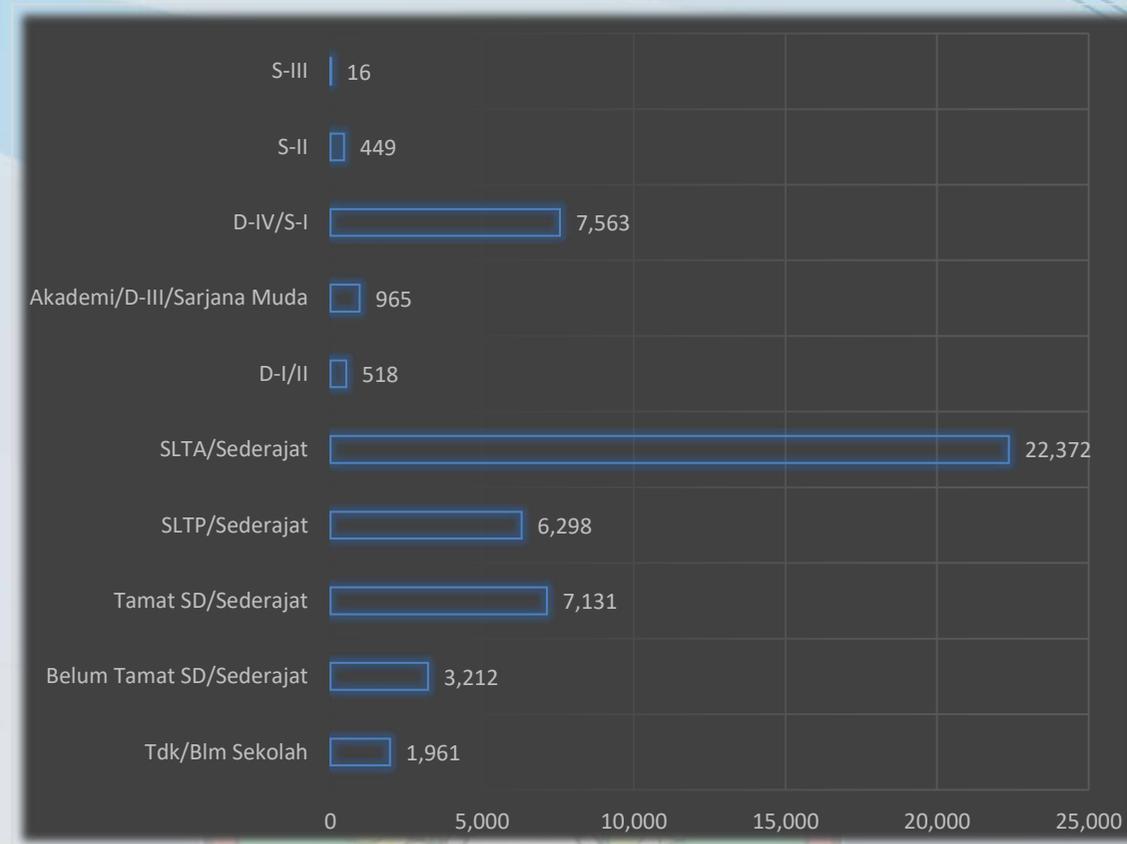
Dari tabel IV.39, juga terlihat bahwa untuk kepala keluarga tamat SD/Sederajat sebesar 14,12 persen, tamat SLTP/ sederajat 12,47

persen. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 2,94 persen dan S1/S2/S3 Sebesar 15,90 persen. Sangat disayangkan masih adanya kepala keluarga yang tidak sekolah dan belum tamat SD yang persentasenya 10,24 persen. Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, kebanyakan kepala keluarga perempuan berpendidikan rendah yaitu belum tamat SD dan tamat SD dengan angka 30,46 persen dari keseluruhan penduduk perempuan dengan status kepala keluarga. Proporsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki yang berpendidikan rendah yakni hanya 17,93 persen.

Tabel IV.39 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	1.177	2,93	784	7,61	1.961	3,88
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2.052	5,11	1.160	11,26	3.212	6,36
3	Tamat SD/Sederajat	5.153	12,82	1.978	19,20	7.131	14,12
4	SLTP/Sederajat	4.836	12,03	1.462	14,19	6.298	12,47
5	SLTA/Sederajat	18.617	46,33	3.755	36,46	22.372	44,31
6	Diploma I/II	371	0,92	147	1,43	518	1,03
7	Akademi/Diploma III	771	1,92	194	1,88	965	1,91
8	Siploma IV/Strata I	6.766	16,84	797	7,74	7.563	14,98
9	Strata II	426	1,06	23	0,22	449	0,89
10	Strata III	16	0,04	0	0,00	16	0,03
Jumlah		40.185	100,00	10.300	100,00	50.485	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah



Gambar IV.10 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

4. Jumlah Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk melihat kualitas penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar.

Tabel IV.40 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	21.315	27,24	20.368	25,59	41.683	26,41
2	Belum Tamat SD/Sederajat	9.321	11,91	9.675	12,15	18.996	12,03
3	Tamat SD/Sederajat	7.382	9,43	8.460	10,63	15.842	10,04
4	SLTP/Sederajat	7.578	9,68	8.861	11,13	16.439	10,41
5	SLTA/Sederajat	23.701	30,29	22.391	28,13	46.092	29,20
6	Diploma I/II	384	0,49	773	0,97	1.157	0,73
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	826	1,06	1.574	1,98	2.400	1,52
8	Diploma IV/Strata I	7.269	9,29	7.253	9,11	14.522	9,20
9	Strata II	455	0,58	249	0,31	704	0,45
10	Strata III	16	0,02	0	0,00	16	0,01
Jumlah		78.247	100,00	79.604	100,00	157.851	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Pada Tabel IV.40 dapat diketahui bahwa jumlah tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kota Bima adalah pada jenjang SLTA/Sederajat yaitu 46.092 jiwa dimana penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah permintaan tenaga kerja dengan kriteria minimal pendidikan SLTA/Sederajat menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut sehingga jumlah penduduk pada tingkat pendidikan SLTA/Sederajat tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, kemudian disusul SLTP/Sederajat dengan 16.439 jiwa dengan jumlah laki-laki 7.578 jiwa dan perempuan 8.861 jiwa. Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki.

Sementara level pendidikan tinggi, mulai dari jenjang Diploma I sampai dengan jenjang Strata I, lebih banyak penduduk perempuan yang menamatkan pendidikannya dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan

Diploma I sampai dengan strata I adalah 9.600 orang, sementara untuk pendidikan laki-laki hanya 8.479 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Kota Bima. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan.

Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan. Yang tidak kalah penting adalah dalam upaya peningkatan peranan perempuan sebagai guru bagi anak-anaknya, baik di rumah tangga maupun di lingkungan sosial. Adapun jumlah penduduk yang belum/tidak sekolah menunjukkan angka yang cukup besar yakni 41.683 jiwa, sehingga perlu dianalisa seberapa besar porsi usia wajib belajar didalamnya.

Dari Tabel IV.41 dapat dilihat jumlah penduduk Kota Bima usia 7-15 tahun yang tidak/belum sekolah cukup banyak yakni 18.915 orang. Untuk persentase penduduk usia 7 tahun yang tidak sekolah/Belum sekolah sebesar 14,96 persen dari total jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah. Lebih banyak penduduk laki-laki yang tidak bersekolah dibandingkan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk wajib belajar yang tidak tamat SD cukup tinggi sebesar 6.792 orang (4,30 persen) dari total jumlah penduduk Kota Bima.

Angka 6.792 orang ini merupakan angka kumulatif dari pencatatan yang dilakukan petugas pelayanan terhadap penduduk yang mengurus Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Pada usia pendidikan dasar 14 dan 15 cukup banyak penduduk Kota Bima yang tidak menamatkan pendidikan dasar setingkat SD. Tentu saja ini menuntut perhatian dari Pemerintah Kota Bima untuk merangkul anak usia ini untuk tetap dan mau melanjutkan pendidikan, apakah melalui paket belajar atau melalui program lain yang mendukung upaya peningkatan pendidikan dasar.

Tabel IV.41 Jumlah Penduduk Wajib Belajar yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD

Usia	Tidak/Belum Sekolah				Tidak Tamat SD			
	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%
7	1.431	1.398	2.829	14,96	30	44	74	1,09
8	1.484	1.324	2.808	14,85	89	77	166	2,44
9	1.331	1.310	2.641	13,96	182	152	334	4,92
10	1.243	1.183	2.426	12,83	315	331	646	9,51
11	1.136	1.100	2.236	11,82	465	370	835	12,29
12	1.045	854	1.899	10,04	503	469	972	14,31
13	762	766	1.528	8,08	572	573	1.145	16,86
14	716	629	1.345	7,11	671	628	1.299	19,13
15	644	559	1.203	6,36	692	629	1.321	19,45
Jumlah	9.792	9.123	18.915	100,00	3.519	3.273	6.792	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

5. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian

a. Angka Kelahiran Kasar/*Crude Birth Rate (CBR)*

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran dimasa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran dimasa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.

Tabel IV.42 Jumlah Kelahiran Hidup per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Rasanae Barat	350	21,45	313	21,89	663	21,65
2	Rasanae Timur	180	11,03	161	11,26	341	11,14
3	Asakota	329	20,16	285	19,93	614	20,05
4	Raba	378	23,16	299	20,91	677	22,11
5	Mpunda	395	24,20	372	26,01	767	25,05
	Jumlah	1.632	100,00	1.430	100,00	3.062	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2022

Dari Tabel IV.42 dapat diketahui bahwa jumlah kelahiran di Kota Bima tahun 2022 adalah sebanyak 3.062 kelahiran hidup, dengan kelahiran hidup tertinggi berada di Kecamatan Mpunda yaitu 767 terdiri dari laki-laki 395 anak dan perempuan 372 anak atau sebesar 25,05 % disusul Kecamatan Raba sebanyak 677 kelahiran hidup atau 22,11 %. Adapun kecamatan yang memiliki angka kelahiran hidup terendah adalah Kecamatan Rasanae Timur dengan angka 341 kelahiran hidup atau 11,14 %.

Bila dilihat dari proporsi tersebut jumlah kelahiran hidup yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak bila dibandingkan kelahiran perempuan. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya. Adapun angka kelahiran kasar (CBR) ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Tabel IV.43 Angka Kelahiran Kasar per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Penduduk			Angka Kelahiran Kasar
	Kode	Nama		Awal Tahun	Tengah Tahun	Akhir Tahun	
1	52.72.01	Rasanae Barat	663	30.196	30.162	30.128	21,98
2	52.72.02	Rasanae Timur	341	18.830	19.007	19.184	17,94
3	52.72.03	Asakota	614	34.477	34.933	35.388	17,58
4	52.72.04	Raba	677	39.310	39.548	39.786	17,12
5	52.72.05	Mpunda	767	32.706	33.036	33.365	23,22
Jumlah			3.062	155.519	156.685	157.851	19,54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Pada Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Angka kelahiran kasar di Kota Bima ada 19,54 artinya terdapat 19-20 kelahiran per 1.000 penduduk pada tahun 2022. Angka kelahiran kasar tertinggi terdapat di Kecamatan Mpunda dengan angka 23,22 yang artinya bahwa terdapat 23-24 kelahiran per 1.000 penduduk dan pada Kecamatan Raba merupakan angka kelahiran kasar terendah sebanyak 17,12 kelahiran artinya 17-18 kelahiran per 1.000 penduduk.

b. Angka Kelahiran Menurut umur (*Age Spesific Fertility Rate /ASFR*)

Tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda, sehingga tingkat kelahiran yang terjadi diantara penduduk perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun sangat berbeda dengan penduduk perempuan pada kelompok umur 35-39 tahun. Terutama dengan tingkat kelahiran yang terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun yang patut menjadi perhatian pemerintah Kota Bima. Angka kelahiran ini sudah memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan dari setiap kelompok umur yang berbeda. Sehingga pengetahuan tentang ASFR akan berguna dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak serta perencanaan pelaksanaan program keluarga berencana (KB).



Tabel IV.44 Jumlah Perempuan Remaja (Usia 15-19 Tahun) yang Sudah Kawin dan Melahirkan Tahun 2022

No	Kecamatan	Status Perkawinan Perempuan Remaja (Usia 15-19 Tahun)		Jumlah Penduduk Perempuan Remaja (15-19 Tahun)	Jumlah Perempuan Remaja (15-19 Tahun) yang Sudah Melahirkan	Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19) dalam %
		Belum Kawin	Kawin			
1	Rasanae Barat	1.125	24	1.149	0	0,00
2	Rasanae Timur	731	68	799	0	0,00
3	Asakota	1.394	59	1.453	0	0,00
4	Raba	1.437	71	1.508	0	0,00
5	Mpunda	1.281	29	1.310	0	0,00
Jumlah		5.968	251	6.219	0	0,00

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2022



BAB V

KUALITAS DAN MOBILITAS PENDUDUK

Tingkat kualitas penduduk merupakan tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kualitas penduduk tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu daerah. Jika kuantitas membicarakan tentang angka-angka yang berhubungan dengan jumlah penduduk, maka pada pembahasan kualitas ini kita akan berbicara tentang nilai atau mutu yang dimiliki penduduk. Kualitas penduduk tersebut sangat mempengaruhi terhadap tingkat kemajuan suatu daerah. Hal ini terkait dengan kemampuan penduduk dalam mengolah dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran warganya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk suatu daerah antara lain:

1. Tingkat kesehatan penduduk

Kesehatan merupakan hal yang utama dan berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa kesehatan, manusia tidak akan dapat melaksanakan aktivitas kehidupan apapun. Pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh kesehatannya, apalagi bila sejak kecil kesehatannya terganggu maka pertumbuhan psikologi/mental dan fisiknya akan terganggu juga, serta kinerja dan produktivitas penduduk akan berpengaruh.

2. Tingkat pendidikan penduduk

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang, yang menjadi modal mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kemajuan. Kemajuan suatu negara dan wilayah tergantung dengan kualitas pendidikan dan sumber dayanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan berarti semakin tinggi kualitas penduduk, sehingga akan meningkatkan kemampuan penduduk dalam usaha meningkatkan taraf kesejahteraan.

3. Tingkat kesejahteraan penduduk

Kesejahteraan penduduk ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Hal tersebut terkait dengan pendapatan yang diperoleh penduduk dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi pendapatannya maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraaannya. Tingkat kesejahteraan penduduk ini juga sangat berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.

A. Tingkat kesehatan penduduk

Kesehatan penduduk merupakan salah satu hal penting dalam menilai kualitas penduduk. Bila kesehatan tidak diperhatikan maka kualitas penduduk juga akan turut menurun. Hal tersebut dapat dilihat indikatornya dari aspek kelahiran dan kematian. Aspek kelahiran dapat dilihat dari data tentang angka kelahiran menurut umur, angka kelahiran total, rasio anak dan perempuan. Sedang aspek kematian dilihat dari data angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian post neonatal, angka kematian anak, angka kematian balita, dan angka kematian ibu. Selain itu, jaminan dan program kesehatan penduduk Kota Bima harus diperhatikan sehingga produktivitas dan kinerja penduduk tetap terjaga.

1. Aspek Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Jumlah kelahiran di Kota Bima pada tahun 2022 sebanyak 3.062 kelahiran hidup yang tersebar dalam lima kecamatan.

Tabel V.1 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Bima Tahun 2022

No	Kecamatan		Jumlah Anak 0-4 Tahun		Jumlah Perempuan 15-49 Tahun		Rasio Anak dan Perempuan
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	52.72.01	Rasanae Barat	1.751	17,04	8.352	19,17	20,97
2	52.72.02	Rasanae Timur	1.369	13,33	5.243	12,04	26,11
3	52.72.03	Asakota	2.468	24,02	9.963	22,87	24,77
4	52.72.04	Raba	2.598	25,29	10.739	24,65	24,19
5	52.72.05	Mpunda	2.087	20,32	9.266	21,27	22,52
Jumlah			10.273	100,00	43.563	100,00	23,58

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah

Rasio anak dan perempuan merupakan perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan dalam waktu tertentu. Rasio ini dipergunakan untuk mengetahui jumlah kelahiran yang terjadi selama lima tahun yang lalu. Pada tabel di atas dilihat ada 10.273 anak kelompok usia 0-4 tahun di Kota Bima, sedangkan jumlah perempuan pada kelompok usia 15-49 tahun sebanyak 43.563 jiwa. Hal di atas memperlihatkan bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 24 anak balita. Salah satu

faktor yang menentukan tingkat laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah adalah tingkat kelahiran dan kematian, adanya perbaikan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian penduduk rendah, sedangkan laju tingkat kelahiran tetap tinggi. Hal inilah yang merupakan penyebab utama ledakan jumlah penduduk (Prawirohardjo, 2010). Tingginya angka kelahiran merupakan alasan utama diperlukannya pelayanan Keluarga Berencana (KB) (Kemenkes RI, 2014).

Keluarga Berencana (KB) adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval kehamilan, dan mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menemukan jumlah anak dalam keluarga (Suratun, dkk.,2008). Tujuan program KB adalah mewujudkan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera. Ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana, di antaranya:

- Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut;
- Menganangkan keluarga kecil dengan hanya dua anak;
- Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini;
- Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua;
- Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.

Pengendalian kehamilan dalam program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi (Kemenkes RI, 2014). Penggunaan kontrasepsi merupakan tanggung jawab bersama antara pria dan wanita sebagai pasangan, sehingga metode kontrasepsi yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan serta keinginan bersama. Dalam hal ini bisa saja pria yang memakai kontrasepsi seperti kondom, dan vasektomi. Sementara itu apabila istri yang menggunakan kontrasepsi suami mempunyai peranan penting dalam mendukung istri dan menjamin efektivitas pemakaian kontrasepsi. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah pengguna Alat Kontrasepsi di masing-masing kecamatan se-Kota Bima pada tahun 2022.

Tabel V.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di rinci menurut Kesertaan KB per Kecamatan

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur (PUS)				Jumlah PUS	% PUS belum ber-KB
		Jumlah PUS Peserta KB	PUS Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) yang ber-KB	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani	Jumlah PUS yang belum ber-KB		
1	Rasanae Barat	2.835	2.071	573	1.401	6.880	28,69
2	Rasanae Timur	2.989	2.502	267	536	6.294	12,76
3	Asakota	4.905	3.009	501	866	9.281	14,73
4	Raba	5.057	4.477	356	1.043	10.933	12,80
5	Mpunda	4.581	3.664	450	815	9.510	13,30
Jumlah		20.367	15.723	2.147	4.661	42.898	15,87

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.3 Jumlah Peserta KB di rinci berdasarkan Alat/Metode KB yang digunakan per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Alat/Metode KB						
		Suntik KB	Obat/Pil KB	IUD/Spiral	Susuk/Implant	Kondom	Vagina Diafragma	Spermatisida
1	Rasanae Barat	1.416	30	239	1.024	31	0	0
2	Rasanae Timur	1.739	15	200	994	4	0	0
3	Asakota	2.968	72	436	1.254	66	0	0
4	Raba	2.521	79	502	1.742	55	0	0
5	Mpunda	2.797	55	548	1.062	27	0	0
Jumlah		11.441	251	1.925	6.076	183	0	0

Lanjutan Tabel V.3 Jumlah Peserta KB di rinci berdasarkan Alat/Metode KB yang digunakan per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Alat/Metode KB				Total Peserta KB	Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah FASYANKES yang siap melayani MKJP
		Vasektomi	Tubektomi	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
1	Rasanae Barat	86	9	1.358	4.193	212	11	
2	Rasanae Timur	32	5	1.231	4.220	103	9	
3	Asakota	103	6	1.799	6.704	222	10	
4	Raba	155	3	2.402	7.459	460	20	
5	Mpunda	90	2	1.702	6.283	185	12	
Jumlah		466	25	8.492	28.859	1.182	62	

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2022

Dari tabel V.3 terlihat bahwa pemakai alat kontrasepsi jenis suntik lebih mendominasi dari pemakaian alat kontrasepsi jenis lainnya, hampir separuh pengguna alat kontrasepsi menggunakan alkon jenis suntik. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap alat kontrasepsi suntik lebih aman dibandingkan dari alat kontrasepsi lainnya, walaupun sebenarnya apabila ditinjau secara medis memiliki tingkat keamanan yang sama. Selain itu jenis alat kontrasepsi ini diminati oleh pasutri usia muda mengingat penggunaan dalam jangka pendek ketika ingin memiliki anak kembali.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi adalah pengetahuan, dukungan suami dan pengalaman ber-KB. Dukungan suami juga mempengaruhi penggunaan kontrasepsi, karena istri yang mendapat dukungan dari suami akan menggunakan kontrasepsi secara terus menerus sedangkan yang tidak mendapatkan dukungan akan sedikit yang menggunakan kontrasepsi.

2. Aspek Kematian

Pada umumnya tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari besar kecilnya angka kematian yang terjadi di suatu daerah, hal tersebut berkaitan dengan kualitas kesehatan. Bila suatu daerah angka kematiannya tinggi, maka perlu dilihat ketersediaan sarana kesehatan dan obat-obatan serta pola perilaku hidup penduduk tersebut. Hal itu akan berimplikasi terhadap kebijakan peningkatan sarana dan prasarana beserta SDM medisnya dan pelayanan Kesehatan, kecukupan gizi, pencegahan dan penanganan penyakit menular serta pemahaman dan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat.

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Tingkat kematian dipengaruhi oleh: faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan, maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit system pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Angka kematian bayi/*Infant Mortality* adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/*Neo Natal Death Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sedangkan kematian *Post Neonatal* adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau *post-neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tabel V.4 Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita

No	Uraian	Jumlah
1	Lahir Hidup	3.062
2	Kematian Bayi	16
3	Kematian Anak Balita	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.5 Jumlah Kematian Ibu (yang dilaporkan) dirinci per kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu			Total Kematian Ibu
		Kematian Ibu Hamil	Kematian Ibu Bersalin	Kematian Ibu Nifas	
1	Rasanae Barat	1	0	1	2
2	Rasanae Timur	0	0	0	0
3	Asakota	0	0	0	0
4	Raba	0	0	0	0
5	Mpunda	0	0	1	1
Jumlah		1	0	2	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.6 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi (yang dilaporkan) dirinci per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran						Total Kelahiran (Laki-laki + Perempuan)		
		Bayi Laki-laki			Bayi Perempuan			Lahir Hidup	Lahir Mati	Jumlah
		Lahir Hidup	Lahir Mati	Jumlah	Lahir Hidup	Lahir Mati	Jumlah			
1	Rasanae Barat	350	1	351	313	1	314	663	2	665
2	Rasanae Timur	180	5	185	161	2	163	341	7	348
3	Asakota	329	4	333	285	0	285	614	4	618
4	Raba	378	3	381	299	5	304	677	8	685
5	Mpunda	395	2	397	372	1	373	767	3	770
Jumlah		1.632	15	1.647	1.430	9	1.439	3.062	24	3.086

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.7 Jumlah Bayi di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Bayi = Neonatal + Post Neonatal						Jumlah Bayi (Neonatal + Post Neonatal)		
		Neonatal (usia 0-28 hari)			Post Neonatal (usia 29 hari - 11 bulan)			L	P	L + P
		L	P	L + P	L	P	L + P			
1	Rasanae Barat	350	313	663	9	41	50	359	354	713
2	Rasanae Timur	180	161	341	3	19	22	183	180	363
3	Asakota	329	285	614	8	47	55	337	332	669
4	Raba	378	299	677	27	101	128	405	400	805
5	Mpunda	367	329	696	6	39	45	373	368	741
Jumlah		1.604	1.387	2.991	53	247	300	1.657	1.634	3.291

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.8 Jumlah Anak Balita, dan Balita di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Anak Balita dan Balita					
		Anak Balita (Usia 12 Bulan - 59 Bulan)			Balita (Usia 0 Bulan - 59 Bulan)		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Rasanae Barat	1.412	1.392	2.804	1.771	1.746	3.517
2	Rasanae Timur	719	707	1.426	902	887	1.789
3	Asakota	1.322	1.303	2.625	1.659	1.635	3.294
4	Raba	1.590	1.570	3.160	1.995	1.970	3.965
5	Mpunda	1.465	1.446	2.911	1.838	1.814	3.652
Jumlah		6.508	6.418	12.926	8.165	8.052	16.217

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.9 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita (yang dilaporkan) di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Kematian Balita (yang dilaporkan)									Kematian Anak Balita (Usia 12 - 59 bulan)			Kematian Balita (Usia 0 - 59 bulan)		
		Neonatal (usia 0-28 hari)			Post Neonatal (usia 29 hari - 11 bulan)			Total (Usia 0 - 11 Bulan)			L	P	L + P	L	P	L + P
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P						
1	Rasanae Barat	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
2	Rasanae Timur	2	2	4	0	0	0	2	2	4	0	0	0	2	2	4
3	Asakota	2	0	2	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	0	3
4	Raba	5	3	8	0	0	0	5	3	8	0	0	0	5	3	8
5	Mpunda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		11	5	16	0	0	0	11	5	16	1	0	1	12	5	17
Angka Kematian per 1,000 KH (dilaporkan)		AKN : 5,23			0,00			AKB : 5,23			AKABA : 0,33			5,55		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2022

Dari tabel terlihat bahwa selama tahun 2022, angka kematian bayi di Kota Bima masih tergolong tinggi karena terdapat 16 kematian bayi. Dari data tersebut dapat dihitung dan disimpulkan nilai AKB sebesar 5,23 yang artinya terdapat 5 kematian bayi dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Persoalan kematian bayi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tapi ini menjadi persoalan bersama di Pemerintah Kota Bima dan semua unsur yang terlibat.

3. Sosial

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Namun begitu juga sebaliknya bahwa setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang ada, baik biaya maupun sumber dayanya menjadikan kinerja dan kualitas hidup penduduk menjadi meningkat.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019).

Tabel V.10 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dirinci per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis PMKS							Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar/ Anak Jalanan	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	Fakir Miskin	Pecandu Narkoba/ NAPZA	PMKS Lainnya	
1	Rasanae Barat	154	55	54	8	6.589	0	0	6.860
2	Rasanae Timur	98	35	34	4	4.195	0	0	4.366
3	Asakota	181	64	63	6	7.739	0	0	8.053
4	Raba	203	72	71	5	8.701	0	0	9.052
5	Mpunda	171	60	59	7	7.296	0	0	7.593
Jumlah		807	286	281	30	34.520	0	0	35.924

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.11 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng berdasarkan Data Terpadu FM-OTM Kota Bima Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah PMKS Berdasarkan Data Terpadu FM-OTM				Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	
1	Rasanae Barat	176	110	114	28	428
2	Rasanae Timur	110	25	65	0	200
3	Asakota	133	98	78	0	309
4	Raba	125	18	20	0	163
5	Mpunda	108	25	25	0	158
Jumlah		652	276	302	28	1.258

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.12 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Menerima Paket Sandang

No	Kecamatan	Jumlah PMKS Berdasarkan Data Terpadu FM-OTM				Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	
1	Rasanae Barat	4	6	2	3	15
2	Rasanae Timur	4	6	15	1	26
3	Asakota	5	23	17	2	47
4	Raba	5	9	12	3	29
5	Mpunda	7	6	4	1	18
Jumlah		25	50	50	10	135

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.13 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No	Kecamatan	Jumlah PMKS Berdasarkan Data Terpadu FM-OTM				Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	
1	Rasanae Barat	74	6	86	0	166
2	Rasanae Timur	23	3	24	0	50
3	Asakota	42	6	74	0	122
4	Raba	21	4	23	0	48
5	Mpunda	31	4	22	0	57
Jumlah		191	23	229	0	443

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.14 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No	Kecamatan	Penerima Manfaat PKH	Penerima Manfaat BPNT	Penerima Manfaat BPNT-PPKM	Penerima Manfaat PBI-JKN	Penerima Manfaat Jamkesda
1	Rasanae Barat	1.359	1.640	0	17.367	0
2	Rasanae Timur	1.663	2.297	0	15.080	0
3	Asakota	2.520	3.505	0	24.242	0
4	Raba	2.479	3.439	0	24.919	0
5	Mpunda	1.413	1.881	0	16.906	0
Jumlah		9.434	12.762	0	98.514	0

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2022

Hambatan, kesulitan dan gangguan yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Aspek yang dominan terlihat pada kelompok fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas, dan lanjut usia terlantar serta anak terlantar.

Jumlah total penduduk pemerlu layanan kesejahteraan sosial bukan menggambarkan jumlah individu itu sendiri, karna satu orang penduduk bisa saja masuk ke dalam beberapa kategori PMKS. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Permensos nomor 5 tahun 2019).

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kedisabilitasan (tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel. Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bima 157.851 jiwa maka persentase jumlah penduduk penyandang disabilitas tahun 2022 adalah 0,35 persen. Aspek penyandang disabilitas yang dominan terlihat pada kelompok disabilitas netra. Kelompok penduduk ini perlu mendapat perhatian dan mendapat pelayanan penuh dari pemerintah, baik itu dari sisi pendidikan, kesehatan dan keterampilan. Sehingga dengan keterbatasannya, penyandang disabilitas dapat mengembangkan dirinya melalui kemandirian yang bermartabat, memiliki hak dan akses yang sama dalam pelayanan publik, dan inklusivitas dalam berbagai aspek pembangunan Indonesia

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang disabilitas dirinci menurut jenis kelamin. Distribusi penduduk Kota Bima menurut jenis kedisabilitasan dan jenis kelamin per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel V.15.

Tabel V.15 Jumlah Penyandang Disabilitas

No	Jenis Disabilitas	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Disabilitas Fisik	26	8,41	24	9,96	50	9,09
2	Disabilitas Netra	113	36,57	102	42,32	215	39,09
3	Disabilitas Rungu	31	10,03	25	10,37	56	10,18
4	Disabilitas Mental	105	33,98	68	28,22	173	31,45
5	Disabilitas Fisik dan Mental	3	0,97	0	0,00	3	0,55
6	Disabilitas Lainnya	31	10,03	22	9,13	53	9,64
Jumlah		309	100,00	241	100,00	550	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022

B. Aspek Pendidikan

Profil penduduk Kota Bima dari aspek pendidikan akan dilihat dari angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Angka Partisipasi Kasar/APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk usia yang seharusnya pada jenjang pendidikan tertentu yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan sesuai dibagi dengan jumlah penduduk berusia seharusnya pada jenjang tersebut.

Tabel V.16 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Bima, 2021 dan 2022

No	Kelompok Umur	2021	2022
1	15-19	100,00	100,00
2	20-24	100,00	100,00
3	25-29	100,00	100,00
4	30-34	99,73	98,04
5	35-39	97,09	94,72
6	40-44	97,26	92,60
7	45-49	94,61	95,36
8	50+	88,62	83,46
Jumlah			
	15-24	100,00	100,00
	15-44	99,16	97,68
	15+	96,16	93,70
	45+	90,10	86,46

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

Tabel V.17 Angka Partisipasi Jenjang TK, KB/PAUD, SD, dan SMP di Kota Bima Tahun Pelajaran 2021/2022

Angka Partisipasi Murni		APM, APK, dan APS				
Angka Partisipasi Kasar						
Angka Partisipasi Sekolah						
Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Siswa/Peserta Didik		Angka Partisipasi		
		Jumlah Seluruh Siswa	Siswa Usia Sekolah			
TK/KB/PAUD (5 – 6 Tahun)	6.135	TK	4.122	3.722	APM	60,67
		KB/PAUD	2.741	2.341	APM	38,16
		Jumlah Siswa	6.863	6.063	APK	111,87
SD (7 – 12 Tahun)	17.892	SD	14.810	13.501	APK	82,77
					APM	75,46
SMP (13 – 15 Tahun)	8.523	SMP	5.876	4.935	APK	68,94
					APM	57,90
Kota Bima	32.550		27.549	-	APS	84,64

Sumber : Dinas Kominfo Kota Bima Tahun 2022

Secara umum cakupan layanan pendidikan di Kota Bima telah memenuhi standar pelayanan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Selisih APK dan APM mengindikasikan adanya kelompok yang lambat jenjang (misalnya tidak naik kelas) atau terlalu cepat melampaui jenjang seharusnya (misalnya akselerasi atau masuk sekolah pada usia yang lebih muda dari batas umurnya). Dengan arti lain bahwa APK dan APM mengindikasikan proporsi murid yang tinggal kelas atau terlalu cepat sekolah.

C. Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi akan membahas tentang perbandingan dan jumlah tenaga kerja beserta angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja. Ekonomi yang dimiliki penduduk akan sangat berpengaruh pada kualitas penduduk suatu wilayah, semakin tinggi ekonomi maka kualitasnya juga akan semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan penduduk dapat memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan derajat kualitas kehidupan.

Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Diperkirakan setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan mampu men ghadirkan ketersediaan lapangan kerja yang banyak.

Tenaga kerja (*Manpower*) merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah maka penawaran tenaga kerja juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja), maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar pula

Batas usia kerja penduduk yang berlaku pada profil perkembangan kependudukan Kota Bima ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

Indikator ini berguna sebagai pertimbangan pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Tabel V.18 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
15-19	6.241	11,79	5.996	10,91	12.237	11,34
20-24	6.150	11,62	6.617	12,04	12.767	11,83
25-29	6.214	11,74	6.237	11,35	12.451	11,54
30-34	6.055	11,44	6.284	11,43	12.339	11,44
35-39	6.381	12,06	6.398	11,64	12.779	11,84
40-44	5.974	11,29	6.420	11,68	12.394	11,49
45-49	5.191	9,81	5.611	10,21	10.802	10,01
50-54	4.509	8,52	4.630	8,42	9.139	8,47
55-59	3.502	6,62	3.922	7,13	7.424	6,88
60-64	2.699	5,10	2.858	5,20	5.557	5,15
Jumlah	52.916	100,00	54.973	100,00	107.889	100,00
% Tenaga Kerja	33,52		34,83		68,35	

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima Tahun 2022

Dari tabel V.18 di atas nampak bahwa persentase tenaga kerja laki-laki lebih rendah (33,52 %) dibandingkan tenaga kerja perempuan (34,83 %). Lebih dari separuh jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2022 merupakan tenaga kerja (usia produktif) yakni sebanyak 68,35 %.

Menurut Partanto (2001), tenaga kerja dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan Penduduknya

Tenaga kerja berdasarkan jenis penduduk, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, yang mengelompokkan tenaga kerja merupakan mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan tenaga kerja

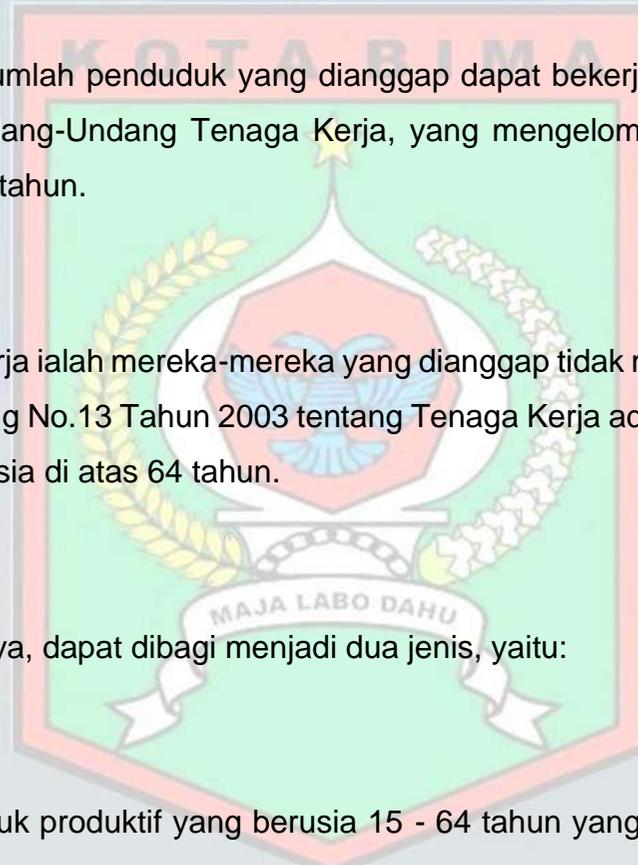
Dikatakan sebagai bukan tenaga kerja ialah mereka-mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja adalah penduduk yang diluar usia kerja, yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun.

b. Berdasarkan Batas Kerja

Tenaga kerja berdasarkan batas kerjanya, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk produktif yang berusia 15 - 64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan akan tetapi untuk sementara waktu tidak bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan.



2. Bukan Angkatan Kerja

Dikatakan bukan angkatan kerja ialah mereka yang berumur 10 tahun keatas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Sebagai contoh anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, serta para pengangguran sukarela.

c. Berdasarkan Kualitasnya

Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pendidikan formal dan non-formal, seperti pengacara, dokter, guru dan lain sebagainya.

2. Tenaga Kerja Terlatih

Merupakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil tersebut membutuhkan latihan yang berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Seperti apoteker, ahli beda, mekanik dan lain sebagainya.

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Yakni tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja, seperti kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.



d. Berdasarkan Keahliannya

Tenaga kerja berdasarkan keahlian-nya, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Tenaga kerja kasar

Merupakan merupakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.

2. Tenaga kerja terampil

Merupakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan tukang memperbaiki televisi dan radio.

3. Tenaga kerja terdidik

Yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi serta insinyur.

Menurut Simanjuntak (1985), aspek-aspek yang terkait dengan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun keatas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa. Adapun dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang lalu mempunyai beberapa kegiatan seperti:

1. Sekolah, yaitu mereka yang kegiatan utamanya sekolah.
2. Mengurus rumah tangga, yaitu yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu tanpa mendapatkan upah.



3. Penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan misalnya pensiunan, bunga simpanan dan sebagainya.
4. Mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani atau lainnya.

b. Kesempatan Kerja

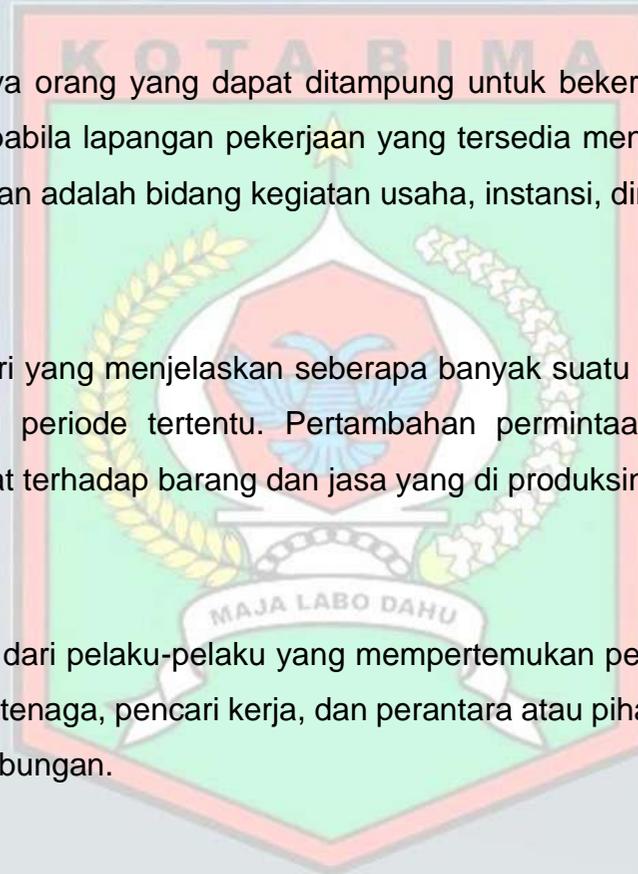
Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat ditampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha, instansi, dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

c. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang di produksinya.

d. Pasar Tenaga Kerja

Pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha yang membutuhkan tenaga, pencari kerja, dan perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan.



e. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Penyerapan tenaga kerja ini merupakan turunan dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan perubahan dari input atau masukan (faktor produksi) menjadi output atau keluaran.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Perluasan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja dikatakan cukup banyak, akan tetapi, angkatan kerja semakin bertambah melebihi kemampuan penciptaan lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran dan setengah pengangguran masih cukup tinggi. Penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor untuk dapat menampung pertambahan angkatan kerja yang semakin banyak yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

b. Peningkatan Mutu dan Kemampuan Kerja

Secara keseluruhan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah. Sehingga dalam meningkatkan kemampuan tersebut perlu dilakukan dengan melalui berbagai upaya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar didayagunakan semaksimal mungkin.

c. Penyebaran Tenaga Kerja

Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja telah dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja yang merata baik secara sektoral maupun regional.

Secara regional penyebaran angkatan kerja masih bertumpuk di pulau Jawa. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata baik secara sektoral maupun regional akan menyulitkan penyediaan tenaga kerja secara maksimal.

d. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja ialah tenaga kerja dapat bekerja lebih produktif, sehat dan sejahtera, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang sesuai dengan keahlian serta minatnya dan bukan pekerjaan yang dipaksakan.

Tabel V.19 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja

No	Kecamatan		Bekerja		Pengangguran		Jumlah	
	Kode	Nama	L	P	L	P	L	P
1	52.72.01	Rasanae Barat	8.410	6.671	282	308	8.692	6.979
2	52.72.02	Rasanae Timur	5.389	4.146	193	212	5.582	4.358
3	52.72.03	Asakota	9.943	7.592	333	365	10.276	7.957
4	52.72.04	Raba	11.206	8.878	350	390	11.556	9.268
5	52.72.05	Mpunda	9.385	7.433	303	332	9.688	7.765
Jumlah			44.333	34.720	1.461	1.607	45.794	36.327

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

Tabel V.20 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Bukan Angkatan Kerja

No	Kecamatan		Sekolah		Mengurus Rumah Tangga		Lainnya		Jumlah	
	Kode	Nama	L	P	L	P	L	P	L	P
1	52.72.01	Rasanae Barat	966	1.065	497	3.398	778	224	2.241	4.687
2	52.72.02	Rasanae Timur	590	734	330	2.118	507	142	1.427	2.994
3	52.72.03	Asakota	1.172	1.234	539	3.645	852	193	2.563	5.072
4	52.72.04	Raba	1.244	1.294	717	4.623	1.084	328	3.045	6.245
5	52.72.05	Mpunda	1.039	1.146	558	3.709	863	224	2.460	5.079
Jumlah			5.011	5.473	2.641	17.493	4.084	1.111	11.736	24.077

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

Tabel V.21 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Kecamatan		Angkatan Kerja						Bukan Angkatan Kerja							
		Bekerja		Pengangguran		Jumlah		Sekolah		Mengurus Rumah Tangga		Lainnya		Jumlah	
Kode	Nama	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
52.72.01	Rasanae Barat	96,76	95,59	3,24	4,41	100,00	100,00	43,11	22,72	22,18	72,50	34,72	4,78	100,00	100,00
52.72.02	Rasanae Timur	96,54	95,14	3,46	4,86	100,00	100,00	41,35	24,52	23,13	70,74	35,53	4,74	100,00	100,00
52.72.03	Asakota	96,76	95,41	3,24	4,59	100,00	100,00	45,73	24,33	21,03	71,87	33,24	3,81	100,00	100,00
52.72.04	Raba	96,97	95,79	3,03	4,21	100,00	100,00	40,85	20,72	23,55	74,03	35,60	5,25	100,00	100,00
52.72.05	Mpunda	96,87	95,72	3,13	4,28	100,00	100,00	42,24	22,56	22,68	73,03	35,08	4,41	100,00	100,00
Jumlah		96,81	95,58	3,19	4,42	100,00	100,00	42,70	22,73	22,50	72,65	34,80	4,61	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima Tahun 2022

Tabel V.22 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Total Angkatan Kerja dan Total Bukan Angkatan Kerja

No	Kecamatan		Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			
	Kode	Nama	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
1	52.72.01	Rasanae Barat	96,24	3,76	100,00	29,32	56,22	14,46	100,00
2	52.72.02	Rasanae Timur	95,93	4,07	100,00	29,95	55,37	14,68	100,00
3	52.72.03	Asakota	96,17	3,83	100,00	31,51	54,80	13,69	100,00
4	52.72.04	Raba	96,45	3,55	100,00	27,32	57,48	15,20	100,00
5	52.72.05	Mpunda	96,36	3,64	100,00	28,98	56,60	14,42	100,00
Jumlah			96,26	3,74	100,00	29,27	56,22	14,51	100,00

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

Tabel V.23 Jumlah Penduduk Usia Kerja

No	Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
1	< SD	99,01	0,99	100,00	6,28	69,68	24,04	100,00
2	SMP/Paket B	100,00	0,00	100,00	67,38	25,78	6,84	100,00
3	SMA/Paket C	95,40	4,60	100,00	23,27	62,20	14,53	100,00
4	SMK	95,98	4,02	100,00	0,00	88,28	11,72	100,00
5	Diploma I/II/III	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	Universitas	93,88	6,12	100,00	5,49	67,96	26,55	100,00
Kota Bima		92,26	3,74	100,00	29,27	56,22	14,51	100,00

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

Tabel IV.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	25.771	32,935	21.675	27,229	47.446	30,057
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	0,000	33.294	41,825	33.294	21,092
3	PELAJAR/MAHASISWA	14.028	17,928	12.757	16,026	26.785	16,969
4	PENSIUNAN	1.178	1,505	433	0,544	1.611	1,021
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	3.888	4,969	3.090	3,882	6.978	4,421
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	301	0,385	0	0,000	301	0,191
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	702	0,897	12	0,015	714	0,452
8	PERDAGANGAN	212	0,271	191	0,240	403	0,255
9	PETANI/PEKEBUN	7.079	9,047	136	0,171	7.215	4,571
10	PETERNAK	30	0,038	4	0,005	34	0,022
11	NELAYAN/PERIKANAN	1.055	1,348	5	0,006	1.060	0,672
12	INDUSTRI	6	0,008	3	0,004	9	0,006
13	KONSTRUKSI	15	0,019	1	0,001	16	0,010
14	TRANSPORTASI	320	0,409	1	0,001	321	0,203
15	KARYAWAN SWASTA	3.284	4,197	999	1,255	4.283	2,713
16	KARYAWAN BUMN	417	0,533	168	0,211	585	0,371
17	KARYAWAN BUMD	73	0,093	43	0,054	116	0,073
18	KARYAWAN HONORER	2.202	2,814	2.511	3,154	4.713	2,986
19	BURUH HARIAN LEPAS	1.236	1,580	12	0,015	1.248	0,791
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.337	1,709	29	0,036	1.366	0,865
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	64	0,082	0	0,000	64	0,041
22	BURUH PETERNAKAN	13	0,017	2	0,003	15	0,010
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	0,001	63	0,079	64	0,041

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
24	TUKANG CUKUR	8	0,010	0	0,000	8	0,005
25	TUKANG LISTRIK	15	0,019	0	0,000	15	0,010
26	TUKANG BATU	536	0,685	0	0,000	536	0,340
27	TUKANG KAYU	473	0,604	0	0,000	473	0,300
28	TUKANG SOL SEPATU	4	0,005	1	0,001	5	0,003
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	36	0,046	0	0,000	36	0,023
30	TUKANG JAHIT	38	0,049	49	0,062	87	0,055
31	TUKANG GIGI	2	0,003	0	0,000	2	0,001
32	PENATA RIAS	3	0,004	4	0,005	7	0,004
33	PENATA BUSANA	0	0,000	1	0,001	1	0,001
34	PENATA RAMBUT	4	0,005	4	0,005	8	0,005
35	MEKANIK	112	0,143	0	0,000	112	0,071
36	SENIMAN	9	0,012	2	0,003	11	0,007
37	TABIB	2	0,003	0	0,000	2	0,001
38	PARAJI	1	0,001	0	0,000	1	0,001
39	PERANCANG BUSANA	0	0,000	2	0,003	2	0,001
40	PENTERJEMAH	1	0,001	0	0,000	1	0,001
41	IMAM MASJID	7	0,009	0	0,000	7	0,004
42	PENDETA	7	0,009	0	0,000	7	0,004
43	PASTOR	1	0,001	0	0,000	1	0,001
44	WARTAWAN	44	0,056	0	0,000	44	0,028
45	USTADZ/MUBALIGH	4	0,005	2	0,003	6	0,004
46	JURU MASAK	0	0,000	2	0,003	2	0,001
47	PROMOTOR ACARA	0	0,000	0	0,000	0	0,000

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
48	ANGGOTA DPR RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
49	ANGGOTA DPD RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
50	ANGGOTA BPK	0	0,000	0	0,000	0	0,000
51	PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
52	WAKIL PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
55	DUTA BESAR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
56	GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
57	WAKIL GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
58	BUPATI	0	0,000	1	0,001	1	0,001
59	WAKIL BUPATI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
60	WALIKOTA	1	0,001	0	0,000	1	0,001
61	WAKIL WALIKOTA	1	0,001	0	0,000	1	0,001
62	ANGGOTA DPRD PROP.	3	0,004	0	0,000	3	0,002
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	21	0,027	3	0,004	24	0,015
64	DOSEN	171	0,219	110	0,138	281	0,178
65	GURU	543	0,694	946	1,188	1.489	0,943
66	PILOT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
67	PENGACARA	30	0,038	2	0,003	32	0,020
68	NOTARIS	7	0,009	5	0,006	12	0,008
69	ARSITEK	1	0,001	0	0,000	1	0,001
70	AKUNTAN	1	0,001	0	0,000	1	0,001
71	KONSULTAN	11	0,014	1	0,001	12	0,008

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
72	DOKTER	47	0,060	69	0,087	116	0,073
73	BIDAN	0	0,000	167	0,210	167	0,106
74	PERAWAT	54	0,069	142	0,178	196	0,124
75	APOTEKER	6	0,008	13	0,016	19	0,012
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0,000	1	0,001	1	0,001
77	PENYIAR TELEVISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
78	PENYIAR RADIO	1	0,001	0	0,000	1	0,001
79	PELAUT	78	0,100	0	0,000	78	0,049
80	PENELITI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
81	SOPIR	672	0,859	0	0,000	672	0,426
82	PIALANG	1	0,001	0	0,000	1	0,001
83	PARANORMAL	0	0,000	0	0,000	0	0,000
84	PEDAGANG	239	0,305	298	0,374	537	0,340
85	PERANGKAT DESA	5	0,006	2	0,003	7	0,004
86	KEPALA DESA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	0,000	2	0,003	2	0,001
88	WIRASWASTA	11.829	15,118	2.346	2,947	14.175	8,980
89	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	1	0,001	0	0,000	1	0,001
90	ARTIS	0	0,000	0	0,000	0	0,000
91	ATLIT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
92	CHEFF	0	0,000	0	0,000	0	0,000
93	MANAJER	0	0,000	0	0,000	0	0,000
94	TENAGA TATA USAHA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
95	OPERATOR	0	0,000	0	0,000	0	0,000

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
97	TEKNISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
98	ASISTEN AHLI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
99	PEKERJAAN LAINNYA	5	0,006	0	0,000	5	0,003
Jumlah		78.247	100,000	79.604	100,000	157.851	100,000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah



BAB VI

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan tersebut sebagai bukti diri untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan dan sebagainya. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan dan kualitas informasi layanan kependudukan.

Pemberian dokumen kependudukan bersifat stelsel aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk mengupdate data kependudukan merupakan usaha agar data dalam database kependudukan sesuai dengan dokumen dan realitas yang dimiliki penduduk.

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan hukum secara sah, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga yang sah dan mempunyai kedudukan hukum keluarga tersebut bertempat tinggal. Pada tahun 2022 ini penandatanganan Kartu Keluarga dan Akta-Akta menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE), penandatanganan ini sah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk fotokopi dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk dapat melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan QR Code pada dokumen tersebut.

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Kartu Keluarga (KK) memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kersantian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu rumah tangga boleh terdapat lebih dari satu Kepala Keluarga.

Tabel VI.1 Cakupan Kepemilin Kartu Keluarga Per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepala Keluarga			Telah Cetak Kartu Keluarga				Belum Cetak Kartu Keluarga			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72	Kota Bima	40.185	10.300	50.485	12.582	3.059	15.641	30,98	27.603	7.241	34.844	69,02
52.72.01	Rasanae Barat	7.364	2.426	9.790	2.145	690	2.835	28,96	5.219	1.736	6.955	71,04
52.72.01.1001	Paruga	1.302	448	1.750	396	128	524	29,94	906	320	1.226	70,06
52.72.01.1002	Nae	1.001	352	1.353	266	90	356	26,31	735	262	997	73,69
52.72.01.1003	Sarae	1.214	392	1.606	327	108	435	27,09	887	284	1.171	72,91
52.72.01.1004	Tanjung	1.525	496	2.021	455	140	595	29,44	1.070	356	1.426	70,56
52.72.01.1013	Pane	640	273	913	184	90	274	30,01	456	183	639	69,99
52.72.01.1014	Dara	1.682	465	2.147	517	134	651	30,32	1.165	331	1.496	69,68
52.72.02	Rasanae Timur	5.274	1.175	6.449	1.717	359	2.076	32,19	3.557	816	4.373	67,81
52.72.02.1004	Kumbe	1.037	286	1.323	335	98	433	32,73	702	188	890	67,27
52.72.02.1008	Lampe	428	84	512	137	23	160	31,25	291	61	352	68,75
52.72.02.1009	Dodu	889	209	1.098	276	61	337	30,69	613	148	761	69,31
52.72.02.1011	Nungga	669	119	788	210	41	251	31,85	459	78	537	68,15
52.72.02.1018	Kodo	584	149	733	186	48	234	31,92	398	101	499	68,08
52.72.02.1019	Oi Fo'o	590	93	683	190	21	211	30,89	400	72	472	69,11
52.72.02.1020	Lelamase	582	115	697	198	27	225	32,28	384	88	472	67,72
52.72.02.1021	Oimbo	495	120	615	185	40	225	36,59	310	80	390	63,41
52.72.03	Asakota	8.955	1.967	10.922	2.796	582	3.378	30,93	6.159	1.385	7.544	69,07
52.72.03.1001	Melayu	1.326	436	1.762	400	116	516	29,28	926	320	1.246	70,72
52.72.03.1002	Jatiwangi	1.893	394	2.287	572	122	694	30,35	1.321	272	1.593	69,65
52.72.03.1003	Jatibaru	1.575	365	1.940	480	105	585	30,15	1.095	260	1.355	69,85
52.72.03.1004	Kolo	1.496	307	1.803	464	84	548	30,39	1.032	223	1.255	69,61
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.137	227	1.364	366	67	433	31,74	771	160	931	68,26
52.72.03.1006	Ule	1.528	238	1.766	514	88	602	34,09	1.014	150	1.164	65,91

Kode	Wilayah	Kepala Keluarga			Telah Cetak Kartu Keluarga				Belum Cetak Kartu Keluarga			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72.04	Raba	10.270	2.720	12.990	3.230	821	4.051	31,19	7.040	1.899	8.939	68,81
52.72.04.1001	Penaraga	1.233	380	1.613	385	108	493	30,56	848	272	1.120	69,44
52.72.04.1002	Rontu	864	225	1.089	313	78	391	35,90	551	147	698	64,10
52.72.04.1003	Penanae	1.049	273	1.322	306	82	388	29,35	743	191	934	70,65
52.72.04.1004	Kendo	437	83	520	132	30	162	31,15	305	53	358	68,85
52.72.04.1005	Ntobo	1.078	212	1.290	374	60	434	33,64	704	152	856	66,36
52.72.04.1006	Nitu	435	65	500	141	16	157	31,40	294	49	343	68,60
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.005	260	1.265	321	80	401	31,70	684	180	864	68,30
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.003	283	1.286	293	93	386	30,02	710	190	900	69,98
52.72.04.1009	Rite	615	136	751	170	34	204	27,16	445	102	547	72,84
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.354	435	1.789	439	135	574	32,08	915	300	1.215	67,92
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.197	368	1.565	356	105	461	29,46	841	263	1.104	70,54
52.72.05	Mpunda	8.322	2.012	10.334	2.694	607	3.301	31,94	5.628	1.405	7.033	68,06
52.72.05.1001	Monggonao	1.018	272	1.290	338	80	418	32,40	680	192	872	67,60
52.72.05.1002	Sadia	900	190	1.090	277	55	332	30,46	623	135	758	69,54
52.72.05.1003	Santi	663	156	819	192	38	230	28,08	471	118	589	71,92
52.72.05.1004	Sambinae	936	167	1.103	325	61	386	35,00	611	106	717	65,00
52.72.05.1005	Penatoi	1.145	323	1.468	365	104	469	31,95	780	219	999	68,05
52.72.05.1006	Lewirato	505	122	627	214	40	254	40,51	291	82	373	59,49
52.72.05.1007	Mande	689	206	895	204	58	262	29,27	485	148	633	70,73
52.72.05.1008	Panggi	696	152	848	225	52	277	32,67	471	100	571	67,33
52.72.05.1009	Manggemaci	1.017	289	1.306	300	82	382	29,25	717	207	924	70,75
52.72.05.1010	Matakando	753	135	888	254	37	291	32,77	499	98	597	67,23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Dikatakan Kepemilikan Kartu keluarga apabila Kepala Keluarga melakukan pencetakan pertama Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing Kabupaten/Kota. Tabel VI.1 menunjukkan jumlah kepala keluarga memiliki Kartu Keluarga berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Bima 30,98 %. Salah satu penyebabnya kepemilikan kartu keluarga ini tidak 100 % dikarenakan pada saat pencatatan peristiwa kematian kepala keluarga akan mengakibatkan pemecahan kepala keluarga. Dalam pencatatan peristiwa kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan tidak hanya dari laporan ahli waris (keluarga) saja tetapi juga berdasarkan Laporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID) yang disampaikan oleh Kelurahan setiap bulannya. Sementara untuk penerbitan akta kematian dan pembaharuan Kartu Keluarga dilakukan apabila ahli waris dan kader yang telah ditunjuk melengkapi bahan dan persyaratan penerbitan kedua dokumen tersebut

Pada tabel VI.1 di atas, jumlah keluarga di Kota Bima sebanyak 50.485 keluarga, yang terdiri dari kepala keluarga laki-laki 40.185 kepala keluarga dan kepala keluarga perempuan berjumlah 10.300 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kelurahan Jatiwangi yaitu sebesar 2.287 KK, sedang jumlah kepala keluarga terkecil adalah Kelurahan Nitu sebesar 500 KK.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin. Dalam buku profil ini disebut penduduk wajib KTP.

Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tabel 47 menyajikan jumlah wajib KTP el dan capaian perekaman KTP El.

1) Capaian Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

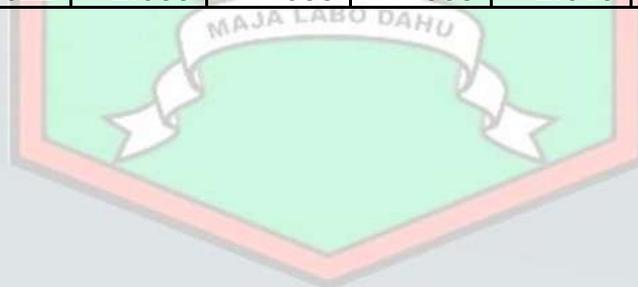
Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menetapkan target capaian perekaman KTP-el adalah 97,50 % bagi penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah. Untuk meningkatkan perekaman KTP-el bagi penduduk usia wajib KTP-el berbagai program dan inovasi telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

Dari tabel IV.2 di bawah ini dapat diketahui capaian perekaman KTP el adalah 97,53 % dari total wajib KTP el. Untuk kecamatan dengan capaian perekaman tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Timur 97,64 %, sedangkan kecamatan dengan capaian terendah di Kecamatan Rasanae Barat 97,43 %.

Tabel VI.2 Jumlah dan Capaian Perekaman KTP Elektronik per Kelurahan

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Rekam KTP				Belum Rekam KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72	<i>Kota Bima</i>	54.470	57.649	112.119	53.038	56.316	109.354	97,53	1.432	1.333	2.765	2,47
52.72.01	<i>Rasanae Barat</i>	10.320	11.146	21.466	10.057	10.857	20.914	97,43	263	289	552	2,57
52.72.01.1001	Paruga	1.831	1.953	3.784	1.786	1.900	3.686	97,41	45	53	98	2,59
52.72.01.1002	Nae	1.454	1.617	3.071	1.420	1.580	3.000	97,69	34	37	71	2,31
52.72.01.1003	Sarae	1.751	1.859	3.610	1.702	1.806	3.508	97,17	49	53	102	2,83
52.72.01.1004	Tanjung	2.105	2.260	4.365	2.049	2.207	4.256	97,50	56	53	109	2,50
52.72.01.1013	Pane	911	1.031	1.942	894	1.008	1.902	97,94	17	23	40	2,06
52.72.01.1014	Dara	2.268	2.426	4.694	2.206	2.356	4.562	97,19	62	70	132	2,81

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Rekam KTP				Belum Rekam KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72.02	<i>Rasanae Timur</i>	6.682	7.024	13.706	6.505	6.877	13.382	97,64	177	147	324	2,36
52.72.02.1004	Kumbe	1.348	1.432	2.780	1.314	1.396	2.710	97,48	34	36	70	2,52
52.72.02.1008	Lampe	549	578	1.127	535	562	1.097	97,34	14	16	30	2,66
52.72.02.1009	Dodu	1.102	1.169	2.271	1.072	1.143	2.215	97,53	30	26	56	2,47
52.72.02.1011	Nungga	846	863	1.709	817	844	1.661	97,19	29	19	48	2,81
52.72.02.1018	Kodo	761	834	1.595	745	823	1.568	98,31	16	11	27	1,69
52.72.02.1019	Oi Fo'o	712	737	1.449	696	719	1.415	97,65	16	18	34	2,35
52.72.02.1020	Lelamase	705	755	1.460	688	742	1.430	97,95	17	13	30	2,05
52.72.02.1021	Oimbo	659	656	1.315	638	648	1.286	97,79	21	8	29	2,21
52.72.03	<i>Asakota</i>	12.146	12.374	24.520	11.824	12.116	23.940	97,63	322	258	580	2,37
52.72.03.1001	Melayu	1.923	2.042	3.965	1.875	2.007	3.882	97,91	48	35	83	2,09
52.72.03.1002	Jatiwangi	2.606	2.656	5.262	2.548	2.614	5.162	98,10	58	42	100	1,90
52.72.03.1003	Jatibaru	2.104	2.113	4.217	2.063	2.083	4.146	98,32	41	30	71	1,68
52.72.03.1004	Kolo	2.032	2.033	4.065	1.961	1.964	3.925	96,56	71	69	140	3,44
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.459	1.464	2.923	1.418	1.429	2.847	97,40	41	35	76	2,60
52.72.03.1006	Ule	2.022	2.066	4.088	1.959	2.019	3.978	97,31	63	47	110	2,69



Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Rekam KTP				Belum Rekam KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72.04	Raba	13.803	14.847	28.650	13.431	14.511	27.942	97,53	372	336	708	2,47
52.72.04.1001	Penaraga	1.769	1.880	3.649	1.719	1.840	3.559	97,53	50	40	90	2,47
52.72.04.1002	Rontu	1.130	1.217	2.347	1.099	1.193	2.292	97,66	31	24	55	2,34
52.72.04.1003	Penanae	1.457	1.513	2.970	1.410	1.479	2.889	97,27	47	34	81	2,73
52.72.04.1004	Kendo	540	558	1.098	522	546	1.068	97,27	18	12	30	2,73
52.72.04.1005	Ntobo	1.359	1.426	2.785	1.320	1.385	2.705	97,13	39	41	80	2,87
52.72.04.1006	Nitu	543	556	1.099	527	537	1.064	96,82	16	19	35	3,18
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.363	1.494	2.857	1.322	1.464	2.786	97,51	41	30	71	2,49
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.333	1.451	2.784	1.309	1.422	2.731	98,10	24	29	53	1,90
52.72.04.1009	Rite	830	877	1.707	810	854	1.664	97,48	20	23	43	2,52
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.777	2.015	3.792	1.735	1.968	3.703	97,65	42	47	89	2,35
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.702	1.860	3.562	1.658	1.823	3.481	97,73	44	37	81	2,27
52.72.05	Mpunda	11.519	12.258	23.777	11.221	11.955	23.176	97,47	298	303	601	2,53
52.72.05.1001	Monggonao	1.453	1.521	2.974	1.424	1.494	2.918	98,12	29	27	56	1,88
52.72.05.1002	Sadia	1.294	1.379	2.673	1.258	1.348	2.606	97,49	36	31	67	2,51
52.72.05.1003	Santi	926	990	1.916	899	971	1.870	97,60	27	19	46	2,40
52.72.05.1004	Sambinae	1.212	1.247	2.459	1.180	1.218	2.398	97,52	32	29	61	2,48
52.72.05.1005	Penatoi	1.618	1.747	3.365	1.573	1.700	3.273	97,27	45	47	92	2,73
52.72.05.1006	Lewirato	735	722	1.457	709	704	1.413	96,98	26	18	44	3,02
52.72.05.1007	Mande	950	1.070	2.020	923	1.038	1.961	97,08	27	32	59	2,92
52.72.05.1008	Panggi	958	1.035	1.993	943	1.009	1.952	97,94	15	26	41	2,06
52.72.05.1009	Manggemaci	1.382	1.512	2.894	1.351	1.463	2.814	97,24	31	49	80	2,76
52.72.05.1010	Matakando	991	1.035	2.026	961	1.010	1.971	97,29	30	25	55	2,71

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

2) Capaian Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Cakupan kepemilikan KTP-el merupakan salah satu target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Kabupaten/ Kota se-Indonesia (Nasional) bagi penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah. Tentunya kepemilikan KTP-el ini diawali dengan proses perekaman KTP-el.

Tabel VI.3 Jumlah dan Capaian Pencetakan KTP Elektronik per Kelurahan

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Cetak KTP				Belum Cetak KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72	<i>Kota Bima</i>	54.470	57.649	112.119	52.267	55.366	108.921	97,15	2.203	2.283	3.198	2,85
52.72.01	<i>Rasanae Barat</i>	10.320	11.146	21.466	9.769	10.418	20.883	97,28	551	728	583	2,72
52.72.01.1001	Paruga	1.831	1.953	3.784	1.736	1.830	3.679	97,23	95	123	105	2,77
52.72.01.1002	Nae	1.454	1.617	3.071	1.398	1.532	2.995	97,53	56	85	76	2,47
52.72.01.1003	Sarae	1.751	1.859	3.610	1.604	1.702	3.505	97,09	147	157	105	2,91
52.72.01.1004	Tanjung	2.105	2.260	4.365	2.002	2.119	4.251	97,39	103	141	114	2,61
52.72.01.1013	Pane	911	1.031	1.942	874	972	1.902	97,94	37	59	40	2,06
52.72.01.1014	Dara	2.268	2.426	4.694	2.155	2.263	4.551	96,95	113	163	143	3,05
52.72.02	<i>Rasanae Timur</i>	6.682	7.024	13.706	6.469	6.837	13.358	97,46	213	187	348	2,54
52.72.02.1004	Kumbe	1.348	1.432	2.780	1.304	1.391	2.702	97,19	44	41	78	2,81
52.72.02.1008	Lampe	549	578	1.127	531	556	1.095	97,16	18	22	32	2,84
52.72.02.1009	Dodu	1.102	1.169	2.271	1.068	1.136	2.211	97,36	34	33	60	2,64
52.72.02.1011	Nungga	846	863	1.709	810	838	1.656	96,90	36	25	53	3,10
52.72.02.1018	Kodo	761	834	1.595	741	813	1.568	98,31	20	21	27	1,69
52.72.02.1019	Oi Fo'o	712	737	1.449	694	717	1.413	97,52	18	20	36	2,48
52.72.02.1020	Lelamase	705	755	1.460	686	740	1.430	97,95	19	15	30	2,05
52.72.02.1021	Oimbo	659	656	1.315	635	646	1.283	97,57	24	10	32	2,43

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Cetak KTP				Belum Cetak KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72.03	Asakota	12.146	12.374	24.520	11.611	11.915	23.758	96,89	535	459	762	3,11
52.72.03.1001	Melayu	1.923	2.042	3.965	1.848	1.975	3.854	97,20	75	67	111	2,80
52.72.03.1002	Jatiwangi	2.606	2.656	5.262	2.493	2.568	5.108	97,07	113	88	154	2,93
52.72.03.1003	Jatibaru	2.104	2.113	4.217	2.006	2.021	4.090	96,99	98	92	127	3,01
52.72.03.1004	Kolo	2.032	2.033	4.065	1.919	1.920	3.914	96,29	113	113	151	3,71
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.459	1.464	2.923	1.407	1.423	2.837	97,06	52	41	86	2,94
52.72.03.1006	Ule	2.022	2.066	4.088	1.938	2.008	3.955	96,75	84	58	133	3,25
52.72.04	Raba	13.803	14.847	28.650	13.344	14.418	27.827	97,13	459	429	823	2,87
52.72.04.1001	Penaraga	1.769	1.880	3.649	1.711	1.830	3.551	97,31	58	50	98	2,69
52.72.04.1002	Rontu	1.130	1.217	2.347	1.083	1.177	2.266	96,55	47	40	81	3,45
52.72.04.1003	Penanae	1.457	1.513	2.970	1.406	1.470	2.882	97,04	51	43	88	2,96
52.72.04.1004	Kendo	540	558	1.098	521	546	1.067	97,18	19	12	31	2,82
52.72.04.1005	Ntobo	1.359	1.426	2.785	1.309	1.374	2.690	96,59	50	52	95	3,41
52.72.04.1006	Nitu	543	556	1.099	527	536	1.064	96,82	16	20	35	3,18
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.363	1.494	2.857	1.314	1.450	2.775	97,13	49	44	82	2,87
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.333	1.451	2.784	1.306	1.415	2.726	97,92	27	36	58	2,08
52.72.04.1009	Rite	830	877	1.707	799	851	1.656	97,01	31	26	51	2,99
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.777	2.015	3.792	1.722	1.956	3.681	97,07	55	59	111	2,93
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.702	1.860	3.562	1.646	1.813	3.469	97,39	56	47	93	2,61

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Cetak KTP				Belum Cetak KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72.05	Mpunda	11.519	12.258	23.777	11.074	11.778	23.095	97,13	445	480	682	2,87
52.72.05.1001	Monggonao	1.453	1.521	2.974	1.417	1.479	2.915	98,02	36	42	59	1,98
52.72.05.1002	Sadia	1.294	1.379	2.673	1.233	1.319	2.604	97,42	61	60	69	2,58
52.72.05.1003	Santi	926	990	1.916	888	961	1.855	96,82	38	29	61	3,18
52.72.05.1004	Sambinae	1.212	1.247	2.459	1.163	1.206	2.377	96,67	49	41	82	3,33
52.72.05.1005	Penatoi	1.618	1.747	3.365	1.554	1.667	3.253	96,67	64	80	112	3,33
52.72.05.1006	Lewirato	735	722	1.457	699	699	1.413	96,98	36	23	44	3,02
52.72.05.1007	Mande	950	1.070	2.020	903	1.011	1.947	96,39	47	59	73	3,61
52.72.05.1008	Panggi	958	1.035	1.993	938	1.000	1.950	97,84	20	35	43	2,16
52.72.05.1009	Manggemaci	1.382	1.512	2.894	1.325	1.433	2.812	97,17	57	79	82	2,83
52.72.05.1010	Matakando	991	1.035	2.026	954	1.003	1.969	97,19	37	32	57	2,81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Beragam permasalahan yang menyebabkan masyarakat belum mempunyai KTP-el dan perekaman KTP-el diantaranya adalah berada diluar domisili, lanjut usia, penyandang disabilitas, rendahnya tingkat kesadaran penduduk tentang pentingnya kepemilikan KTP. Berangkat dari permasalahan tersebut dan seiring dengan target nasional tentang kepemilikan KTP-el maka berbagai upaya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melalui inovasi-inovasi. Selain memberdayakan sumber daya yang ada pada Disdukcapil juga melibatkan *stakeholder* terkait yang dapat membantu dalam pencapaian target dimaksud.

Tabel IV.3 di atas menyajikan capaian kepemilikan KTP el dari total wajib KTP el. Dapat dilihat bahwa capaian kepemilikan KTP 97,15 %, dengan capaian tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Timur 97,46 % dan capaian terendah di Kecamatan Asakota 96,89 %. Perlu dorongan dan dukungan dari semua pihak menghimbau masyarakat untuk perekaman KTP el guna penerbitan KTP el yang bersangkutan.

C. Penerbitan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta pencatatan sipil dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada Pasal 68, kutipan Akta Pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran; (2) kematian; (3) perkawinan; (4) perceraian; (5) pengakuan anak; dan (6) pengesahan anak.

1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti syah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang ayah dan ibu sebagai orang tuanya.

Tabel IV.4 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Bima terhadap total penduduk Kota Bima. Dari tabel di atas terlihat bahwa Penduduk Kota Bima yang memiliki akta kelahiran hanya 86.595 jiwa (54,86 %). Kepemilikan ini meningkat apabila dibandingkan dengan kepemilikan akte kelahiran tahun 2021, dimana kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2021 sebesar 52,56 %.



Tabel VI.4 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir			
		Jumlah Penduduk	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72	<i>Kota Bima</i>	157.851	86.595	71.256	54,86
52.72.01	<i>Rasanae Barat</i>	30.128	15.567	14.561	51,67
52.72.01.1001	Paruga	5.234	2.599	2.635	49,66
52.72.01.1002	Nae	4.229	2.243	1.986	53,04
52.72.01.1003	Sarae	5.062	2.624	2.438	51,84
52.72.01.1004	Tanjung	6.248	3.189	3.059	51,04
52.72.01.1013	Pane	2.647	1.362	1.285	51,45
52.72.01.1014	Dara	6.708	3.550	3.158	52,92
52.72.02	<i>Rasanae Timur</i>	19.184	11.024	8.160	57,46
52.72.02.1004	Kumbe	3.818	2.106	1.712	55,16
52.72.02.1008	Lampe	1.594	1.012	582	63,49
52.72.02.1009	Dodu	3.204	1.804	1.400	56,30
52.72.02.1011	Nungga	2.452	1.338	1.114	54,57
52.72.02.1018	Kodo	2.192	1.254	938	57,21
52.72.02.1019	Oi Fo'o	2.122	1.353	769	63,76
52.72.02.1020	Lelamase	1.998	1.140	858	57,06
52.72.02.1021	Oimbo	1.804	1.017	787	56,37
52.72.03	<i>Asakota</i>	35.388	19.609	15.779	55,41
52.72.03.1001	Melayu	5.731	3.125	2.606	54,53
52.72.03.1002	Jatiwangi	7.498	4.041	3.457	53,89
52.72.03.1003	Jatibaru	5.962	3.190	2.772	53,51
52.72.03.1004	Kolo	5.864	3.386	2.478	57,74
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	4.042	2.216	1.826	54,82
52.72.03.1006	Ule	6.291	3.651	2.640	58,04

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir			
		Jumlah Penduduk	Memiliki	Belum Memiliki	%
<i>52.72.04</i>	<i>Raba</i>	39.786	22.116	17.670	55,59
52.72.04.1001	Penaraga	5.147	2.882	2.265	55,99
52.72.04.1002	Rontu	3.306	1.905	1.401	57,62
52.72.04.1003	Penanae	4.188	2.352	1.836	56,16
52.72.04.1004	Kendo	1.529	985	544	64,42
52.72.04.1005	Ntobo	3.861	2.200	1.661	56,98
52.72.04.1006	Nitu	1.537	955	582	62,13
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	4.006	2.105	1.901	52,55
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	3.777	1.991	1.786	52,71
52.72.04.1009	Rite	2.403	1.295	1.108	53,89
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	5.185	2.884	2.301	55,62
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	4.847	2.562	2.285	52,86
<i>52.72.05</i>	<i>Mpunda</i>	33.365	18.279	15.086	54,78
52.72.05.1001	Monggonao	4.036	2.085	1.951	51,66
52.72.05.1002	Sadia	3.680	1.941	1.739	52,74
52.72.05.1003	Santi	2.744	1.564	1.180	57,00
52.72.05.1004	Sambinae	3.505	1.998	1.507	57,00
52.72.05.1005	Penatoi	4.820	2.648	2.172	54,94
52.72.05.1006	Lewirato	2.016	1.035	981	51,34
52.72.05.1007	Mande	2.864	1.572	1.292	54,89
52.72.05.1008	Panggi	2.714	1.553	1.161	57,22
52.72.05.1009	Manggemaci	4.072	2.221	1.851	54,54
52.72.05.1010	Matakando	2.914	1.662	1.252	57,04

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Salah satu target kepemilikan dokumen administrasi kependudukan secara nasional adalah kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-17 tahun, dimana target yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah 97 %. Untuk pencapaian target tersebut dilakukan beberapa program dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0-17 tahun melalui inovasi-inovasi terkait.

Tabel VI.5 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun			
		Usia 0-17 Tahun	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72	<i>Kota Bima</i>	49.344	48.497	847	98,28
52.72.01	<i>Rasanae Barat</i>	9.420	9.258	162	98,28
52.72.01.1001	Paruga	1.585	1.553	32	97,98
52.72.01.1002	Nae	1.270	1.262	8	99,37
52.72.01.1003	Sarae	1.594	1.560	34	97,87
52.72.01.1004	Tanjung	2.048	2.004	44	97,85
52.72.01.1013	Pane	757	754	3	99,60
52.72.01.1014	Dara	2.166	2.125	41	98,11
52.72.02	<i>Rasanae Timur</i>	5.809	5.725	84	98,55
52.72.02.1004	Kumbe	1.140	1.121	19	98,33
52.72.02.1008	Lampe	480	478	2	99,58
52.72.02.1009	Dodu	1.000	986	14	98,60
52.72.02.1011	Nungga	793	778	15	98,11
52.72.02.1018	Kodo	622	613	9	98,55
52.72.02.1019	Oi Fo'o	690	683	7	98,99
52.72.02.1020	Lelamase	560	553	7	98,75
52.72.02.1021	Oimbo	524	513	11	97,90

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun			
		Usia 0-17 Tahun	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.03	Asakota	11.703	11.474	229	98,04
52.72.03.1001	Melayu	1.891	1.848	43	97,73
52.72.03.1002	Jatiwangi	2.464	2.418	46	98,13
52.72.03.1003	Jatibaru	1.904	1.867	37	98,06
52.72.03.1004	Kolo	1.913	1.875	38	98,01
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.195	1.170	25	97,91
52.72.03.1006	Ule	2.336	2.296	40	98,29
52.72.04	Raba	12.099	11.895	204	98,31
52.72.04.1001	Penaraga	1.600	1.542	58	96,38
52.72.04.1002	Rontu	1.054	1.043	11	98,96
52.72.04.1003	Penanae	1.315	1.305	10	99,24
52.72.04.1004	Kendo	462	455	7	98,48
52.72.04.1005	Ntobo	1.165	1.154	11	99,06
52.72.04.1006	Nitu	472	466	6	98,73
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.230	1.209	21	98,29
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.091	1.066	25	97,71
52.72.04.1009	Rite	764	754	10	98,69
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.517	1.496	21	98,62
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.429	1.405	24	98,32

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun			
		Usia 0-17 Tahun	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.05	Mpunda	10.313	10.145	168	98,37
52.72.05.1001	Monggonao	1.131	1.117	14	98,76
52.72.05.1002	Sadia	1.094	1.079	15	98,63
52.72.05.1003	Santi	901	893	8	99,11
52.72.05.1004	Sambinae	1.123	1.105	18	98,40
52.72.05.1005	Penatoi	1.566	1.524	42	97,32
52.72.05.1006	Lewirato	603	588	15	97,51
52.72.05.1007	Mande	933	917	16	98,29
52.72.05.1008	Panggi	785	779	6	99,24
52.72.05.1009	Manggemaci	1.246	1.229	17	98,64
52.72.05.1010	Matakando	931	914	17	98,17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Berkat kerja sama dan bantuan semua pihak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dapat mencapai target yang telah ditetapkan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 98,28 %.

2. Akta Kematian

Setiap kematian warga Negara wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana pencatatan sipil setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sesuai amanat Undang-Undang 24 tahun 2013 pasal 44 tentang Administrasi Kependudukan. Sehubungan dengan amanat Undang-undang tersebut di atas maka penerbitan akte kematian merupakan salah satu target capain yang harus dicapai oleh setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Indonesia. Penerbitan Akta Kematian ini sangat berhubungan erat sekali terhadap valid atau tidaknya *database*

kependudukan karena apabila kematian setiap warga negara tidak dilaporkan untuk diterbitkan akte kematiannya maka akan muncul masalah dikemudian hari dimana data masyarakat yang bersangkutan masih tercatat aktif/hidup. Untuk percepatan pencatatan kematian penduduk Kota Bima yang telah meninggal dunia dilaksanakan melalui beberapa inovasi dan program, salah satu nya adalah melalui inovasi “Warda Warta”/Wara Bidan Wara Akta. Inovasi ini bekerja sama dengan seluruh bidan di Kota Bima guna mendapatkan informasi/data jumlah penduduk lahir mati untuk dikonsolidasikan dengan data dari Dikes.

Tabel VI.6 Jumlah Penerbitan Akta Kematian Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Akta Kematian
1	Rasanae Barat	175
2	Rasanae Timur	134
3	Asakota	183
4	Raba	293
5	Mpunda	182
Total		967

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Akte Kematian sangat berguna untuk mengurus santunan kematian, hak waris, kepegawaian, asuransi dan peristiwa perdata lainnya. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital mempermudah masyarakat dalam mengurus Akte Kematian melalui gadget dalam genggamannya masyarakat langsung.

Sementara untuk penerbitan akte kematian dapat dilakukan setelah persyaratan untuk menerbitkan akte kematiannya dilengkapi oleh keluarga maupun kader percepatan akta yang telah ditunjuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan yang muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinannya.

Dari tabel 56 dapat dilihat bahwa penduduk yang memiliki akta perkawinan 52.675 jiwa (71,02 %) dari jumlah penduduk berstatus kawin 74.172 jiwa. Angka kepemilikan akta perkawinan tertinggi berada di Kecamatan Asakota sebanyak 12.872 jiwa (76,93 %) dan terendah di Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 8.766 jiwa (66,84%).

Tabel VI.7 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perkawinan per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Kawin			
		Penduduk ber-Status Kawin	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72	<i>Kota Bima</i>	74.172	52.675	21.497	71,02
52.72.01	<i>Rasanae Barat</i>	13.114	8.766	4.348	66,84
52.72.01.1001	Paruga	2.285	1.544	741	67,57
52.72.01.1002	Nae	1.821	1.269	552	69,69
52.72.01.1003	Sarae	2.143	1.456	687	67,94
52.72.01.1004	Tanjung	2.695	1.709	986	63,41
52.72.01.1013	Pane	1.112	732	380	65,83
52.72.01.1014	Dara	3.058	2.056	1.002	67,23
52.72.02	<i>Rasanae Timur</i>	9.796	6.666	3.130	68,05
52.72.02.1004	Kumbe	1.877	1.241	636	66,12
52.72.02.1008	Lampe	789	537	252	68,06
52.72.02.1009	Dodu	1.612	1.074	538	66,63

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Kawin			
		Penduduk ber-Status Kawin	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.02.1011	Nungga	1.263	827	436	65,48
52.72.02.1018	Kodo	1.115	741	374	66,46
52.72.02.1019	Oi Fo'o	1.146	752	394	65,62
52.72.02.1020	Lelamase	1.115	744	371	66,73
52.72.02.1021	Oimbo	879	750	129	85,32
52.72.03	Asakota	16.732	12.872	3.860	76,93
52.72.03.1001	Melayu	2.492	1.766	726	70,87
52.72.03.1002	Jatiwangi	3.520	2.893	627	82,19
52.72.03.1003	Jatibaru	2.935	1.958	977	66,71
52.72.03.1004	Kolo	2.794	1.951	843	69,83
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	2.080	1.672	408	80,38
52.72.03.1006	Ule	2.911	2.632	279	90,42
52.72.04	Raba	19.003	13.270	5.733	69,83
52.72.04.1001	Penaraga	2.262	1.556	706	68,79
52.72.04.1002	Rontu	1.576	1.142	434	72,46
52.72.04.1003	Penanae	1.941	1.327	614	68,37
52.72.04.1004	Kendo	810	568	242	70,12
52.72.04.1005	Ntobo	2.035	1.440	595	70,76
52.72.04.1006	Nitu	837	543	294	64,87
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.848	1.345	503	72,78
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.838	1.154	684	62,79
52.72.04.1009	Rite	1.155	822	333	71,17
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	2.472	1.733	739	70,11
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	2.229	1.640	589	73,58

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Kawin			
		Penduduk ber-Status Kawin	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.05	Mpunda	15.527	11.101	4.426	71,49
52.72.05.1001	Monggonao	1.904	1.411	493	74,11
52.72.05.1002	Sadia	1.704	1.175	529	68,96
52.72.05.1003	Santi	1.265	873	392	69,01
52.72.05.1004	Sambinae	1.748	1.240	508	70,94
52.72.05.1005	Penatoi	2.097	1.561	536	74,44
52.72.05.1006	Lewirato	928	678	250	73,06
52.72.05.1007	Mande	1.272	860	412	67,61
52.72.05.1008	Panggi	1.311	1.009	302	76,96
52.72.05.1009	Manggemaci	1.890	1.325	565	70,11
52.72.05.1010	Matakando	1.408	969	439	68,82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

4. Akta Perceraian

Pasangan suami istri tentunya berkeinginan menjalani ikatan perkawinan selamanya, tetapi bila sudah tidak dapat dipertahankan maka terjadi perceraian. Bukti hukum pasangan suami istri telah berpisah adalah Akta Perceraian. Bila Akta Perkawinan non-muslim dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perceraian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan bila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (Muslim) maka proses perceraianya melalui Pengadilan Agama.

Tabel VI.8 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perceraian per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Cerai			
		Penduduk ber-Status Cerai	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72	<i>Kota Bima</i>	3.655	2.494	1.161	68,24
52.72.01	<i>Rasanae Barat</i>	892	572	320	64,13
52.72.01.1001	Paruga	146	90	56	61,64
52.72.01.1002	Nae	131	80	51	61,07
52.72.01.1003	Sarae	144	94	50	65,28
52.72.01.1004	Tanjung	189	131	58	69,31
52.72.01.1013	Pane	106	62	44	58,49
52.72.01.1014	Dara	176	115	61	65,34
52.72.02	<i>Rasanae Timur</i>	380	241	139	63,42
52.72.02.1004	Kumbe	105	64	41	60,95
52.72.02.1008	Lampe	24	18	6	75,00
52.72.02.1009	Dodu	66	40	26	60,61
52.72.02.1011	Nungga	36	24	12	66,67
52.72.02.1018	Kodo	30	19	11	63,33
52.72.02.1019	Oi Fo'o	25	13	12	52,00
52.72.02.1020	Lelamase	19	11	8	57,89
52.72.02.1021	Oimbo	75	52	23	69,33
52.72.03	<i>Asakota</i>	756	551	205	72,88
52.72.03.1001	Melayu	144	98	46	68,06
52.72.03.1002	Jatiwangi	139	108	31	77,70
52.72.03.1003	Jatibaru	138	112	26	81,16
52.72.03.1004	Kolo	120	65	55	54,17
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	106	88	18	83,02
52.72.03.1006	Ule	109	80	29	73,39

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Cerai			
		Penduduk ber- Status Cerai	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.04	Raba	888	584	304	65,77
52.72.04.1001	Penaraga	126	78	48	61,90
52.72.04.1002	Rontu	87	61	26	70,11
52.72.04.1003	Penanae	93	63	30	67,74
52.72.04.1004	Kendo	31	23	8	74,19
52.72.04.1005	Ntobo	60	46	14	76,67
52.72.04.1006	Nitu	13	7	6	53,85
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	86	54	32	62,79
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	91	57	34	62,64
52.72.04.1009	Rite	52	33	19	63,46
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	131	88	43	67,18
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	118	74	44	62,71
52.72.05	Mpunda	739	546	193	73,88
52.72.05.1001	Monggonao	80	60	20	75,00
52.72.05.1002	Sadia	63	52	11	82,54
52.72.05.1003	Santi	48	28	20	58,33
52.72.05.1004	Sambinae	67	49	18	73,13
52.72.05.1005	Penatoi	135	94	41	69,63
52.72.05.1006	Lewirato	41	30	11	73,17
52.72.05.1007	Mande	76	61	15	80,26
52.72.05.1008	Panggi	63	45	18	71,43
52.72.05.1009	Manggemaci	113	89	24	78,76
52.72.05.1010	Matakando	53	38	15	71,70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

Dari tabel VI.8 dapat dilihat bahwa penduduk yang memiliki akta perceraian 2.494 orang (68,24 %) dari jumlah penduduk berstatus cerai hidup 3.655 orang. Angka kepemilikan akta perceraian tertinggi berada di Kecamatan Mpunda sebanyak 546 orang (73,88 persen) dan terendah di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 241 orang (63,42 persen).

D. Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak

Jumlah kepemilikan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Pencatatan pengakuan, pengesahan, pengangkatan anak ini merupakan kesadaran masyarakat untuk mengurus dasar legalitas peristiwa yang berdampak pada hak keperdataan anak dan menghindari permasalahan di kemudian hari.

Tabel VI.9 Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan & Pengangkatan Anak

No	Peristiwa	Jumlah Pencatatan
1	Pengakuan Anak	0
2	Pengesahan Anak	10
3	Pengangkatan Anak	16
4	Perubahan Nama	21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022

E. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan untuk anak usia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari. Adapun kepemilikan KIA pada tahun 2022 di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel VI.10 berikut ini. Sesuai dengan program pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan maka pada tahap awal Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bima ditargetkan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk tahapan berikutnya baru ditargetkan pemanfaatan Kartu Identitas Anak yang direncanakan antara lain sebagai salah satu bukti diri, sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, transaksi keuangan di perbankan, dll.

Di Kota Bima ada fasilitas dari mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bima dan diikat dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU), memperoleh discount/potongan harga tertentu sesuai MOU masing-masing. Jumlah mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bima sejumlah 3 mitra:

1. Outdoormu Adventure Store
2. Kolam Renang Bima Tirta
3. Bimbingan Belajar Prime Generation Cabang Kota Bima
4. Global Mart Kota Bima

Jika dilihat pada tabel VI.10 di bawah ini total kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Bima sebanyak 22.693 anak atau setara dengan 49,62 persen. Capaian tertinggi berada pada kecamatan Raba sebesar 55,37 persen (6.166 anak) dan capaian terendah jatuh pada Kecamatan Asakota yakni sebesar 45,23 persen atau setara dengan 4.916 anak dari 10.868 anak wajib KIA.

Tabel VI.10 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
		Wajib KIA	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72	<i>Kota Bima</i>	45.732	22.693	23.039	49,62
52.72.01	<i>Rasanae Barat</i>	8.662	4.006	4.656	46,25
52.72.01.1001	Paruga	1.450	705	745	48,62
52.72.01.1002	Nae	1.158	556	602	48,01
52.72.01.1003	Sarae	1.452	670	782	46,14
52.72.01.1004	Tanjung	1.883	652	1.231	34,63
52.72.01.1013	Pane	705	414	291	58,72
52.72.01.1014	Dara	2.014	1.009	1.005	50,10
52.72.02	<i>Rasanae Timur</i>	5.478	2.702	2.776	49,32
52.72.02.1004	Kumbe	1.038	480	558	46,24
52.72.02.1008	Lampe	467	343	124	73,45
52.72.02.1009	Dodu	933	350	583	37,51
52.72.02.1011	Nungga	743	400	343	53,84
52.72.02.1018	Kodo	597	349	248	58,46
52.72.02.1019	Oi Fo'o	673	359	314	53,34
52.72.02.1020	Lelamase	538	242	296	44,98
52.72.02.1021	Oimbo	489	179	310	36,61
52.72.03	<i>Asakota</i>	10.868	4.916	5.952	45,23
52.72.03.1001	Melayu	1.766	754	1.012	42,70
52.72.03.1002	Jatiwangi	2.236	910	1.326	40,70
52.72.03.1003	Jatibaru	1.745	762	983	43,67
52.72.03.1004	Kolo	1.799	843	956	46,86
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.119	576	543	51,47
52.72.03.1006	Ule	2.203	1.071	1.132	48,62

Kode	Wilayah	Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
		Wajib KIA	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.04	Raba	11.136	6.166	4.970	55,37
52.72.04.1001	Penaraga	1.498	866	632	57,81
52.72.04.1002	Rontu	959	462	497	48,18
52.72.04.1003	Penanae	1.218	709	509	58,21
52.72.04.1004	Kendo	431	233	198	54,06
52.72.04.1005	Ntobo	1.076	584	492	54,28
52.72.04.1006	Nitu	438	235	203	53,65
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.149	638	511	55,53
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	993	531	462	53,47
52.72.04.1009	Rite	696	385	311	55,32
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.393	824	569	59,15
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.285	699	586	54,40
52.72.05	Mpunda	9.588	4.903	4.685	51,14
52.72.05.1001	Monggonao	1.062	495	567	46,61
52.72.05.1002	Sadia	1.007	619	388	61,47
52.72.05.1003	Santi	828	458	370	55,31
52.72.05.1004	Sambinae	1.046	487	559	46,56
52.72.05.1005	Penatoi	1.455	612	843	42,06
52.72.05.1006	Lewirato	559	296	263	52,95
52.72.05.1007	Mande	844	367	477	43,48
52.72.05.1008	Panggi	721	428	293	59,36
52.72.05.1009	Manggemaci	1.178	680	498	57,72
52.72.05.1010	Matakando	888	461	427	51,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2022, diolah.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Data kependudukan merupakan data yang strategis dan dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan berkelanjutan. Dinamika penduduk yang tinggi, menjadikan data sebagai sumber data harus terus di *update*. Pembangunan yang berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.

A. Kesimpulan

1. Aspek Kuantitas

- a. Jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan terus-menerus, dan luas wilayah Kota Bima tetap. Walaupun data terbaru luas wilayah tetap yaitu 222,25 km².
- b. Meskipun secara nasional jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, namun proporsi jumlah penduduk Kota Bima jenis kelamin perempuan lebih besar dari laki-laki, hal ini berimplikasi pada pembangunan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan *Gender*, Indeks Pemberdayaan *Gender* dan Indeks Kesenjangan *Gender*. Usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, mengindikasikan jumlah kepala keluarga perempuan pada usia lanjut akan cenderung lebih besar. Kelompok perempuan kepala keluarga termasuk kategori kelompok rentan terpinggirkan dalam kebijakan sosial pemerintah, maka diperlukan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok ini.

- c. Pada tahun 2022 ini Kota Bima sudah mengalami “Bonus Demografi” yaitu dimana jumlah penduduk yang produktif lebih besar dari usia non produktif. Usia produktif di Kota Bima mencapai 68,35 %, hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kondisi ini, dapat dijadikan peluang bagi daerah untuk memajukan kesejahteraan warganya dengan syarat masyarakat usia produktif ini memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM baik pendidikan & pelatihan, kesehatan, kemampuan komunikasi hingga penguasaan teknologi serta penyediaan lapangan pekerjaan perlu didukung semua *stakeholder* daerah sehingga kelompok umur produktif ini dapat tertampung dalam pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.
- d. Kepala Keluarga yang mempunyai status pekerjaan belum/tidak bekerja berjumlah 3.576 KK, padahal kepala keluarga sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan mencari pendapatan keluarga. Kelompok ini hendaknya dijadikan prioritas dalam kebijakan pemerintah, agar tidak berimplikasi pada permasalahan sosial lainnya.

2. Aspek Kualitas

- a. Angka kematian bayi di Kota Bima tahun 2022 sebesar 5,23 yang berarti terjadi kematian bayi sebanyak 16 bayi per seribu kelahiran hidup. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi, maka oleh karena itu peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, dan pendekatan perilaku hidup sehat harus tetap ditingkatkan.
- b. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Bima yang tercatat dalam *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima berjumlah 550 jiwa, meskipun hanya 0,35 % dari jumlah penduduk tetap perlu adanya kebijakan untuk penyediaan akses terutama fasilitas umum dan kebijakan pemerintah daerah, dengan harapan kelompok disabilitas ini agar tetap bisa bersosialisasi seperti warga normal lainnya. Perlu diperhatikan bahwa data tersebut adalah jumlah penyandang disabilitas yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sementara data pada Dinas Sosial Kota Bima berjumlah di atas 800 jiwa.

- c. Penyebab perceraian penduduk yang terbesar karena pertengkaran dan perselisihan. Hal tersebut diperlukan kebijakan dan sosialisasi agar kesadaran kehidupan berumah tangga meningkat sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Kepemilikan dokumen kependudukan warga Kota Bima terus ditingkatkan dengan pelayanan jemput bola dan sosialisasi ke masyarakat, sehingga warga merasa tenang dan nyaman secara hukum dan keperdataan. Hal tersebut menjadi tantangan bersama yang memerlukan intervensi kebijakan di kalangan internal pemerintah kota dan warga sendiri. Masyarakat harus diedukasi tentang pemahaman dan kesadaran akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi dan ter *update*, sehingga pendokumentasian data kependudukan dan peristiwa pencatatan sipil dilaksanakan dengan tertib. Aparatur SDM instansi pelaksana data kependudukan perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diorientasikan pada keakuratan dan ketelitian verifikasi formulir agar konsisten antar data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait aspek kepemilikan dokumen sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2022 sebesar 100 %, akan tetapi yang tercetak hanya 30,98%. Kepemilikan KK sering menjadi dasar identifikasi kelompok sasaran program jaminan sosial. Posisi kepala keluarga seorang perempuan dan lansia terkadang rentan terlewatkan untuk akses program sosial. Kevalidan dan *updating* data dalam Kartu Keluarga ini sangat menentukan prioritas kebijakan sosial yang diambil pemerintah. Hal tersebut menjadikan kebijakan yang diambil tepat dan menysasar kepada masyarakat.
- b. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran terutama usia 17 tahun ke atas dan Kartu Identitas Anak (KIA), masih diperlukan dan dijadikan prioritas dalam menentukan program penuntasan dokumen kependudukan. Dokumen tersebut sangat diperlukan karena menjadi dokumen hukum seseorang dalam urusan keperdataan dan urusan publik.

- c. Program peningkatan pencatatan dokumen kependudukan untuk akta kematian dan akta kelahiran yang diperluas untuk semua umur diharapkan berhasil meningkatkan pemahaman arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kesadaran warga masyarakat.

4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan

Tantangan yang dihadapi untuk pembangunan daerah berwawasan kependudukan di Kota Bima :

- a. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya *updating* data kependudukan masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi terhadap pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya *updating* data dilaksanakan sampai tingkat RT/RW. Data yang *update* dan dapat dipertanggungjawabkan akan menambah kualitas data kependudukan yang dihasilkan. Setiap ada peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dilaporkan, maka data akan semakin valid, akurat sehingga pengambilan kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran
- b. Pemanfaatan data yang belum terintegrasi antara data penduduk yang diakses instansi eksternal yang mempunyai instansi vertikal di tingkat pusatnya dengan data penduduk yang bersangkutan menjadikan kurang efektifnya sistem. Hal tersebut diperlukan sistem yang mutakhir terintegrasi, sehingga ketika penduduk melaporkan perubahan datanya, maka data yang diakses oleh instansi eksternal (milik instansi vertikal) dapat *update* secara langsung.
- c. Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk semua penduduk dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum maksimal, diperlukan kebijakan dan kerja sama dengan OPD/instansi/kelurahan/PKK/Sekolah dan pihak swasta sehingga cakupan akta kelahiran dan KIA untuk semua penduduk Kota Bima juga meningkat.

d. Koordinasi antar lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data diperlukan peningkatan secara terus-menerus. Pencatatan perkawinan dan perceraian penduduk yang beragama Islam di KUA atau Pengadilan Agama (Kementerian Agama), pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi oleh Kementerian Hukum & HAM, pelayanan KK-KTP dan akta belum terkoneksi seluruhnya.

B. Implikasi Kebijakan

1. Kebijakan validasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

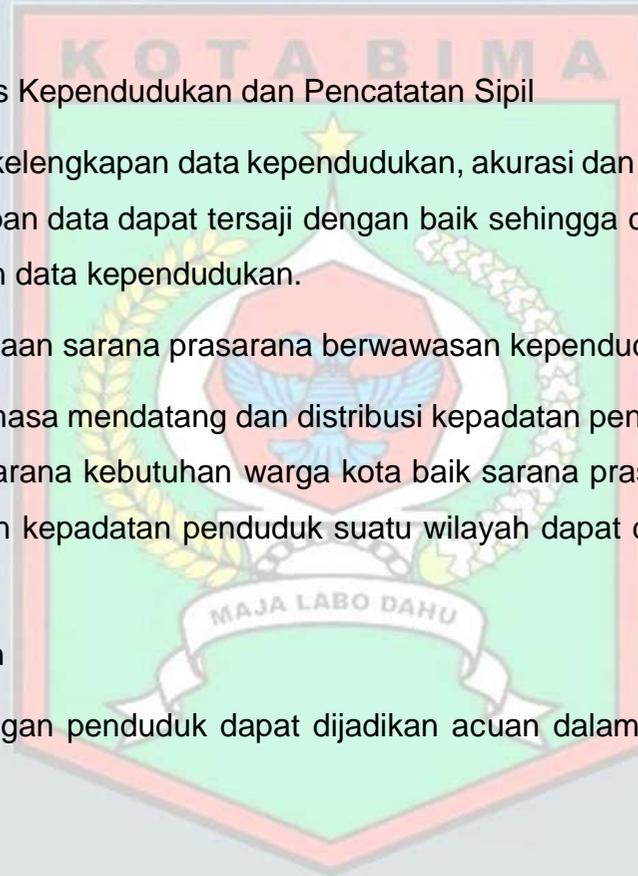
Perlu pengoptimalan upaya penyajian kelengkapan data kependudukan, akurasi dan validitas data. Dukungan data dari dinas/OPD lain sangat dibutuhkan agar akurasi dan kelengkapan data dapat tersaji dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi *stakeholder* dan pihak pengambil kebijakan yang berkepentingan dengan data kependudukan.

2. Kebijakan penataan ruang dan penyediaan sarana prasarana berwawasan kependudukan

Terkait perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang dan distribusi kepadatan penduduk sekiranya harus ada lebih banyak kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana prasarana kebutuhan warga kota baik sarana prasarana perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Proyeksi proporsi dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat dijadikan rujukan perencanaan daya tampung dan daya dukung wilayah.

3. Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan

Perkiraan penambahan dan pengurangan penduduk dapat dijadikan acuan dalam kebijakan penyediaan pangan dan sumber kebutuhan energi daerah.



4. Kebijakan Ketenagakerjaan

Kota Bima sudah mengalami “Bonus Demografi”. Hal tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena hal ini dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan harus tepat sehingga masa “Bonus Demografi” yang sedang berjalan dapat termanfaatkan dengan baik.

5. Kebijakan di bidang Sosial

Penduduk yang menyandang disabilitas, keluarga miskin, perceraian dan perempuan sebagai kepala rumah tangga dapat dijadikan pertimbangan penyusunan kebijakan penanganan masalah sosial. Permasalahan sosial merupakan permasalahan bersama yang perlu dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat. Disabilitas, status sosial ini memerlukan kebijakan yang berpihak kepada mereka sehingga tetap dapat bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

